



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS DAYA SAING TIAP NEGARA ANGGOTA SAARC DALAM
LIBERALISASI PERDAGANGAN INTRA-KAWASAN ASIA SELATAN
MELALUI MEKANISME SAPTA DAN SAFTA TAHUN 2000-2010**

SKRIPSI

TULUS BANGUN HUTAGALUNG

0806352454

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

DEPOK

JUNI 2012

Universitas Indonesia



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS DAYA SAING TIAP NEGARA ANGGOTA SAARC DALAM
LIBERALISASI PERDAGANGAN INTRA-KAWASAN ASIA SELATAN
MELALUI MEKANISME SAPTA DAN SAFTA TAHUN 2000-2010**

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada Prodi Ilmu
Hubungan Internasional

TULUS BANGUN HUTAGALUNG

0806352454

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

DEPOK

JUNI 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Skripsi ini adalah hasil karya sendiri
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : TULUS BANGUN HUTAGALUNG

NPM : 0806352454

Tanda Tangan :

Tanggal : 20 Juni 2012

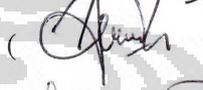
HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : TULUS BANGUN HUTAGALUNG
NPM : 0806352454
Program Studi : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
Judul Skripsi : Analisis Daya Saing Tiap Negara Anggota SAARC dalam Liberalisasi Perdagangan Intra-Kawasan Asia Selatan melalui Mekanisme SAPTA dan SAFTA tahun 2000-2010

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Fredy B.L. Tobing, M.Si ()
Sekretaris : Aninda Tirtawinata, M.Litt ()
Penguji Ahli : Hariyadi Wirawan, Ph.D ()
Pembimbing : Makmur Keliat, Ph.D ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 28 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Ekonomi Politik Internasional adalah penggunaan teori ekonomi untuk menjelaskan perubahan perilaku sosial yang berdimensi politik (internasional)
Hero Kuntjoro-Jakti

Puji dan syukur saya panjatkan kepada ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini bisa berjalan dengan lancar dan selesai tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini tidak lain merupakan salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Sosial dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Perdagangan internasional merupakan salah satu topik penting dalam pembahasan dinamika kerjasama ekonomi-politik global dari abad ke abad; yang pemainnya bisa berupa aktor negara (pemerintah) ataupun aktor non-negara (pihak swasta domestik atau MNCs, terutama pada abad ke-20). Mengapa harus berdagang? Karena tidak semua negara dapat memenuhi kebutuhannya secara unilateral (autarki), terutama negara yang sumber daya alamnya rendah, sehingga harus melakukan barter dengan negara lain. Perdagangan internasional dan regional juga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, mendorong daya saing nasional, dan berbagai keuntungan lainnya. Di satu sisi, negara berperan untuk mencapai kepentingan nasional (kesejahteraan rakyat dalam bidang sosial, ekonomi, politik, teknologi, dan bidang lainnya) melalui perdagangan dengan negara lain, sedangkan di sisi lain swasta berusaha untuk menghasilkan keuntungan maksimal bagi perusahaannya semata. Penelitian dalam skripsi ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana caranya agar sebuah negara dapat mencapai keuntungan kompetitif dalam persaingan perdagangan internasional yang semakin terbuka (melalui *free trade*), baik dalam lingkup global atau regional berdasarkan data statistik. Caranya menganalisis kemampuan pemerintah (state) untuk menyelaraskan kombinasi kebijakan domestik dan luar negerinya (polugri) dengan strategi perusahaan (industri) swasta domestiknya. Kawasan yang diteliti dalam skripsi ini adalah Asia Selatan karena di dalamnya terdapat satu negara yang saat ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dari Asia, selain China, yaitu India.

Ternyata, walaupun sudah terbentuk kerjasama perdagangan bebas melalui di Asia Selatan melalui mekanisme *South Asian Preferential Trade* (SAPTA) pada tahun 1995 dan *South Asian Free Trade Agreement* (SAFTA) pada tahun 2006, tetapi nyatanya persentase nilai ekspor intra-kawasannya terhadap total nilai eksportnya ke dunia masih sangat rendah, hanya berkisar 4-6%, dibanding dengan Uni Eropa yaitu 57-65%, ASEAN yaitu 22-25%, dan NAFTA 48-55% selama tahun 2000-2010. Berbagai hal menyebabkan hal ini terjadi, terutama tingkat komplementaritas (saling melengkapi) produk yang rendah di Asia Selatan. Artinya, kebanyakan barang yang diproduksi di kawasan itu sama, yaitu produk tekstil, sehingga mau tidak mau membuat mereka harus lebih berdagang dengan kawasan di luar Asia Selatan, terutama dengan AS dan Uni Eropa. Hal ini diperparah oleh kondisi hubungan bilateral antar negara yang kurang baik,

terutama India-Pakistan yang menyebabkan banyak terjadi konflik bilateral yang berujung pada kebencian politik, perlombaan senjata, serta ketidak-mauan untuk mengikatkan diri pada kerjasama ekonomi, politik, dan sosial berdasarkan komitmen dan rasa saling percaya yang tinggi (lack of political willing and trust). Sepertinya, regionalisme Asia Selatan tidak dihasilkan akibat kesamaan pengalaman tiap negara akan dampak negatif dari proteksi dan *trading blocs* negara-negara Barat, terutama dalam perdagangan negara Utara-Selatan (Developed Countries dengan Least-Developed Countries).

Pengalaman ini dapat menjadi pelajaran bagi kerjasama regional lainnya, khususnya ASEAN. Indonesia sebagai negara yang memiliki SDA melimpah ternyata masih kurang berdaya-saing tinggi jika dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand menurut hasil survei Asian Competitiveness Institute (ACI). Padahal, Kawasan Ekonomi ASEAN (liberalisasi sektor barang dan jasa) sudah akan dimulai pada tahun 2015. Bagaimana jadinya nasib industri nasional Indonesia yang belum siap untuk berkompetisi dengan industri dari Malaysia dan Thailand yang tidak hanya bergantung pada kekayaan alam sebagai keuntungan absolut atau komparatif tetapi sudah mengkreasiannya sedemikian rupa menjadi produk kompetitif melalui pemakaian teknologi tinggi yang menghasilkan barang yang efisien dan murah? Seberapa efektif kolaborasi peran pemerintah dan swasta dalam menanganinya?

Namun demikian, penulis tidak menyangkal bawa penelitian ini memiliki banyak kekurangan, baik secara substantif maupun teknis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari sidang pembaca untuk memperkaya khazanah isi penelitian ini. Penulis juga sangat berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang bersangkutan.

Depok, 20 Juni 2012

Tulus Bangun Hutagalung

UCAPAN TERIMAKASIH

Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghinakan hikmat dan didikan (Amsal 1:7)

Terima kasih untukMu, Tuhan Yesus Kristus, yang membimbing penulis dalam menjalani hidup selama berkuliah di Universitas Indonesia. Banyak hal yang tak terpikirkan dan terucapkan yang Engkau nyatakan dalam kehidupanku selama ini.

1. Terima kasih juga kepada Pak Makmur Keliat, Ph.D yang menjadi dosen dan pembimbing skripsi penulis, yang mengajari penulis mengenai logika berpikir dan kritis terhadap tulisan dalam penelitian ini, serta yang meluangkan waktu untuk berdiskusi dan bercengkerama bersama penulis.
2. Terima kasih kepada Mbak Riris, MA sebagai dosen dan pembimbing akademis penulis selama di HI UI. Terima kasih atas saran dan perhatiannya, serta kesediaannya untuk menjawab telepon atau sms walaupun sedang berada di luar negeri, Mbak.
3. Terimakasih untuk Mas Hariyadi Wirawan, Ph.D selaku Ketua Departemen, Mas Andi Wijayanto, MA, M.Sc selaku ketua Jurusan S-1, Mas Freddy sebagai dosen SPM dan Ketua Sidang Skripsi, serta seluruh dosen, staf, dan karyawan (terutama Mas Roni dan Mas Andre) di departemen HI UI atas kesediaannya membantu penulis dalam menjalankan aktivitas perkuliahan selama ini.
4. Terimakasih untuk orangtua penulis, Drs.A. Hutagalung dan R. Panjaitan, SH yang selalu mengingatkan dan mengajarkan penulis untuk berhikmat dalam perkuliahan dan kehidupan. Penulis sangat bersyukur kepada Tuhan atas peran beliau sebagai guru, sahabat, dan pendeta bagi penulis. Penulis selalu mengingat perkataan, “Emas akan tetap menjadi emas dimanapun ia ditempatkan”. Penulis juga bersyukur untuk dukungan dari adik-adikku tersayang, Christina Natalia Hutagalung, Juli Master Hutagalung, dan Hosea Sutan Manahara Hutagalung yang selalu kurindukan walaupun dulu penulis sering “berkelahi” dengan mereka. Serta kepada keluarga besar Hutagalung dan Panjaitan.

5. Terimakasih juga untuk teman-temanku di perkuliahan, terutama teman-teman kluster Ekopolin, seperti Deny, Yonatan, Machfudz, Kun, Sri, Melissya, Ria' nyunyuk, Pra Ulpa, Jang Min Ah, Vina, Arya Johari, Gia, Weki, Yari, Vivi, Lesli, Adi Pratama, dan Bombom serta Yanti, Emir, Nico, Riza, Raisa, Nasrul, OK, Iqbal (horas, lae!!), Yusdam Arangg!. Juga untuk teman-teman seperjuangan SPM semester genap, yaitu Arya Rahadian, Agung, TB. Ari, Chei, Marga, Roby, Dafy, Fadlin, Adi Eraldo, dan Diku.
6. Terimakasih (Mauliate) juga untuk KK Manuver, ada Deny dan Yonatan (disebut lagi, bro! Hehehehe... Terimakasih untuk dukungan, perhatian, dan nasihat dari kalian) serta Palar sebagai TKK (semangat, Lar!) dan Bang Joshua Sijabat, SE sebagai PKK yang sangat baik hati. Tak terasa, kita tidak pernah KK lagi, apalagi KTB. Kapan, nich? Hahaha
7. Juga untuk AKK-ku, Andre, Roy, Yoel, Aldrin, Jehian, dan Yosua. Maaf, kalau kita sering tidak KK, baik karena kesibukanku ataupun kesibukan kalian. Let's utilize our small group for God's glory, brothers!
8. Terimakasih untuk teman-teman sepelayanan di kampus, yaitu Amie, Stefi, Devi, Reinhard, Sania, Masniar, Ratna, Rut, Yuli, serta para alumni seperti Kak Desca, Kak Dea, Kak Frisca, Kak Anne, Kak Jenny, Kak Paskah, Kak Petro, Bang Alex, teman-teman sepelayanan di PMKJ, Paskah UI 2012, dan orang-orang yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Mari kita mengintegrasikan iman dan ilmu untuk kemuliaan nama Tuhan dan kemajuan bangsa Indonesia ini.
9. Terimakasih juga untuk teman-teman NHKBP Srengsengsawah yang menolong penulis untuk semakin mantap dalam bernyanyi dan memuji Tuhan, terutama melalui beberapa kali festival paduan suara rohani di Jakarta, serta dukungan dan perhatiannya kepada penulis selama ini. Secara khusus kepada Amang Pdt.Manullang, Amang St.D.Silitonga, Bang Eben, Bang Parlin, Kak Mesly, Kak Elda, Bang Jubel, Bang Barita, Mewita, Kak Vera, Andre, Maranatha, Ribka, Agnes, Chrisna, dan teman-teman lainnya.

10. Terimakasih juga untuk semangat dan perhatian keluarga besar Alumni SMA Budi Mulia Pematangsiantar Jakarta-Depok (ABJAD) kepada penulis terutama saat penulis dirawat di RS.Cikini serta kesempatan penulis untuk belajar berorganisasi di dalamnya.
11. Terimakasih juga kepada rekan-rekan satu Jawa Kost, yaitu Pahala, Edenbert, Eben, Bang Frans, Bang Sutan yang telah sering meminjamkan motornya, Bang Kadek yang beberapa kali meminjamkan internetnya, Bang Desmon, dan Bang Budi.
12. Terimakasih juga kepada beberapa narasumber penulis dalam skripsi ini mengenai hubungan tingkat daya saing bangsa dengan keterbukaan ekonomi, terutama kepada Dr. Tan di NTU, Singapura. *Thank you for your network and precious explanation, Sir..*



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tulus Bangun Hutagalung

NPM : 0806352454

Program Studi : S-1 Reguler Ilmu Hubungan Internasional

Departemen : Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Analisis Daya Saing Tiap Negara Anggota SAARC dalam
Liberalisasi Perdagangan Intra-Kawasan Asia Selatan melalui Mekanisme
SAPTA dan SAFTA tahun 2000-2010”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas karya akhir saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 20 Juni 2012

Yang menyatakan,


Tulus Bangun Hutagalung

ABSTRAK

Nama : Tulus Bangun Hutagalung

Program Studi : 0806352454

Judul :

Analisis Daya Saing Tiap Negara Anggota SAARC dalam Liberalisasi
Perdagangan Intra-Kawasan Asia Selatan melalui Mekanisme SAPTA dan
SAFTA tahun 2000-2010

Walaupun sudah terbentuk kerjasama perdagangan bebas di Asia Selatan melalui mekanisme *South Asian Preferential Trade* (SAPTA) pada tahun 1995 dan *South Asian Free Trade Agreement* (SAFTA) pada tahun 2006, tetapi nyatanya persentase nilai ekspor intra-kawasannya terhadap total nilai eksportnya ke dunia masih sangat rendah, hanya berkisar 4-6%, dibanding dengan Uni Eropa yaitu 57-65%, ASEAN yaitu 22-25%, dan NAFTA 48-55% selama tahun 2000-2010. Berbagai hal menyebabkan hal ini terjadi, seperti tingkat komplementaritas (saling melengkapi) produk yang rendah di Asia Selatan. Artinya, kebanyakan barang yang diproduksi di kawasan itu sama, yaitu produk tekstil, sehingga mau tidak mau membuat mereka harus lebih berdagang dengan kawasan di luar Asia Selatan, terutama dengan AS dan Uni Eropa, belum lagi permasalahan politik dan keamanan domestik ataupun bilateral, seperti konflik India dan Pakistan. Melalui penelitian ini, penulis ingin menjelaskan penyebab rendahnya komplementaritas barang di Asia Selatan berdasarkan analisis daya saing industri domestik tujuh negara anggota SAARC melalui Lima Determinan menurut Teori Keuntungan Kompetitif Porter.

Kata Kunci: *SAPTA*, *SAFTA*, keuntungan komparatif, keuntungan kompetitif, kebijakan industri, kebijakan perdagangan

ABSTRACT

Name : Tulus Bangun Hutagalung

Study Program : 0806352454

Title :

Analysis of Each SAARC Members' Competitiveness in South Asia Intra-Regional Liberalisation Trade by SAPTA dan SAFTA Mechanism within 2000-2010

In spite of South Asia free trade cooperation by South Asian Preferential Trade Agreement (SAPTA) in 1995 and South Asian Free Trade Agreement (SAFTA) in 2006, there is still low percentage of intra-regional trade, especially export volume, compared with their total world export. However, its ratio percentage was 4-6% , whereas Eropa Union was 57-65%, ASEAN was 22-25%, and NAFTA was 48-55% within 2000-2010. The main cause is the incomplementary of their products export both in economy and political perspective. It means that they yield the similiar products, in particularly textile products, so that they have to relocate and sell their export products to outside regional countries, such as United States and Eropa Union, instead of making trade with SAARC members. Therefore this research attempts to explain the causes of low complementarity of South Asia products based on domestic industry and government polict analysis of seven SAARC member countries by using Porters' Competitive Advantage of Nations Theory.

Keywords : SAPTA, SAFTA, comparative advantage, competitive advantage, industrial policy, and trade policy

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL/GRAFIK/SKEMA.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Permasalahan	8
I.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	8
I.4 Tinjauan Pustaka.....	9
1.4.1 Keuntungan dari Liberalisasi Perdagangan Asia Selatan.....	9
1.4.2 Tingkat Daya Saing Negara Anggota SAARC.....	15
I.5 Kerangka Konseptual.....	19
1.5.1 Liberalisasi Perdagangan	19
1.5.2 Integrasi Ekonomi.....	21
1.5.3 Teori Keuntungan Kompetitif Bangsa	22
I.6 Metodologi Penelitian.....	25
I.6.1 Metode penelitian	25
I.6.2 Operasionalisasi Konsep.....	25

I.6.3 Model Analisis Sederhana	28
I.6.4 Asumsi dan Hipotesis	28
I.7 Rencana pembabakan skripsi.....	29

BAB II. KERJASAMA EKONOMI, POLITIK, DAN KEAMANAN DI ASIA SELATAN: KEBERADAAN SAARC

II.1. Sejarah Pembentukan, Tujuan, dan Efektivitas SAARC.....	30
II.1.1 Keanggotaan Afghanistan	32
II.2. Dinamika kerjasama ekonomi dan politik Asia Selatan.....	33
II.2.1. Kerjasama Ekonomi	33
II.2.2 Kesepakatan perdagangan preferensial) tahun 1995	36
2.2.1.1.a Kelebihan dan Kelemahannya.....	37
2.2.1.1.b Ancaman dan Kesempatannya	39
II.2.3 Kesepakatan perdagangan bebas (SAFTA) tahun 2006.....	40
2.2.3.a Kelebihan dan Kelemahannya.....	42
2.2.3.b Ancaman dan Kesempatannya	44
II.2.4 Konflik dan Kerjasama Politik-Keamanan Asia Selatan.....	45
II.2.5 Dinamika Ekonomi Politik Internasional: Pengaruh AS dan China di Asia Selatan	49

BAB III. EMPAT FAKTOR PENENTU (DETERMINAN) KEUNTUNGAN KOMPETITIF BANGSA

III.1 Produk atau Jasa Komparatif dari tiap Negara Anggota SAARC.....	51
III.2 Faktor-faktor Produksi Domestik.....	54
III.3 Situasi Permintaan Domestik dan Internasional	60
III.4 Berbagai industri dalam negeri yang berhubungan & mendukung.....	64
III.5 Strategi, struktur, & persaingan antar perusahaan domestik.....	67
III.6 Analisis Empat Determinan Teori Intan Porter.....	71
III.6.1 Terhadap Peningkatan Keuntungan Daya Saing Tiap Negara anggota SAARC tahun 1996-2010.....	71
III.6.1.1 Produk Tekstil.....	71

III.6.1.2 Produk Non-Tekstil.....	76
-----------------------------------	----

BAB IV. PERAN PEMERINTAH TIAP NEGARA ANGGOTA SAARC

IV.1 Kebijakan Pemerintah terhadap Industri Domestik.....	80
IV.2 Bangladesh.....	81
IV.2.1 Kebijakan Industri Bangladesh umum.....	81
IV.2.2 Kebijakan Industri RMG Bangladesh.....	82
IV.3 Bhutan.....	84
IV.3.1Kebijakan Ekonomi Politik Bhutan.....	84
IV.3.2 Kebijakan Industri, Perdagangan, &Wisata Bhutan.....	85
IV.4 India.....	87
IV.4.1 Kebijakan Kebijakan Ekonomi Politik India.....	87
IV.4.2 Kebijakan Industri Tekstil dan TI India.....	89
IV.5 Maladewa.....	91
IV.5.1 Kebijakan Ekonomi Politik Maladewa.....	91
IV.6 Nepal.....	93
IV.6.1 Kebijakan Ekonomi Politik Nepal.....	93
IV.7 Pakistan.....	94
IV.7.1 Kebijakan Ekonomi Politik Pakistan.....	94
IV.8 Sri Lanka.....	95
IV.8.1 Kebijakan Ekonomi Politik Sri Lanka.....	95
IV.9 Analisis Kebijakan Pemerintah.....	97
IV.9.1 Liberalisasi yang Terkendali.....	98
IV.9.2 Integrasi Ekonomi SAARC, ASEAN, NAFTA, UE.....	105

BAB V. KESIMPULAN, REKOMENDASI, DAN SARAN.....

LAMPIRAN.....	122
----------------------	------------

TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Nilai Ekspor ASEAN, UE, NAFTA, dan SAARC (juta dolar AS)	3
Tabel 1.2 Perdagangan intra-kawasan SAARC (dalam juta US\$).....	5
Tabel 2.4 Perbandingan share tiap negara Asia Selatan tahun 1985-2007	41
Tabel 2.5 Nilai Arus Perdagangan Intra-SAARC tahun 2006-2011	42
Tabel 2.6 Berbagai Jenis Konflik Bilateral di Asia Selatan.....	46
Tabel 2.7 Kronologi dari Kesepakatan Bilateral Kunci di Asia Selatan.....	48
Tabel 3.1 Indeks Keuntungan Komparatif (IRCA) Lima Negara di Asia Selatan tahun 1980-2009	51
Tabel 4.3 Persentase <i>share</i> (andil) sub-sektor dari GDP ril Bhutan	84

GRAFIK

Grafik 1.1 Total Nilai Ekspor intra-kawasan ASEAN, UE, NAFTA, dan SAARC.....	4
Grafik 1.2 Total Nilai Ekspor ASEAN, UE, NAFTA, & SAARC ke Dunia... 4	
Grafik 3.4 Kapasitas Mesin Pintal dan produksi hasil Tenun Bangladesh	64
Grafik 4.4.Share Sektoral terhadap GDP India tahun 1950-2004.....	88
Grafik 4.5 Jumlah Kedatangan turis ke Maldives tahun 1998-2007.....	92

SKEMA

Gambar 1.5.3 Skema Determinan dalam Teori Porter.....	23
Gambar 4.1 Skema Sistem Ekonomi Internasional	78

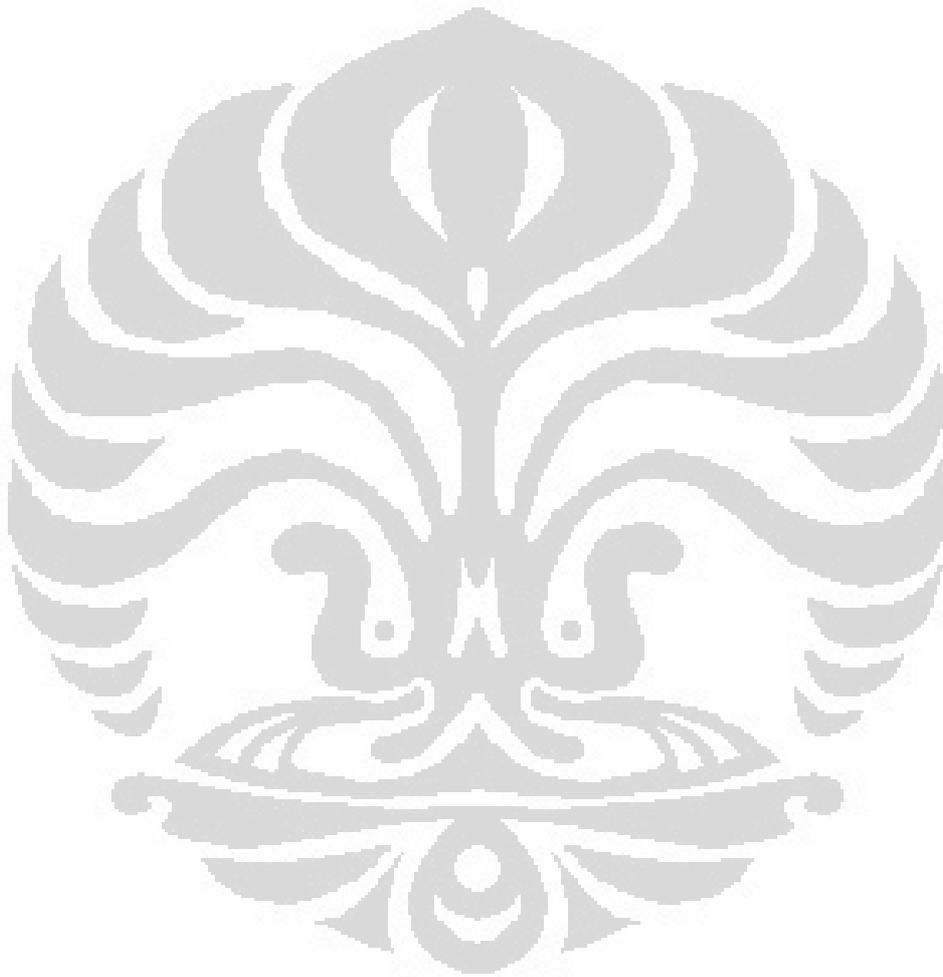
DAFTAR SINGKATAN

ADB	<i>Asian Development Bank</i>
ASEAN	<i>Association of South East Asian Nations</i>
BBS	<i>Bangladesh Bureau Statistic</i>
BGMEA	<i>Bangladesh Garment Manufacture & Exporter Association</i>
BJP	<i>Bharatiya Janata Party</i>
EBA	<i>Everything but Arm Arrangement</i>
EU	<i>European Union</i>
FDI	<i>Foreign Direct Investment</i>
FY	<i>Fiscal Year</i>
FYP	<i>Five Year Plan</i>
GAN	<i>Garment Association of Nepal</i>
IMF	<i>International Monetary Fund</i>
LDCs	<i>Least Developed Countries</i>
LTTE	<i>Liberation Tigers of Tamil Eelam</i>
MDP	<i>Maldivian Democratic Party</i>
MFA	<i>Multifibre Arrangement</i>
MFN	<i>Most Favored Nation</i>
MNCs	<i>Multinational Corporations</i>
NAFTA	<i>North American Free Trade Agreement</i>
RMG	<i>Ready-Made Garment</i>
SAARC	<i>South Asian Arrangement of Regional Cooperation</i>
SAPTA	<i>SAARC Preferential Trade Agreements</i>
SAFTA	<i>South Asian Free Trade Agreement</i>
T&C	<i>Textile and Clothing</i>
WTO	<i>World Trade Organization</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Isi Kesepakatan SAPTA tahun 1993

Lampiran II. Isi Kesepakatan SAFTA tahun 2004



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan Asia merupakan salah satu kawasan yang kemajuan tingkat ekonomi negara-negara di dalamnya menjadi sorotan dunia sejak tahun 1990-an. Ada beberapa negara yang muncul menjadi macan Asia, seperti Jepang, China, Korea Selatan, Singapura, Taiwan, India, bahkan Indonesia. Negara-negara tersebut berasal dari regional Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara yang di dalamnya terdapat masing-masing organisasi regional. Namun demikian, tidak dapat disangkal bahwa kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara menjadi kawasan yang paling maju dalam hal pertumbuhan ekonomi, terlihat dari total GDP, GNP, dan tingkat perdagangan intra-kawasannya ditambah dengan diadakannya liberalisasi perdagangan dalam kawasan tersebut. Sebaliknya, kemajuan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Selatan dan Asia Tengah cenderung tidak terlihat, walaupun ada organisasi yang ditujukan untuk memperkuat kerjasama ekonomi.

Penelitian mengenai negosiasi melalui kerjasama kawasan (regional)¹ menjadi suatu hal yang penting, khususnya mengenai regionalisme ekonomi. Usaha liberalisasi regional untuk meningkatkan kesaling-tergantungan, antara negara dalam satu kawasan, banyak berlangsung pada tahun 1990-an seperti halnya pembentukan kawasan perdagangan bebas NAFTA di Amerika Utara, AFTA di Asia Tenggara, SAFTA di Asia Selatan, dan kerjasama lainnya. Organisasi ini berfungsi sebagai sarana untuk mengartikulasikan kepentingan

¹ Edward D. Mansfield dan Helen V. Milner (editor), *The Political Economy of Regionalism*, (New York: Columbia University Press, 1997), hal.3-4. Definisi regional/ kawasan merujuk kepada kedekatan wilayah secara geografis. Namun demikian, dalam perdebatannya ada dua argumen mengenai makna regionalisme, yaitu kerjasama dalam satu geografis atau bukan dalam wilayah geografis yang sama. Pendapat pertama menyatakan kerjasama regional merupakan hasil dari pilihan kebijakan oleh pemerintah untuk meningkatkan arus aktivitas ekonomi dan politik di antara negara dalam wilayah geografis yang berdekatan. Menurut mereka, sumber regionalisme ada dua, yaitu karena faktor-faktor alam (SDA) dan atas kebijakan pemerintah. Pendapat kedua menyatakan bahwa aktornya bisa pemerintah/non-pemerintah, ditambah negara-negara itu tidak berada dalam geografis yang sama; mereka dipersatukan karena kesamaan mata uang dalam satu kawasan atau kesamaan identitas sosial.

nasional negara anggotanya, seperti kesejahteraan bagi anggota-anggotanya karena melalui kesepakatan perdagangan bebas tersebut membuat negara-negara kecil berusaha untuk mem-spesialisasikan produk di negaranya sehingga ia mampu bersaing dengan negara lain di kawasan itu. Menurut Porter, perdagangan internasional dan investasi asing dapat memicu suatu negara untuk meningkatkan tingkat produktivitas perekonomiannya dengan cara menspesialisasikan industri-industri perusahaan domestik yang cukup produktif dan mengekspor produknya serta mengimpor barang dan jasa yang kurang produktif untuk diproduksi², terutama melalui perdagangan intra-kawasan. Keuntungannya adalah efisiensi biaya, kualitas produk yang diinginkan, dan efisiensi waktu. Kenyataan yang terdapat di Asia Selatan adalah kurang terlihat signifikansi kenaikan persentase rasio perdagangan intra-kawasan dengan perdagangan ke dunia melalui beberapa usaha kerjasama ekonomi, politik, kemananan, dan bidang lainnya melalui organisasi SAARC (South Asian Arrangement of Regional Cooperation) yang didirikan pada tahun 1985, terutama di bidang ekonomi dibandingkan dengan beberapa kawasan lainnya. Anggota dari SAARC adalah India, Pakistan, Sri Lanka, Bhutan, Bangladesh, Nepal, Maladewa, dan Afghanistan.

Adapun beberapa faktor penghambat perdagangan di kawasan Asia Selatan, adalah³: Dari sisi faktor ekonomi, yaitu masih terdapat hambatan-hambatan di lingkungan struktural yang membatasi peningkatan perdagangan intrakawasan, kesepakatan tarif dalam SAPTA hanya dikenakan pada barang-barang yang kurang diminati oleh para negara anggota SAARC sehingga tidak terjadi titik temu antara permintaan dan penawaran barang dan jasa, ketatnya aturan dasar SAPTA sehingga mencegah negara-negara anggota SAARC untuk mengambil keuntungan dari kesepakatan tarif yang ditawarkan dalam rejim itu, serta kesamaan jenis produk (kebanyakan produk pertanian) di antara mereka dan rendahnya tingkat penguasaan teknologi. Di bawah ini adalah tabel perbandingan nilai perdagangan SAARC, ASEAN, NAFTA, dan UE.

² Michael Porter, *The Competitive Advantage of Nations*, (New York: Collier MacMillan Canada Inc, 1990), hal.7.

³ Farooq Sobhan dan Riffat Zaman, *Trade Investment in South Asia, di dalam South Asia in the World: Problem Solving Perspective on Security, Sustainable Development, and Good Governance*, Edited by Ramesh Thakur dan Oddny Wiggen. (Tokyo: United Nations University Press, 2004), hal.147.

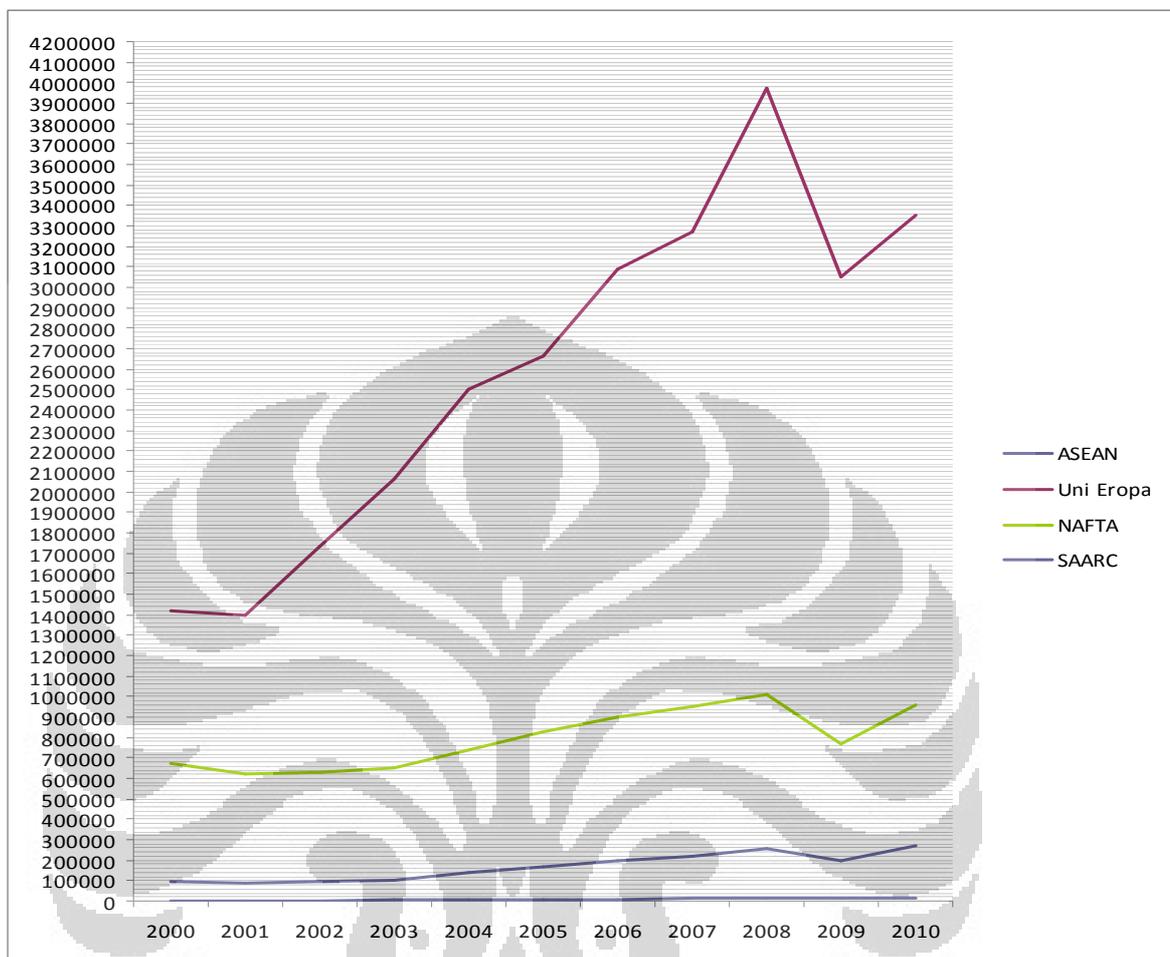
Tabel 1.1 Perbandingan Nilai Ekspor ASEAN, UE, NAFTA, dan SAARC (juta dolar AS)

Regional	Domain	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
ASEAN	Intra-regional	97702	88559	91765	102281	141934	165064	194321	216424	255467	198906	267974
	Dunia	431900,7	387571	407895,1	469501,6	569177,4	652723,1	770676,8	865713,7	998757,9	813625,5	1052110
	Persentase intraregional	22,62141	22,8497	22,49721	21,78502	24,93669	25,28852	25,21433	24,99949	25,57847	24,44688	25,47015
UNI EROPA	Intra-regional	1418149	1400846	1732227	2063450	2499933	2666398	3087605	3268678	3972306	3054707	3351711
	Dunia	2447635	2469163	2627409	3143352	3755703	4064021	4588691	5339902	5898587	4576065	5149361
	Persentase intraregional	57,93956	56,7336	65,9291	65,64489	66,56365	65,60984	67,28728	61,21232	67,34334	66,75401	65,08984
NAFTA	Intra-regional	676441	624252	626985	651213	737591	824550	902086	951550	1013258	768771	955597
	Dunia	1224903	1147496	1106178	1162991	1312132	1480479	1678242	1851689	2045099	1602476	1961744
	Persentase intraregional	55,22405	54,4012	56,6803	55,99467	56,21317	55,69481	53,75184	51,38822	49,54567	47,97394	48,71161
SAARC	Intra-regional	2798	3188	2998	3869	5706	7062	9109	12673	15077	11584	16175
	Dunia	64379,51	64516,5	72046,58	84099,05	105530,3	132981,2	159309	190249,1	240699,6	206492,6	272424,9
	Persentase intraregional	4,346103	4,94137	4,161197	4,600528	5,406978	5,310524	5,717818	6,661267	6,263824	5,609886	5,937415

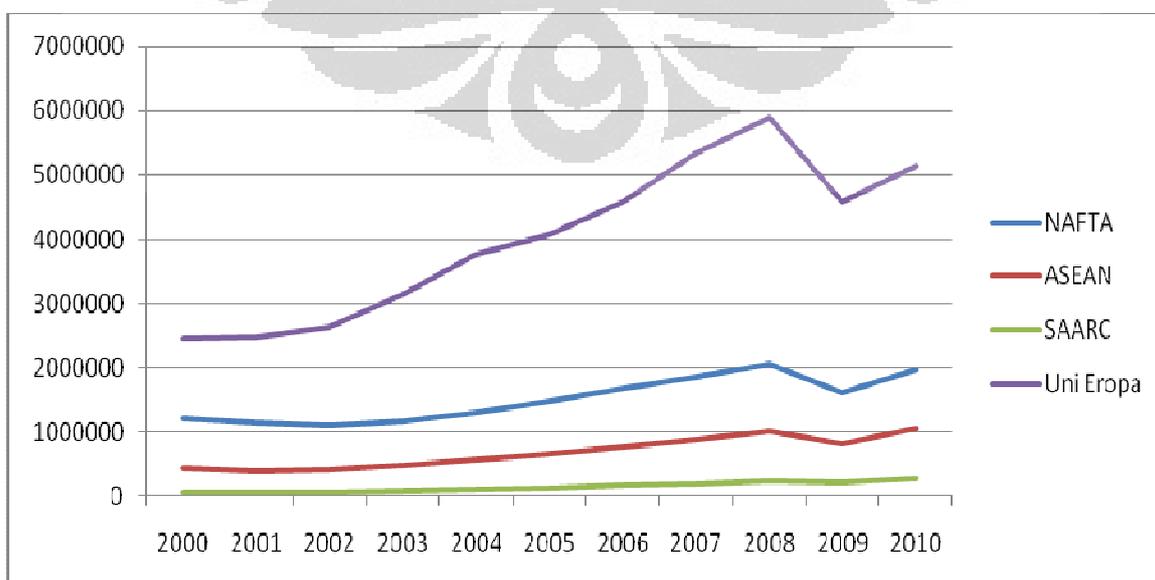
Sumber: Hasil perhitungan dan kompilasi penulis berdasarkan data statistik perdagangan UNCTAD *Handbook of Statistic and Trade and Development Report* tahun 2000-2011

Jika dibuat di dalam grafik, maka hasilnya menjadi seperti yang terlampir di bawah ini (dalam juta dolar AS):

Grafik 1.1 Total Nilai Ekspor intra-kawasan ASEAN, UE, NAFTA, dan SAARC



Grafik 1.2 Total Nilai Ekspor ASEAN, UE, NAFTA, dan SAARC ke Dunia



Berdasarkan tabel dan grafik perbandingan di atas setidaknya ada dua kesenjangan tinggi antara nilai dan persentase perdagangan kawasan Asia Selatan (SAARC) dengan kawasan Uni Eropa, Asia Tenggara, dan Amerika Utara, yaitu : Pertama, rendahnya produktivitas produksi barang ekspor Asia Selatan (mungkin karena orientasi produksinya untuk dipakai di dalam negeri, bukan diekspor) sehingga nilai total perdagangan Asia Selatan memiliki nilai terendah yaitu 64379,51 juta dolar AS pada tahun 2000 menjadi 272424,9 juta dolar AS pada tahun 2010 dibandingkan dengan ASEAN yang nilai perdagangannya tahun 2000 adalah 431900,7 juta dolar AS menjadi 1052110 juta dolar AS pada tahun 2010, nilai perdagangan Uni Eropa tahun 2000 sebesar 2447635 dolar AS menjadi 5149361 juta dolar AS, dan nilai total ekspor NAFTA sebesar 1224903 juta dolar AS pada tahun 2000 menjadi 1961744 juta dolar AS pada tahun 2010. Kedua, persentase perbandingan nilai perdagangan intra-kawasan Asia Selatan adalah yang terendah dibanding dengan tiga kawasan lainnya dalam 10 tahun, padahal sudah ada FTA, yaitu hanya berkisar 4 - 6,6%. Tabel di bawah ini adalah perbandingan antara perdagangan intra-SAARC dan ke dunia sejak tahun 1980.

Tabel 1.2 Perdagangan intra-kawasan SAARC (dalam juta US\$)⁴

Tahun	Perdagangan intra-SAARC	Perdagangan SAARC dgn dunia	Persentase
Periode sebelum SAPTA			
1980	1.210	37.885	3,2
1986	1.055	44.042	2,4
1987	1.146	49.480	2,3
1988	1.732	52.669	3,3
1989	1.723	58.595	2,9
1990	1.590	65.490	2,4
1991	1.914	63.435	3,0
1992	2.488	71.149	3,5
1993	2.458	72.211	3,4
Periode setelah SAPTA			
1994	2.937	82.839	3,5
1995	4.263	103.878	4,1
1996	4.928	110.962	4,4
1997	4.447	115.370	3,9
1998	6.001	123.144	4,9
1999	5.511	131.152	4,2

⁴ *Ibid*, hal.93

Sumber: IMF (1997, 2002, dan berbagai tahun terbitan)

Jika dibandingkan dengan tabel 1.2 di atas, maka didapati kesimpulan bahwa sejak berdirinya SAARC (1985), nilai perdagangan intra-kawasan Asia Selatan tetap rendah (antara 2 %-5%) dibandingkan dengan total nilai perdagangannya ke seluruh dunia. Kerjasama regional seharusnya menunjukkan peningkatan nilai perdagangan dengan berbagai kesepakatan yang sudah disetujui, antarlain kebijakan perdagangan *preferential trade* tahun 1996 dan kesepakatan perdagangan bebas mulai tahun 2006. Logikanya kalau teknis perdagangan sudah dipermudah, dimana hambatan tarif dan non-tarif dikurangi sampai dengan 0-5% melalui mekanisme kesepakatan perdagangan bebas, maka akan menaikkan nilai perdagangan di kawasan tersebut secara signifikan. Lagipula, dari tabel 1.1 di atas terlihat jelas bahwa nilai perdagangan negara-negara di Asia Selatan tergolong cukup tinggi ke luar wilayah itu. Berarti ada masalah dengan perdagangan intra kawasan Asia Selatan, baik dari faktor internal atau pengaruh eksternal serta faktor ekonomi dan faktor non ekonomi.

Dapat disimpulkan, alasan besar dari sisi ekonomi mengapa tidak terjadi kenaikan volume perdagangan intra-kawasan Asia Selatan adalah ketiadaan produk kompetitif (berdaya saing tinggi) dari semua negara di Asia Selatan. Hal ini dilatabelakangi oleh kurangnya produktivitas domestik, terutama negara seperti Bhutan, dan Maldivies. Produk utama di kawasan itu adalah industri tekstil dan pakaian (T&C) oleh India, Sri Lanka, Bangladesh, dan Pakistan. Terlebih lagi, India menjadi produsen produk pakaian yang paling kompetitif sehingga banyak negara Asia Selatan yang enggan untuk berdagang dengan India karena akan mengalami *trade imbalance* dalam neraca perdagangannya. Usaha kerjasama regional, melalui integrasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan untuk menghasilkan spesialisasi produksi seperti argumen kaum liberal telah dilaksanakan. SAPTA (South Asian Preferential Trade Agreement) telah beroperasi secara sah pada bulan Desember 1995, namun signifikansi dari kesepakatan itu belum terlihat dalam perubahan positif neraca (nilai volume) perdagangan kawasannya. Para pemimpin negara anggota SAARC juga telah setuju untuk mempercepat perdagangan bebas dengan menyepakati mekanisme

SAFTA (SAARC Free Trade Agreement) yang mulai beroperasi tahun 2006. Isinya adalah hambatan tarif barang dari semua negara anggota SAARC akan dihapuskan sampai batas waktu 10 tahun. Selain itu, para akademisi juga menyarankan agar SAARC meningkatkan kerjasama bilateral dengan kerangka regional terhadap komoditas-komoditas yang terpilih lalu meningkatkan sistem ke seluruh kawasan. Serta menarik dana asing dan investasi luar untuk mendorong produksi dalam negara-negara tiap-tiap anggota SAARC sehingga perdagangan intra kawasan akan meningkat. Contoh bantuan dana adalah dari IMF, WTO, dan lembaga lainnya.

Selain dari faktor ekonomi, ada juga faktor penghambat non-ekonomi, seperti hubungan yang kurang harmonis antara India dan Pakistan; sering terjadi konflik (terbuka dan laten) di antara negara-negara itu, kekurangsiapan (kurang matangnya) pemerintah di Asia Selatan, kondisi masyarakat, dan kondisi geografi (prasarana dan sarana, seperti infrastruktur) yang belum mendukung untuk memaksimalkan perdagangan di regional Asia selatan.⁵

Usaha dari liberalisasi regional untuk merangsang perdagangan antar negara dalam satu kawasan biasanya dilakukan dengan dengan cara memakai instrumen-instrumen kebijakan perdagangan, seperti menurunkan tarif, termasuk tarif bukan hambatan (non-tariff barriers), mengurangi tingkat intervensi negara terhadap aktivitas ekonomi, perilaku terhadap penanam modal asing, serta mengurangi tingkat kekerasan di wilayah tersebut. Secara teoritis, tarif dimaknai sebagai sebuah pajak yang dikenakan pada barang/ jasa impor dan ekspor. Bentuk dari pengenaan tarif ini ada dua, yaitu *specific tariff* seperti pajak tetap dan *ad valorem tariffs* seperti pajak proporsional. Dengan menurunkan salah satu kebijakan perdagangan, seperti tarif, diharapkan dapat meningkatkan nilai perdagangan. Walaupun pengurangan tarif sudah dilakukan, namun tetap saja nilai perdagangan kawasan Asia selatan lebih rendah dari banyak kerjasama regional lainnya sampai dengan tahun 2010 jika dibandingkan dengan ASEAN, NAFTA, apalagi dengan Uni Eropa.

⁵ Farooq Sobhan dan Riffat Zaman, *Op.Cit*, hal.137

Dengan melihat fakta di atas, bisa dikatakan bahwa korelasi statistik antara tingkat keterbukaan perdagangan (melalui perdagangan bebas) dengan pertumbuhan ekonomi tidak dapat ditafsirkan secara logis sebagai suatu temuan bahwa perdagangan lebih terbuka menyebabkan pertumbuhan lebih cepat. Nampaknya yang terjadi adalah hubungan kausalitas bertentangan dengan asumsi liberal (neoliberal). Di bawah skenario hubungan kausalitas terbalik, pertumbuhan lebih cepat dan peningkatan produktivitas memungkinkan negara untuk membuka pintu perdagangan lebih cepat. Ini karena pertumbuhan produktivitas yang dialami negara yang tumbuh dengan cepat membolehkannya untuk sukses bersaing dengan negara lebih maju, sehingga mengurangi kebutuhan proteksi industri baru.⁶

1.2 Rumusan Permasalahan

Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk menjelaskan mengapa sebagian besar negara anggota SAARC tidak memiliki produk kompetitif untuk dipersaingkan dan menghasilkan keuntungan melalui perdagangan internasional, terutama dalam di kawasan Asia Selatan berdasarkan teori keuntungan kompetitif bangsa Porter.

Oleh karena itu, yang menjadi rumusan permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis adalah *“Mengapa integrasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan regional Asia Selatan melalui mekanisme SAPTA dan SAFTA kurang berhasil meningkatkan persentase perdagangan intra-kawasan tersebut secara signifikan jika dibandingkan dengan kawasan ASEAN, NAFTA, dan Uni Eropa selama tahun 2000-2010?”*

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

- Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

Pertama, mengamati dan menjelaskan tentang berbagai proses kerjasama ekonomi di Asia Selatan dan dampaknya bagi perekonomian tiap-tiap anggota SAARC.

⁶ Ha-Joon Chang & Ilene Grabel, *Membongkar Mitos Neolib: Upaya Merebut Kembali Makna Pembangunan* (terjemahan), (Yogyakarta: INSISTPress,2008), hal.62.

Kedua, menganalisis kekompetitifan tiap-tiap produk unggulan negara, dengan melihat peran pemerintah dan swasta masing-masing negara kawasan di Asia Selatan, yang akhirnya dapat menguntungkan negaranya secara ekonomis dan mendorong naiknya tingkat volume perdagangan di kawasan itu.

Ketiga, menguji dampak positif dari penggunaan teori keuntungan kompetitif bangsa Porter yang dapat menguntungkan tiap-tiap negara di kawasan Asia Selatan anggota SAARC.

- Signifikansi dari penelitian ini adalah:

Pertama, menambah khazanah penelitian tentang Asia Selatan dengan data sampai pada tahun 2010 dan menjadikannya pembelajaran bagi pengembangan teori perdagangan internasional .

Kedua, memberikan manfaat sebagai *lesson learning* terhadap kawasan lain tentang bagaimana seharusnya perdagangan intra-kawasan dapat sama-sama menguntungkan tiap anggotanya, khususnya bagi Indonesia agar dapat bersaing secara kompetitif dalam *ASEAN Free Trade Area*, dimana daya saing produk Indonesia sangat jauh dibanding Malaysia dan Thailand.

1.4 Tinjauan Pustaka

Beberapa literatur yang sudah pernah membahas tentang perdagangan preferensial dan perdagangan bebas di Asia Selatan, termasuk tingkat kekompetitifan produk tujuh negara (India, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, dan Maladewa) di dalamnya.

1.4.1 Keuntungan dari Liberalisasi Perdagangan Regional Asia Selatan: Studi Kasus SAPTA (South Asia of Preferential Trading Aggrement) dan SAFTA (South Asia on Free Trade Agreements) antara tahun 2003-2009

Ali dan Talukder berusaha untuk menganalisis beberapa prospek dan tantangan dari liberalisasi perdagangan preferensial dan integrasi kawasan Asia Selatan diperoleh dari analisis struktur-struktur perdagangan internasional dan regional melalui ukuran perdagangan konvensional, seperti komposisi komoditas, arah

perdagangan, dan perdagangan bilateral. Alasan mengapa mereka ingin menguji hal itu adalah dengan melihat latarbelakang perolehan hasil yang tidak signifikan sejak berdirinya SAARC dan nilai perdagangan intra-kawasan yang sangat rendah. Dengan kenyataan rendahnya tingkat perdagangan intra-kawasan dan tingkat daya saing yang dirasakan, maka mereka memepertanyakan apakah regionalisme akan menguntungkan negara-negara di kawasan itu (ada tujuh negara yang menjadi sampel dan tidak mengikutsertakan Afghanistan karena belum ada signifikansi dari peran negara itu sebagai anggota SAARC).⁷

Penemuan-penemuan mengindikasikan bahwa dengan rendahnya tingkat *share* perdagangan bilateral dan intra-kawasan antara negara-negara Asia Selatan, pendapatan dari FTAs (free trade arrangements) di kawasan tersebut kemungkinan besar sangatlah kecil. Pada dasarnya, sesama negara-negara Asia Selatan bukanlah mitra dagang yang alami. Dengan didorong oleh keinginan terhadap pembangunan yang digerakkan oleh ekspor, mereka mulai meningkatkan ekspor mereka terhadap negara-negara industrialis, berpindah dari ekspor barang agrikultur dasar kepada ekspor barang manufaktur yang padat karya. Bahan tujuan utama dari barang-barang ekspor mereka bukanlah dengan negara-negara Asia, melainkan dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat. Kecuali Nepal yang mitra dagang terbesarnya adalah India, dimana 50% barang-barang ekspor dan impornya hanya berasal dari India. Kecuali India dan Nepal, semua negara-negara di Asia Selatan tidak banyak melakukan perdagangan intra-kawasan. Selain itu didapati bahwa tingkat komplementer barang-barang produksi negara di kawasan Asia Selatan sangatlah kecil. Kalaupun produk mereka berkompetisi di pasar intra-kawasan, cakupannya pun sangat sempit. Selain itu ditemukan bahwa di dalam perdagangan intra-kawasan Asia Selatan, intensitas perdagangan India dengan Asia Selatan menjadi lebih tinggi tahun 1995 dari tahun 1985 karena adanya peningkatan nilai tukar perdagangannya akibat dari reformasi perdagangan yang berimplikasi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Laporan perdagangan kawasan itu adalah terdapat ketidaksignifikanan pembagian yang

⁷ Ershad Ali dan Dayal K Talukder, *Preferential Trading among SAARC Countries: Prospects and Challenges of Regional Integration in South Asia*, diakses dari [www.joaag.com/uploads/5 / 4 1](http://www.joaag.com/uploads/5/4/1) AliFinal pada tanggal 14 Maret 2012 pukul 13.02 WIB.

sangat mungkin menghasilkan diversi perdagangan (trade diversion) daripada penciptaan perdagangan (trade creation) dan yang berujung pada keuntungan besar yang didapatkan oleh negara besar dan sedikit keuntungan bagi-bagi negara kecil. Lebih jauh lagi, kebijakan-kebijakan perdagangan negara-negara secara individu dibentuk dari pertimbangan-pertimbangan politik daripada faktor ekonomi. Oleh karena itu, pengejawantahan dari daerah perdagangan bebas dan keuntungan yang dibawanya adalah sebuah tantangan. Mereka menyarankan agar nilai tukar perdagangan produk di kawasan Asia Selatan ditingkatkan sehingga ada keuntungan yang bisa diperoleh untuk mengimbangi kerugian dagang mereka dengan negara-negara besar di luar kawasannya.⁸

Kritik terhadap bahan ini adalah penulis tidak memaparkan apa saja kebijakan-kebijakan perdagangan internasional tiap negara anggota SAARC yang tidak membuat nilai perdagangan intra-kawasan Asia Selatan naik. Selain itu, tahun penelitian yang hanya sampai tahun 2009. Walaupun memang penulis sangat setuju bahwa salah satu penyebab rendahnya nilai perdagangan intra-kawasan di sana adalah rendahnya pertukaran komplementer produk eksportnya.

Dalam artikelnya mengenai analisis masa depan SAFTA, Weerakoon membahas mengenai berbagai kesepakatan kerjasama perdagangan, seperti perdagangan bilateral dan multilateral (SAPTA dan SAFTA) di Asia Selatan. Hal mendasar yang didiskusikan oleh penulis adalah menjabarkan tentang beberapa negosiasi SAPTA, data perdagangan antar negara di Asia Selatan (yang dibagi menjadi negara kecil/LDCs dan non-LDCs) tahun 1998, yang dihubungkan dengan ekspektasi keberhasilan SAFTA sebagai kerjasama ekonomi. Negara-negara di Asia Selatan cenderung bersifat pasif dalam melaksanakan berbagai kesepakatan perdagangan regionalnya. Menurut Weerakoon, proses kerjasama ekonomi perdagangan bebas di Asia Selatan, yaitu SAFTA, tidak akan berhasil dengan baik apabila masih kuatnya kerjasama perdagangan bilateral dan ketegangan politik di antara negara anggota SAARC karena akan mengikis kekuatan SAFTA nantinya. Ia juga mempertanyakan apakah negara-negara di Asia Selatan memiliki tujuan murni untuk mengejar liberalisasi perdagangan

⁸ Ershad Ali dan Dayal K Talukder, *Op.Cit.*

regional atau semata-mata hanya memanfaatkan SAFTA untuk meredakan ketegangan politik di kawasan itu, terutama antara India dan Pakistan. Untuk itu, India, sebagai kekuatan dominan, juga diperlukan untuk mengakomodir ketegangan di sana. Jika India masih bersifat reluktan (tidak ingin) mengambil peran aktif, akan timbul gerakan anti-militer India di Pakistan, seperti terjadi tes kekuatan nuklir pada tahun 1998. Namun di sisi lain, hal yang ditakutkan adalah jika India terlalu dominan dalam mengakomodir kepentingannya, akan mengaburkan identitas politik dan strategi Pakistan.⁹

Selain itu, perdagangan bebas secara bilateral di Asia selatan juga akan mengikis keberadaan perjanjian dagang regional. Contohnya Sri Lanka akan mendukung SAFTA hanya karena menginginkan kemudahan masuk ke pasar India (dalam perjanjian India-Lanka FTA). Sehingga patut dipertanyakan, apakah perdagangan bebas secara bilateral ini diperlakukan sama seperti SAFTA. Atau lebih lanjut apakah perjanjian itu akan bekerjasama dalam satu kerangka kerjasama regional atau tidak. Jika ya, maka perjanjian itu harus dipergunakan sebagai *starting point* yang melaluinya negosiasi dimulai. Atau jika tidak, kesepakatan bilateral ini akan menjadi paralel seperti kesepakatan dagang lainnya. Hal ini dapat memarjinalisasikan SAFTA sebagai kesepakatan dagang regional karena tiap-tiap negara anggotanya akan memilih berdagang secara bilateral dengan anggota lain, bahkan negara negara di luar kawasan ini.¹⁰

Penulis setuju bahwa perdagangan bebas bilateral dan ketegangan politik mengikis aktivitas perdagangan regional di kawasan Asia Selatan. Namun kritiknya, adalah Weeraloon tidak menganalisis manfaat positif dari perdagangan bilateral serta ketiadaan saran praktis untuk meredakan ketegangan politiknya. Weeraloon juga berusaha untuk memaparkan tentang berbagai kemungkinan dan hambatan kerjasama ekonomi SAARC di Asia Selatan dalam satu bab buku. Pada bagian ini difokuskan terhadap pengujian apakah kerjasama ekonomi regional, yang dibatasi oleh faktor politik, memiliki masa depan pada Asia Selatan dalam konteks perubahan lingkungan ekonomi global secara pesat. Weeraloon

⁹ Dushni Weeraloon, "Does SAFTA Have any Future?", diakses dari <http://www.jstor.org/stable/4411017>, *Economic and Political Weekly*, vol. 36, no.34 (Agustus, 25-31)

¹⁰ Weerakoon, *Loc.Cit.*

membahas secara khusus beberapa pandangan ahli yang memprediksikan tentang keberadaan SAARC di masa depan melalui kerjasama integrasi ekonomi di kawasan Asia Selatan, seperti SAPTA dan SAFTA. Ada yang menyatakan bahwa beberapa negara lebih diuntungkan dengan liberalisasi preferensial daripada lewat liberalisasi unilateral. Sebaliknya India, mengalami kebalikannya. Pendapat lain di dalam bab itu menyatakan bahwa inisiatif integrasi perdagangan regional di Asia Selatan akan menghasilkan kerugian kesejahteraan dan perlambatan liberalisasi unilateral. Fakta yang dibahas juga adalah perubahan dalam keterbukaan ekonomi melalui liberalisasi kebijakan negara-negara di Asia Selatan sejak tahun 1970-an dengan indikator penurunan terhadap hambatan tarif, hambatan non-tarif, intervensi pemerintah, kekerasan, dan perilaku terhadap investor asing di negaranya. Ada dua hal yang disimpulkannya mengenai liberalisasi kebijakan, yaitu: pertama, liberalisasi kebijakan perdagangan melalui sebuah daerah perdagangan bebas tidak serta-merta menaikkan nilai perdagangan antara negara anggota SAARC, ada faktor selain kurangnya komitmen pemerintah negara di Asia Selatan untuk membuka pasar mereka terhadap satu sama lain. Faktor lain tersebut adalah perbedaan politik dimana tidak ada itikad/ keinginan politik yang baik di antara negara anggota SAARC. Sampai dengan tahun 2004, nilai perdagangan intra-SAARC hanya mencapai 11,342 miliar dollar AS, yaitu hanya 4,8% dari total nilai perdagangan negara-negara anggota SAARC dengan dunia. Kedua, didapati bahwa India menghasilkan surplus perdagangan terhadap semua negara di kawasan itu dan juga memiliki perdagangan informal yang signifikan terhadap Pakistan dan Bangladesh, yang difasilitasi oleh negara-negara pihak ketiga yang melalui daerahnya barang-barang India diselundupkan. Tantangan perdagangan di kawasan Asia selatan juga disebabkan oleh ketidak-seimbangan perdagangan antara negara SAARC, serta kondisi keamanan dan perdamaian yang tidak kondusif terutama karena konflik India-Pakistan. Sehingga perlu untuk tidak selalu melekatkan isu perdamaian Kashmir dengan isu promosi perdagangan.¹¹

¹¹ *Regional Economic Cooperation Under SAARC: Possibilities and Constraints* oleh Dushni Weeraloon dan *South Asia at A Glance: A Taxonomy of Growth Challenges* dalam Anjum Siddiqui (editor), 2007. *India and South Asia: Economic Development in the Age of Globalization*. New York: M.E Sharpe, Inc.

Pada bahan pertama, Sabhan dan Zaman membahas perdagangan, investasi, kebijakan ekspor-impor, bantuan asing, FDI, dan SAPTA-SAFTA. Mereka menyatakan bahwa negara-negara di Asia Selatan hanya mendapatkan akses kecil terhadap bantuan dana asing untuk sumber pendanaan ekonomi mereka, sedikit pula jumlah FDI (Investasi Langsung Asing) yang masuk ke sana. Hal ini perlu untuk diteliti karena ada hubungan antara perdagangan dan investasi ke Asia Selatan. Pada tahun 1999, jumlah FDI yang masuk ke Asia Selatan adalah 3,070 miliar dollar AS: 179 juta dollar AS ke Bangladesh, sebesar 2,169 miliar dollar AS ke India, sebesar 4 juta dollar AS ke Nepal, ke Pakistan sebesar 530 juta dollar AS, sebesar 177 juta dollar AS ke Sri Lanka, dan sebesar 7 juta dollar AS ke Maladewa. Selain itu, peneliti juga menjabarkan tentang kebijakan ekspor-impor 5 negara di Asia Selatan. SAARC juga dinilai gagal untuk mengembangkan daerah ekonomi inti, seperti perdagangan, investasi, dan teknologi dengan semangat yang konsisten dan strategi-strategi regional. Untuk itu, Sabhan dan Zaman berusaha untuk menyarankan kebijakan yang akan berefek dengan cepat. Mereka berpendapat perlunya institusi *think-tank* yang bisa memberikan masukan bagi para pembuat keputusan di kawasan itu. Mereka menemukan fakta bahwa dulunya negara-negara di Asia selatan banyak mengejar kebijakan yang berdasarkan industrialisasi substitusi impor untuk mengurangi penyimpangan anti-ekspor. Sebagian besar negara di kawasan Asia Selatan sudah mereformasi sistem pengaturan (rejim) investasinya untuk meningkatkan arus masuk dengan mengurangi hambatan-hambatan kepemilikan asing dan pemerataan domestik dan keperluan hak paten, serta memperkenalkan insentif fiskal dan keuangan. Setelah tahun 1990-an, arus masuk FDI meningkat ke negara-negara Asia Selatan.¹²

Bahan berikutnya berjudul *Regional Trade Agreements (RTAs) in South Asia: Trade and conflict linkages*, berusaha untuk menjawab dua pertanyaan: apakah RTAs mempromosikan perdagangan serta apakah perdagangan mengurangi konflik. Hasilnya menyatakan bahwa memang RTAs membuat negara-negara anggota SAARC untuk mau saling berdagang, tetapi hasilnya sangat kecil

¹² Farooq Sobhan dan Riffat Zaman, *Trade Investment in South Asia*, dalam *South Asia in the World: Problem Solving Perspective on Security, Sustainable Development, and Good Governance*, Ramesh Thakur dan Oddny Wiggen (editor), (Tokyo: United Nations University Press, 2004). hal.145-169.

dibandingkan dengan kawasan lain dan dibanding perdagangan intra-kawasannya dengan total perdagangannya dengan dunia. Memang, perdagangan membutuhkan aspek kestabilan politik-keamanan antara negara, namun banyaknya gejolak konflik di kawasan tersebut antara tahun 1985-2004 (India-Pakistan, India-Bangladesh, India-Sri Lanka) serta timbulnya kesepakatan perdagangan bebas bilateral mengikis keberadaan perjanjian multilateral, melalui SAPTA dan SAFTA. Kurangnya kepercayaan di antara negara SAARC tersebut, termasuk ketakutan negara-negara kecil akan besarnya dominasi India serta ketakutan India akan bergabungnya negara-negara kecil untuk melawannya akan berbahaya terhadap integrasi mereka. Sehingga ada dua poin kesimpulan, yaitu insiden intra dan antar negara di Asia selatan tidak menghasilkan tanda-tanda akan berkurang serta RTAs tidak dirancang untuk mengurangi konflik di antara mereka.¹³

1.4.2 Tingkat Daya Saing Produk Negara-negara anggota SAARC

Bahan ini membahas tentang Hubungan Bisnis Internasional antara India dan negara-negara tetangganya di Asia Selatan terkait dengan Ekspor barang-barang industri. Latar belakang Abu Hena Reza Hasan adalah dengan melihat pertumbuhan ekonomi India yang lebih cepat di kawasan Asia Selatan telah membuat menjadi negara ekonomi besar di dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, ia mencoba untuk menganalisis hubungan perdagangan India dengan negara-negara di Asia Selatan indeks spesialisasi, indeks kompetisi, indeks perdagangan komparatif yang dinyatakan dan elastisitas menyilang. Empat alat analisis ini diterapkan dalam pendekatan yang holistik untuk menganalisis dinamika di dalam skenario bisnis internasional terhadap ekspor barang manufaktur di antara India, Bangladesh, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Alasan mengapa tiga negara lain tidak diikutsertakan dalam penelitiannya adalah karena ketidakcukupan data dari sumber-sumber sekunder. Analisis ini juga menggunakan Indeks Herfindahl (HI), indeks kompetisi perdagangan, indeks perdagangan komparatif yang dinyatakan (RCA). Di dalam penelitiannya, Hasan melihat bahwa kesuksesan India dalam barang manufaktur ekspornya menjadi

¹³ Shaheen Rafi Khan, Moeed Yousaf, Faisal Haq Shaheen, and Azka Tanveer, *Regional Trade Agreements of South Asia: Trade and Conflict linkages*, diakses dari http://web.idrc.ca/ghri/ev-132669-201-1-DO_TOPIC.html pada tanggal 18 Januari 2012 pada pukul 12.07 WIB.

ancaman serta kesempatan bagi negara-negara tetangganya. Ia menggunakan data-data dari PBB, Bank Dunia, serta lembaga-lembaga lainnya. Hasil yang diperolehnya adalah bahwa tidak terjadi konflik bisnis yang hebat antara India dengan Pakistan, Nepal, dan Sri Lanka. Sepanjang tahun 1980-2009, semua negara tetangga India di Asia Selatan melakukan perlawanan dagangan komparatif dengan India. Kompetisi di antara India dengan negara-negara di kawasan itu mengalami penurunan secara bertahap yang mungkin terjadi karena diversifikasi dari barang ekspor manufaktur yang diperoleh negara. Terjadi kompetisi yang cukup ketat antara Sri Lanka dengan India terhadap barang-barang manufaktur. Sebaliknya, Bangladesh menghadapi kompetisi yang ketat dengan India. Kecuali tahun 2009, kompetisi perdagangan antara Bangladesh dan India menjadi lebih tinggi. Dari indeks spesialisasi Herfindahl terhadap barang-barang manufaktur di negara-negara Asia Selatan, tampak bahwa India, Pakistan, dan Nepal menderita kehilangan spesialisasi dalam ekspor barang-barang manufakturnya selama periode 1980-2009. Penurunan dalam spesialisasi berarti negara-negara itu sedang mendiversifikasi barang-barang ekspor manufakturnya dan sedang memperluas surat-surat berharga perdagangan mereka. Di sisi lain, Bangladesh menurut Indeks Herfindahl pada tahun 1980-2009, mempunyai keuntungan komparatif dari ekspor barang-barang manufakturnya, walaupun tingkat ekspor portofolio barang-barang manufakturnya sempit. Sri Lanka sendiri memiliki tingkat spesialisasi komparatif yang tinggi.¹⁴

Ara dan Rahman menganalisis mengenai tingkat daya saing Bangladesh di antara negara-negara Asia Selatan lainnya. Pertama-tama, mereka mengutip berbagai arti ketinggian daya saing, yang menurut OECD adalah sebuah tingkatan dimana negara dapat memproduksi barang dan jasa yang bertitik-temu dengan ujian pasar internasional sambil mempertahankan serta meningkatkan pendapatan ril per orang dalam jangka waktu yang panjang, yang mana negara itu terlibat di dalam perdagangan bebas dan pasar bebas. Dan produktivitas, yang mengukur efisiensi dari sumber-sumber yang digunakan untuk memproduksi

¹⁴ Abu Hena Reza Hasan, "International Business Relations of Emerging India with South Asian Neighbors: Analysis of Manufacturing Export", diakses dari www.freit.org/WorkingPapers/Papers/TradePatterns/FREIT386 pada tanggal 14 Maret 2012 pukul 00.18 WIB.

barang dan jasa, adalah penggerak tingkat daya saing. Mereka mengutip tiga tahapan Pengembangan Kompetitif Porter yang meliputi ekonomi makro, politik, dan stabilitas legal dengan dasar biaya usaha bisnis yang murah. Kemudian, mereka melihat data kekompetitifan perekonomian Bangladesh. Dari data yang dikumpulkan, pertumbuhan ekonomi Bangladesh selama lebih dari lima tahun adalah 6 persen lebih, dimana negara ini menempati posisi ke-13 untuk ranking pertumbuhan ekonomi ril tercepat dari 152 negara (WTI 2008) dan pertumbuhan ekpornya rilnya lebih tinggi 9 persen dari semua negara Asia Selatan, kecuali India (WTI 2008). Dan sejak awal tahun 1990-an, Bangladesh meluncurkan reformasi tarif menyeluruh, yang mencakup pengurangan tarif secara substansial, menghilangkan hambatan kuantitatif, dan berpindah dari sistem nilai tukar yang banyak jenis menjadi bersatu dan dari sistem nilai tukar tetap menjadi mengambang, yang bertujuan untuk meningkatkan hasil ekpornya. Dari hasil data yang mereka kumpulkan, terdapat pengaruh peningkatan Bangladesh tingkat keterbukaan dalam perdagangannya terhadap total perdagangannya (ekspor ditambah impornya) terhadap pertumbuhan GDP-nya, yaitu sekitar 17,6 persen dari tahun 1990 sampai mencapai 42 persen pada tahun 2007. Sedangkan untuk India, tingkat keterbukaan dagangnya mencapai 39 persen tahun 2007 dan menjadi pengeksport tekstil urutan 43 di dunia. Produk pancing Bangladesh menduduki urutan 39, serta urutan ke-35 dunia untuk produk kulit yang diekspor.¹⁵

Menurut analisis mereka, meledaknya ekspor Bangladesh sepuluh tahun yang lalu, khususnya sektor tekstil, sangat berperan signifikan terhadap pertumbuhan ekonominya, walaupun memang pertumbuhan GDP-nya akhir-akhir ini tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap standar kehidupan dari kebanyakan masyarakatnya, ditambah lagi dengan faktor-faktor sosial yang masih menjadi tantangannya. Beberapa alasan mengapa hal ini bisa terjadi adalah kualitas infrastrukturnya yang lemah, khususnya jaringan jalan raya dan cadangan listrik, perekonomiannya yang sangat tergantung terhadap sektor agrikultur,

¹⁵ Dr. Laila Arjuman Ara dan M Masudur Rahman, "The Competitiveness and Future Challenges of Bangladesh in International Trade", diakses <http://www.wto.aoyama.ac.jp/file/090126laila/paper> pada tanggal 14 Maret 2012 pukul 00.28 WIB.

tingginya biaya pendanaan serta akses yang terbatas terhadap pilihan pendanaan jangka panjang, banyak pekerjanya yang tidak memiliki keahlian karena rendahnya tingkat pendidikannya, rendahnya instabilitas perpolitikannya, reformasi pemerintahan yang lambat, serta tingginya tingkat korupsi (termasuk di lingkungan pengadilan) sehingga mengikis rasa percaya diri investor. Oleh karena itu, Ara dan Rahman menyimpulkan bahwa tingkat kekompertifan Bangladesh masih berada di bawah faktor penggerak ekonominya sesuai dengan definisi daya saing Porter. Untuk itu, mereka menyarankan agar Bangladesh menjalankan kebijakan yang sifatnya pragmatis dan komprehensif sehingga menjadi negara dagang yang lebih kompetitif.¹⁶

Dua bahan di atas berusaha untuk memaparkan mengenai tingkat daya saing beberapa negara, seperti Bangladesh dengan beberapa pengukuran teori ekonomi. Walaupun rentang waktu penelitian mereka s/d tahun 2009, namun tidak kelihatan analisis yang mengaitkan apakah dengan menurunnya kemampuan membeli AS dan Uni Eropa (sebagai negara tujuan ekspor utama sebagian besar barang-barang produksi negara anggota SAARC) akibat resesi ekonomi berpengaruh terhadap naiknya tingkat perdagangan intra-kawasan Asia Selatan. Ada dua poin utama kritik terhadap hasil penelitian di atas, yaitu: Pertama, tidak diikutsertakannya Afghanistan dalam analisis data, padahal Afghanistan sudah masuk sebagai anggota SAARC dari tahun 2007. Kedua, data penelitian masih sampai tahun 2009, walaupun sudah ada data tingkat daya saing s/d tahun 2011.

Studi Asia Development Bank (ADB) pada tahun 2009 yang berisi tentang studi mengenai perdagangan intra-kawasan dan investasi di Asia Selatan. Penulis berusaha memaparkan tentang pengaruh fasilitas perdagangan (Trade Facilitation), melalui SAPTA dan SAFTA secara ekonometrik terhadap peningkatan nilai perdagangan di kawasan tersebut. Tulisan tersebut berusaha untuk menunjukkan keuntungan yang didapat dari integrasi perdagangan regional serta memberikan rekomendasi untuk memaksimalkan pendapatan dari perdagangan intra-kawasan itu. Hasil penelitian ini memang menunjukkan bahwa masih sangat rendahnya nilai *share* intra-kawasan Asia Selatan dibanding dengan

¹⁶ *Loc. Cit* Ara dan Rahman.

intra-kawasan di Asia Timur. Di dalam buku ini, penulis memaparkan tentang produksi T&C (Textile and Clothing) yang menjadi sektor andalan selain agrikultur dari lima negara, yaitu India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, dan Pakistan dari tahun 1995-2006. Selain itu, profil perdagangan dan kebijakan ekonomi di empat negara tersebut juga dijelaskan dengan cukup rinci. Namun demikian, yang menjadi kritikan adalah tulisan ini hanya membahas secara umum mengapa nilai dan *share* perdagangan intra-kawasan Asia Selatan rendah hanya dari sudut pandang ekonomi, khususnya produksi T&C, kondisi sosio-ekonominya, serta peran kebijakan pemerintah, tetapi tidak membahas kestabilan politik-keamanan di kawasan tersebut dan cenderung mengabaikan negara Bhutan dan Maladewa tanpa memberikan rekomendasi khusus terhadapnya.¹⁷

Adapun kerangka teori dan konsep yang dipakai adalah konsep liberalisasi perdagangan (perdagangan bebas) dan integrasi ekonomi, serta Teori keunggulan kompetitif bangsa Porter.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Liberalisasi perdagangan¹⁸

Usaha untuk meliberalkan perdagangan dilakukan dengan cara mempromosikan ekspor, mendevaluasi mata uang domestik, penghapusan segala bentuk hambatan perdagangan internasional, serta pengikisan penyimpangan-penyimpangan harga agar lebih sesuai dengan konstelasi kekuatan permintaan dan penawarannya di pasar. Para pendukung kebijakan liberalisasi perdagangan sepakat bahwa ada delapan (8) keuntungan yang akan didapatkan oleh negara/sekelompok negara yang menerapkannya, yaitu: pertama, perdagangan bebas mempromosikan persaingan, memperbaiki alokasi segenap sumber daya serta menciptakan skala ekonomis di bidang-bidang atau sektor-sektor ekonomi di mana negara berkembang memiliki keunggulan komparatif, dimana perdagangan bebas dapat menurunkan biaya-biaya produksi pada umumnya. Kedua, perdagangan bebas menimbulkan tekanan-tekanan yang mengarah pada

¹⁷ ADB, *Study on Intra-regional Trade and Investment in South Asia*, (Philippines, Asian Development Bank, 2009).

¹⁸ Michael Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (terjemahan), edisi keenam, (Jakarta: Erlangga, 1998), hal. 79.

peningkatan efisiensi, perbaikan kualitas produk, serta menyempurnakan mutu teknologi-teknologi produksi yang akan meningkatkan produktivitas faktor-faktor produksi (input) sehingga akan menghemat biaya-biaya produksi. Ketiga, perdagangan bebas memacu pertumbuhan ekonomi, menaikkan nilai labaga dan mempromosikan peningkatan tabungan dan investasi yang kemudian semakin memacu pertumbuhan di masa-masa selanjutnya. Keempat, perdagangan bebas akan menarik masuk modal, keahlian dan teknologi dari luar negeri, yang kesemuanya itu merupakan sumber-sumber daya yang sangat dibutuhkan namun sangat langka di negara-negara berkembang. Kelima, perdagangan bebas mendatangkan devisa yang kemudian bisa digunakan untuk keperluan impor; misalnya impor bahan pangan bila suatu saat negara yang bersangkutan mengalami masa-masa paceklik akibat musim kering yang berkepanjangan atau terjadinya bencana alam. Keenam, perdagangan bebas cenderung menghapuskan setiap penyimpangan harga yang diakibatkan oleh intervensi pemerintah yang salah arah, baik itu di pasar ekspor maupun pasar valas, serta menyempurnakan alokasi pasar yang akan mengikis praktek-praktek korupsi dan perburuan rente nonproduktif yang seringkali timbul sebagai akibat dari intervensi pemerintah yang terlalu aktif. Ketujuh, perdagangan bebas mempromosikan pemerataan akses ke setiap sumber daya yang langka, serta memperbaiki kualitas sumber daya secara keseluruhan. Yang terakhir adalah perdagangan bebas akan menghasilkan segala manfaat ekonomis yang dihasilkannya, jauh melebihi hasil dari penerapan strategi substitusi impor yang hasilnya semakin lama semakin menyusut, walaupun memang hasil awal dari strategi promosi ekspor relatif kecil.

Kaum perdagangan liberal menyatakan bahwa, seperti pernyataan Adam Smith, bahwa perdagangan bebas akan menguntungkan semua pihak dari segala wilayah (teritori) yang didasarkan pada pembagian kerja internasional (internasional division of labor). Terlebih lagi, contoh dari Inggris yang mengalahkan saingannya pada tahun 1814 adalah karena mereka mengadopsi sebuah kebijakan perdagangan bebas dan sebaliknya terjadi pada Prancis yang terlalu melindungi industri dalam negerinya. Oleh karena itu, kaum neoliberal

melihat perdagangan dan proteksionisme dari sisi kesejahteraan konsumen dan maksimalisasi efisiensi global.¹⁹

1.5.2 Integrasi ekonomi dalam perdagangan intra-kawasan

Integrasi ekonomi adalah bergabungnya sekelompok negara dalam kawasan geografis yang sama (idealnya kalau memiliki ukuran relatif dan tahapan pembangunan ekonomi yang kurang lebih sama).²⁰ Ada empat istilah dalam integrasi ekonomi, yaitu²¹: Pertama, *Preferential Trade* adalah kebijakan untuk meningkatkan perdagangan dengan cara mengurangi hambatan tarif barang tertentu. Perjanjian dagangan ini sifatnya resiprok (negara yang berdagang saling melakukan hal yang sama) dan menyediakan sebuah kesempatan bagi pemerintah, seperti aliansi.²² Terlebih lagi perjanjian ini mungkin untuk mempromosikan hubungan investasi yang khusus oleh agen-agen swasta yang mendorong untuk berdagang, dan akan menghasilkan perdagangan yang lebih besar di antara negara yang terikat di dalamnya.²³ Kedua, *Free Trade* (perdagangan bebas) adalah kebijakan untuk meningkatkan perdagangan oleh sekelompok negara dengan cara memberlakukan hambatan tarif dan hambatan non-tarif s/d 0%. Ketiga, *Custom Union*²⁴ adalah kebijakan untuk meningkatkan perdagangan oleh sekelompok negara dengan cara menyetujui bebas tarif dalam perdagangan di dalam batas wilayah kolektif dan membentuk hambatan perdagangan eksternal yang umum. Contoh: Jika NAFTA ingin berkembang menjadi *custom (tariff) union*, maka negara anggotanya (AS, Meksiko, dan Kanada) harus setuju untuk menyatukan sekumpulan hambatan tarif yang akan diterapkan terhadap produk dari negara lain. Keempat, *common market* adalah kebijakan untuk meningkatkan perdagangan dengan cara oleh sekelompok negara dengan cara menghilangkan

¹⁹ Robert Gilpin, *The Political Economy of International Relations*, (UK: Princeton University Press, 1987), hal.184, 187, dan 189.

²⁰ *Ibid*, hal.83.

²¹ M. Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan: Masalah, Kebijakan, dan Politik*, (Jakarta:Erlangga, 2010), hal.217-218.

²² Edward D. Mansfield dan Rachel Bronson, "Alliances, Preferential Arrangement, and International Trade", *The American Political Science Review* vol.91/no.1/Maret 1997, diakses dari <http://www.jstor.org/stable/2952261> pada tanggal 24 Oktober 2011 pukul 13.21 WIB.

²³ *Op.Cit*, M. Kuncoro.

²⁴ David N. Balaam & Michael Veseth, *Introduction to International Political Economy*, edisi keempat, (USA: Pearson Education, Inc, 2008), hal.219.

hambatan perdagangan, menerapkan kebijakan perdagangan yang seragam terhadap non-anggota ditambah dengan dengan faktor produksi diberi keleluasaan untuk bergerak antar negara anggota.

1.5.3 Keuntungan Kompetitif Bangsa (Competitive Advantage of Nations)²⁵

Menurut Porter, faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan komparatif terhadap wilayah atau negara-negara, seperti tanah, lokasi, SDA (mineral dan energi), buruh, dan ukuran populasi lokal bersifat pasif (sudah ada dari dalam) perlu diganti dan dijadikan kesempatan bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional yang berkelanjutan. Namun demikian, ia menyatakan bahwa melimpahnya faktor-faktor yang *inherent* itu dapat mengikis keuntungan kompetitif negara. Porter menyatakan bahwa kebijakan pemerintah (campur tangan pemerintah) yang signifikan, seperti kebijakan proteksi, promosi ekspor, dan substitusi telah membuat industri di Jepang dan Korea jauh dari kesuksesan di dalam kompetisi internasional. Nyatanya, walaupun tanpa kebijakan pemerintah yang kurang efektif, Italia, tetap menghasilkan kenaikan standar kehidupan yang pesat. Neraca perdagangan yang positif juga bukan menjadi jaminan suatu negara dikatakan kompetitif. Italia dan Swiss mengalami neraca perdagangan negatif tetapi masih bisa menikmati kenaikan pendapatan nasional.

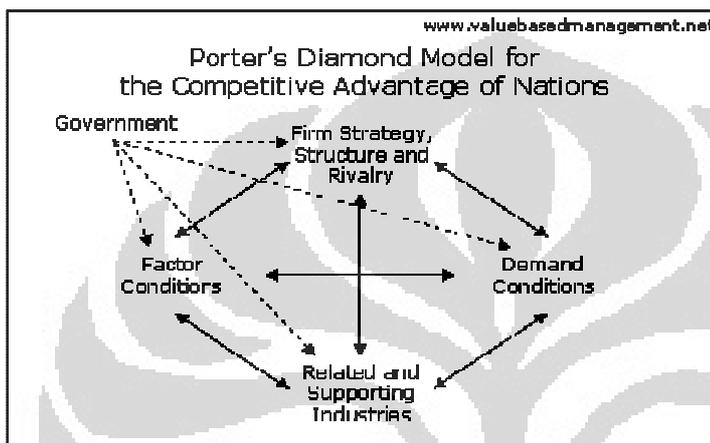
Menurutnya, produktivitas negara yang didalamnya terdapat modal dan buruh yang dipekerjakan. Produktivitas mencakup kualitas, fitur produk (sehingga dia bisa menentukan harga), serta efisiensi. Produktivitas adalah determinan utama dalam standar kehidupan dalam jangka panjang karena merupakan akar penyebab dari pendapatan per kapita nasional. Dengan produktivitas yang tinggi, tiap-tiap pekerja mendapatkan gaji yang lebih sehingga berimplikasi terhadap pendapatan nasional karena menciptakan pendapatan nasional sehingga meningkatkan standar kehidupan kembali. Dalam lingkup nasional, kompetitif diukur dari produktivitas nasional. Sehingga melalui teorinya ini, Porter ingin

²⁵ *Diamond model-Michael Porter*, diakses dari http://www.valuebasedmanagement.net/methods_porter_diamond_model.html pada tanggal 2 Maret pukul 19.20 WIB dan *Ibid*, Porter, halaman 4-6.

mencari tahu bagaimana produktivitas nasional ini bisa muncul. Pertumbuhan produktivitas yang berkesinambungan membutuhkan peningkatan (up grade) ekonomi dalam tiap-tiap negara dari waktu ke waktu.

Dalam persaingan internasional yang bersaing sesungguhnya adalah perusahaannya. Oleh karena itu, industri nasional harus meningkatkan

Gambar 1.5.3 Skema Determinan dalam Teori Porter produktivitasnya pada



industri-industri khusus dan segmen industri.

Perusahaan akan mendapatkan keuntungan kompetitif dari produktivitas terhadap produk yang memiliki harga yang lebih rendah dan terdiferensiasi serta

penggunaan teknologi dan efisiensi produksi. Harga yang lebih rendah adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk merancang, memproduksi, serta memasarkan produk yang lebih efisien untuk diperbandingkan dengan barang hasil produksi saingannya, tetapi dengan hasilnya superior. Diferensiasi adalah kemampuan untuk menyediakan nilai yang unik dan superior terhadap pembeli dalam hal kualitas produk, berciri spesial, dan pelayanan setelah pembelian. Memang sulit bagi perusahaan, walaupun mungkin, untuk menghasilkan produk yang harganya lebih rendah serta memiliki ragam (diferensiasi). Selain harga dan ragam, perusahaan juga harus menentukan seberapa luas ia harus memproduksi dan memasarkan produknya (competitive scope).

Untuk menjelaskannya, Porter memperkenalkan konsep kluster atau sekumpulan perusahaan yang terhubung, penyedia barang, industri yang berkaitan, dan lembaga-lembaga yang muncul di lokasi-lokasi khusus. Ada empat hasil dari faktor-faktor dan aktivitas modern yang saling terkait di dalamnya serta di antara perusahaan-perusahaan di dalam kluster yang dipengaruhi oleh cara pemerintah yang pro-aktif. Kluster ini dinamakan Model Intan Porter bagi

Keuntungan Kompetitif Bangsa-bangsa. Beberapa faktor yang saling terkait di dalamnya adalah: Pertama, strategi perusahaan, struktur, dan persaingan yang mana dunia ini didominasi oleh kondisi yang bersifat dinamis dan ada kompetisi langsung memaksa perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan inovasinya. Kedua, kondisi permintaan yang mana semakin banyak permintaan pelanggan dalam sebuah perekonomian, semakin besar pula tekanan yang dihadapi oleh banyak perusahaan untuk meningkatkan kompetitifan mereka melalui produk-produk yang inovatif, dan melalui kualitas tinggi, dan hal lainnya. Ketiga, industri-industri pendukung yang berhubungan, yang mana dekatnya jarak antara industri hulu atau industri hilir memfasilitasi pertukaran informasi dan mempromosikan sebuah pertukaran ide dan inovasi yang sifatnya berkelanjutan. Keempat, kondisi faktor-faktor produksi, dimana penciptaan adalah kuncinya, bukan yang sifatnya inheren. Faktor-faktor produksi yang terspesialisasi itu adalah buruh yang ahli, modal, dan infrastruktur; yang kesemuanya itu akan menghasilkan keuntungan kompetitif karena perusahaan lain tidak mudah untuk menduplikasikan faktor-faktor yang berharga ini.

Menurut Porter, pemerintah bertindak sebagai pemercepat untuk mendorong perusahaan-perusahaannya dalam meningkatkan apresiasi dan memindahkannya ke tingkatan hasil kompetitifan yang lebih tinggi. Pemerintah harus merangsang permintaan pertama bagi produk-produk terdepan (hebat), fokus terhadap spesialisasi penciptaan faktor dan mendorong persaingan lokal dengan membatasi kerjasama langsung serta menegakkan peraturan-peraturan *anti-trust* (penggabungan berbagai industri). Bangsa-bangsa mendapatkan keuntungan dalam industrinya dimana permintaan dalam negeri memberikan ide-ide yang lebih baik bagi perusahaan-perusahaan dalam negeri daripada yang disediakan oleh lawan asingnya. Porter mengeksplorasi komponen-komponen apa yang membuat Amerika, Swiss, Swedia, dan Jerman menjadi pemenang pertama paska PD melalui perbandingan FDI (investasi langsung asing).

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan memakai metode kuantitatif, dimana penulis berusaha untuk membandingkan teori dengan keadaan realitas berdasarkan data statistik dan tulisan yang sumber utamanya berasal dari buku, jurnal, artikel, dan sumber tertulis lainnya. Proses penelitian dengan metode kuantitatif adalah: Melihat teori, membuat hipotesis, lalu merancang penelitian, mengikutsertakan konsep-konsep, memilih tempat penelitian, mengumpulkan data, kemudian memproses dan menganalisisnya, serta akhirnya akan mencapai kesimpulan²⁶. Dengan demikian, metode ini mengikuti proses deduktif.

1.6.2 Operasionalisasi Konsep dan Teori

Dalam penjelasan teori liberal disebutkan bahwa perdagangan internasional mengakibatkan tiap-tiap negara berupaya untuk memspecialisasikan dirinya terhadap produksi barang/jasa yang paling tinggi tingkat daya saingnya (efisiensi paling tinggi/ keuntungan komparatifnya) sehingga mampu mendapatkan keuntungan di dalam perdagangan tersebut. Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan dari tingkat mikro, yaitu pengaruh peningkatan produktivitas industri tiap negara dalam menciptakan produk yang berdaya saing tinggi terhadap keberhasilan kerjasama perdagangan di tingkat global (level dunia atau regional). Caranya adalah menjelaskan dahulu kinerja industri-industri di masing-masing negara kawasan Asia Selatan (India, Bhutan, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Maladewa, dan Sri Lanka) yang dilihat dari produktivitasnya dalam menghasilkan produk yang menghasilkan keuntungan komparatif ditambah dengan dukungan kebijakan domestik pemerintah terhadap peningkatan kinerja perusahaan domestiknya. Produk (barang/jasa) komparatif tiap negara ini akan dianalisis berdasarkan empat determinan dalam Teori Porter untuk mengetahui sejauh mana produk tersebut dapat bersaing di pasar internasional (regional) dan menghasilkan keuntungan kompetitif bagi bangsa/negaranya. Keuntungan Kompetitif Bangsa ini

²⁶Alan Bryman, *Social Research Methods*, edisi kedua, (UK: Oxford University Press, 2004), hal. 62-63.

akan berpengaruh terhadap peningkatan nilai perdagangan perdagangan intra-regional, terutama melalui mekanisme SAPTA (SAARC Preferential Trade Arrangement) dan SAFTA (South Asian Free Trade Arrangement) selama tahun 2000-2010 karena tiap-tiap negara akan tetap mendapat keuntungan kompetitif dalam persaingan dagang regional ini. Terlebih karena kebijakan liberalisasi perdagangan dan integrasi ekonomi ini ditujukan mempermudah perusahaan domestik tiap negara anggota SAARC untuk memasarkan barang-barang kompetitifnya ke negara tetangganya dalam satu kawasan.

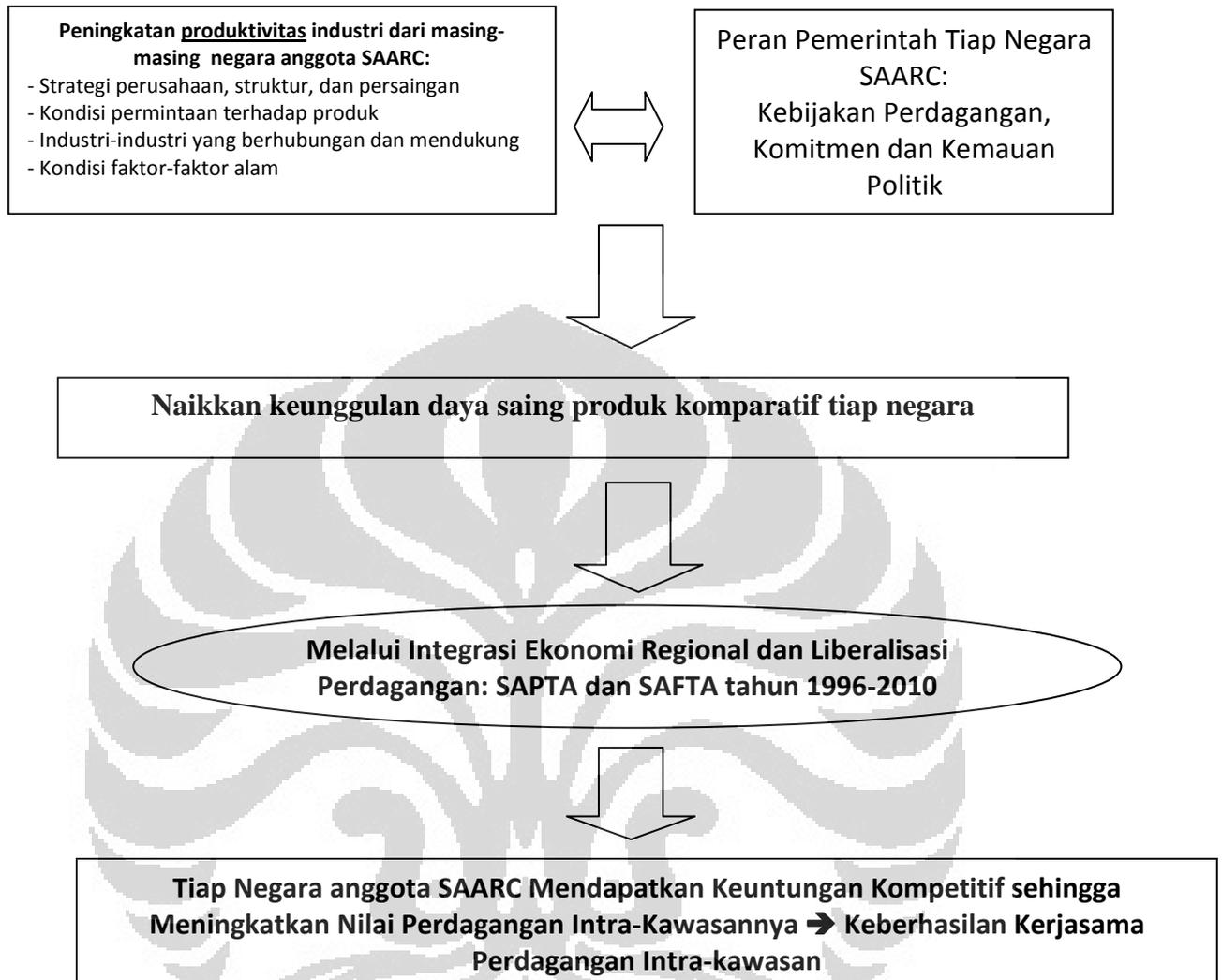
Oleh karena itu, penulis berupaya mencoba menjelaskan tingkat daya saing (kekompetitifan) tiap-tiap negara anggota SAARC melalui konsep **Model Intan Porter bagi Keuntungan Kompetitif Bangsa-bangsa**, dan mengukur sejauh mana tiap negara (peran pemerintah dan perusahaan domestiknya) sudah berusaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan domestiknya untuk mampu bersaing di dalam/luar negeri dan menghasilkan keuntungan bagi negaranya.

Variabel Independen	Kategori	Ukuran
Tingkat Daya Saing (Competitiveness) = Produktivitas perusahaan terhadap barang yang harganya lebih rendah, memiliki ragam, serta target produksi.	Tinggi	Tingginya tingkat ketersediaan faktor-faktor alam (SDA, SDM, modal, infastruktur) dan kreasi (investasi dan litbang), tingginya tingkat permintaan pasar domestik terhadap produk andalan yang mendorong pertumbuhan produksinya, baiknya strategi serta struktur dan rivalitas dari perusahaan produsen produk negara itu, serta ketersediaan dari industri pendukung untuk memproduksi suatu produk andalan dari satu negara ditambah dengan dukungan positif dari pemerintah negaranya.
	Rendah	Rendahnya tingkat ketersediaan faktor-faktor alam (SDA, sedikit SDM yang tinggi tingkat pendidikannya, termasuk kurangnya modal, infastruktur) dan kreasi (investasi dan litbang yang sangat jarang), rendahnya tingkat permintaan pasar domestik terhadap produk

		andalan yang mendorong pertumbuhan produksinya, kurang baiknya strategi serta struktur dan rivalitas dari perusahaan produsen produk negara itu, serta tidak tersedia industri pendukung untuk memproduksi suatu produk andalan dari satu negara.
--	--	---

Variabel Dependen	Kategori	Ukuran
Liberalisasi Perdagangan intra- kawasan	Berhasil	Persentase perbandingan nilai perdagangan intra-kawasan yang mengalami kenaikan signifikan dari tahun ke tahun dibandingkan dengan total perdagangannya ke dunia.
	Kurang Berhasil	Persentase perbandingan nilai perdagangan intra-kawasan yang tetap rendah dari tahun ke tahun dibandingkan dengan total perdagangannya ke dunia.

Model Analisis Sederhana



1.6.3 Asumsi

Asumsi penulis adalah tidak semua negara di kawasan Asia Selatan memperoleh keuntungan kompetitif dari kesepakatan perjanjian dagang SAPTA dan SAFTA dikarenakan ketidakmampuannya untuk produktif dalam menghasilkan produk kompetitif (harga dan diversifikasi jenis) sehingga persentase perbandingan nilai perdagangan intra-kawasan dengan total perdagangan ke dunia tetap rendah.

1.6.4 Hipotesis

Ada hubungan antara tingkat daya saing produk tiap negara (melalui kerjasama peran pemerintah dan swasta/industri) dengan keberhasilan kesepakatan liberalisasi perdagangan regional.

1.6.5 Rencana Pembabakan Skripsi

Untuk mempermudah menjelaskan penelitian dalam skripsi ini, maka pembabakan skripsi ini adalah:

Bab I : Terdiri dari penjelasan latar belakang masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, kerangka konsep dan teori, model analisis, metode penelitian, studi literatur, dan rencana pembabakan skripsi.

Bab II : Penjelasan mengenai sejarah pembentukan dan kinerja SAARC dalam kerjasama ekonomi melalui mekanisme SAPTA dan SAFTA yang terdiri atas Pemaparan sejarah pembentukan, tujuan, dan efektivitas SAARC, lalu penjelasan kelemahan dan kelebihan kerjasama ekonomi SAPTA sejak tahun 1995 dan SAFTA sejak tahun 2006.

Bab III: Terdiri atas Pemaparan empat faktor penentu (Determinan) Keuntungan Kompetitif Bangsa, seperti Kondisi faktor-faktor produksi, situasi permintaan, Berbagai industri yang berhubungan & mendukung serta strategi perusahaan, struktur, dan Persaingan antar perusahaan yang berpengaruh terhadap Peningkatan Keuntungan Daya Saing Tiap Negara anggota SAARC dan Keberhasilan Liberalisasi Perdagangan Asia Selatan tahun 2000-2010

Bab IV: Analisis kebijakan pemerintah tiap negara anggota SAARC dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan terhadap peningkatan keuntungan daya saing bangsa dan peningkatan kerjasama melalui mekanisme Liberalisasi Perdagangan Regional: SAPTA dan SAFTA tahun 2000-2010

Bab V : Kesimpulan dan Saran

BAB II

KERJASAMA EKONOMI, POLITIK, DAN KEAMANAN DI KAWASAN ASIA SELATAN: KEBERADAAN SAARC

2.1 Sejarah Pembentukan, Tujuan, dan Efektivitas SAARC

Ide pembentukan kerangka kerjasama regional Asia Selatan diajukan oleh mantan Presiden Bangladesh, Ziaur Rahman, pada tanggal 2 Mei 1980. Dan ide kerjasama regional ini telah didiskusikan pada tiga konferensi, yaitu *the Asian Relations Conference* di New Delhi pada bulan April 1947, *the Baguio Conference* di Filipina pada bulan Mei 1950, serta *the Colombo Powers Conference* pada bulan April 1954. Sejak tahun 1977, Presiden Bangladesh membayangkan ide seperti organisasi ASEAN di Asia Selatan sehingga ia mengunjungi beberapa kepala negara, seperti PM India Morarji Desai pada bulan Desember 1977, Raja Birendra dari Nepal yang menyambut baik ide tersebut, serta Presiden Sri Lanka yaitu J.R Jayawardane pada bulan November 1979.²⁷

Beberapa faktor yang mempengaruhi pemikiran Presiden Rahman mengenai pembentukan organisasi kawasan ini sejak tahun 1975-1979 adalah perubahan kepemimpinan politik di negara-negara Asia Selatan dan pertunjukan diplomasi yang akomodatif dari para pemimpin baru, pentingnya dukungan India untuk melegitimasi rejim kudeta Presiden Rahman, sebuah keseimbangan kritis dari krisis pembayaran di seluruh negara Asia Selatan yang diperparah dengan krisis minyak tahun 1979, kegagalan dialog Utara-Selatan serta meningkatnya sifat proteksionisme dari negara-negara maju, hasil identifikasi dari oleh Komite Studi Kerjasama dalam Pembangunan di Asia Selatan (CSCD) yang menyatakan banyaknya daerah-daerah kerjasama yang memungkinkan, jaminan bantuan ekonomi dari proyek kerjasama multilateral dalam pembangian sumber air dari Gangga dan Brahmaputra oleh Presiden AS Jimmy Carter dan PM James

²⁷ Kishore C. Dash, "The Political Economy of Regional Cooperation in South Asia", *Pacific Affairs*, Vol. 69, no. 2 (Summer 1996) diakses dari <https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/dash.htm> pada tanggal 22 Mei 2012 pukul 15.22 WIB.

Callaghan ketika mengunjungi India, Pakistan, dan Bangladesh pada bulan Januari 1978, intervensi militer Soviet terhadap Afghanistan pada akhir bulan Desember 1979, serta yang mengakibatkan merosotnya situasi keamanan di Asia Selatan sehingga inisiatif Presiden Rahman untuk mendirikan organisasi regional adalah agar para pemimpin negara di kawasan Asia Selatan dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap masalah satu sama lain dan berjanji untuk tidak berkonflik sebelum krisis.²⁸

Proposal kerjasama regional Presiden Rahman ini diterima oleh Nepal, Sri Lanka, Maladewa, dan Bhutan, sedangkan India dan Pakistan bersikap skeptis. Para pembuat keputusan di India takut bahwa negara tetangga kecil akan meregionalisasikan seluruh isu bilateral dan bersatu untuk “mengeroyok” India. Pakistan mengasumsikan bahwa ide kerjasama ini adalah strategi India untuk mengorganisir negara-negara Asia Selatan melawan Pakistan dan menjamin pasar regional bagi barang-barang India sehingga mengkonsolidasikan dan memperkuat dominasi India di kawasan Asia Selatan.²⁹

Namun demikian, akhirnya kerjasama ini disetujui dan diberi nama SAARC (South Asian Arrangement of Regional Cooperation) yang dibentuk pada tanggal 8 Desember 1985 di Dhaka, Bangladesh, oleh Raja Bhutan (Jigme Singye Wangchuk), Presiden Bangladesh (Hussain Muhammad Ersad), PM India (Rajiv Gandhi), Presiden Maladewa (Maumoom Abdul Gayom), Raja Nepal (Birendra Bir Bikram Shah Dev), Presiden Pakistan (Muhammad Zia-ul-Haq), Presiden Srilanka (Junius Richard Jawewardene). Ada delapan tujuan pembentukannya, yang meliputi: Pertama, untuk mempromosikan kesejahteraan bagi masyarakat Asia Selatan dan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Kedua, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya di kawasan tersebut, menyediakan kesempatan hidup yang bermartabat bagi semua individu, serta merealisasikan potensi-potensi mereka. Ketiga, mempromosikan dan memperkuat kebergantungan kolektif di antara negara-negara Asia Selatan. Keempat, mengikutsertakan sikap saling percaya, pemahaman, dan penghargaan

²⁸ The Political Economy of Regional Cooperation in South Asia, *Loc.Cit*

²⁹ *Ibid*,

terhadap masalah satu sama lain. Kelima, memperkenalkan kolaborasi yang aktif dan saling membantu dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan teknik. Keenam, memperkuat kerjasama dengan negara-negara yang sedang berkembang. Ketujuh, memperkuat kerjasama di antara mereka sendiri dalam forum internasional dalam hal kesamaan kepentingan. Tujuan terakhirnya adalah bekerjasama dengan organisasi internasional dan regional dengan tujuan yang sama.³⁰

Sedangkan prinsip yang dianut dalam kerjasama ini adalah penghormatan terhadap prinsip kesamaan yang berdaulat, teritorial, kemerdekaan politik, tidak ikut campurnya tiap negara terhadap panggung domestik negara anggota, kesamaan keuntungan, lebih memandang kerjasama regional sebagai yang utama dan tidak bisa digantikan oleh kerjasama bilateral maupun multilateral tetapi mereka memperlengkapi kerjasama kawasan tersebut, serta akan konsisten terhadap kewajiban-kewajiban bilateral dan multilateral.³¹

2.1.1 Keanggotaan Afghanistan dalam SAARC tahun 2005

Afghanistan resmi masuk menjadi anggota SAARC pada tanggal 3-4 April 2005, pada pertemuan tahunan SAARC ke-13 di India, yang dihadiri oleh Presiden Afghanistan Hamid Karzai dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Dr. Rangin Dadfar Spanta. Dadfar menyatakan bahwa Afghanistan akan membantu negara anggota SAARC lainnya dalam melawan terorisme dan menyediakan fasilitas transit antara Asia Selatan dengan Asia Tengah, termasuk mencari investasi asing di Asia Selatan.³²

Namun demikian, Afghanistan tidak termasuk negara yang akan dianalisis dalam penelitian ini karena Afghanistan tidak memiliki produk komparatif. Sampai saat ini, sekitar 80-90% dari aktivitas perekonomiannya adalah sektor informal seperti perdagangan narkoba yang ilegal, pasar legalnya mencakup keuangan hawala, bisnis tanpa dokumen, serta eksploitasi ilegal terhadap SDA. Walaupun Afghanistan memiliki produk agrikultur sebagai sektor utama, namun sektor

³⁰ *South Asian Association for Regional Cooperation SAARC Charter*, diakses dari <http://www.saarc-sec.org/SAARC-Charter/5/> pada tanggal 14 April 2012 pukul 11.20 WIB.

³¹ *Loc.Cit*,

³² *Afghanistan joins SAARC, World's Largest Economic Grouping*, diakses dari <http://www.payvand.com/news/07/apr/1019.html> pada tanggal 30 Mei 2012 pukul 11.45 WIB.

tersebut hanya memberikan kontribusi kecil terhadap peningkatan perekonomiannya secara umum. Terlebih lagi negara ini memiliki neraca perdagangan yang hiper-defisit jika dilihat dari data WTO.³³ Dan menurut data ADB, neraca perdagangan Afghanistan sudah menderita defisit sejak tahun 2002 (reformasi ekonomi yang signifikan baru tahun 2003-2004) serta mitra dagang utamanya adalah Pakistan sejak tahun 1965.³⁴

2.2 Dinamika kerjasama ekonomi, politik, dan keamanan di Asia Selatan

2.2.1 Kerjasama Ekonomi

Dari segi *timing*, Asia Selatan sudah terlambat merangkul konsep kerjasama ekonomi regional yang segoyianya berlangsung pada pertengahan tahun 1980-an, sedangkan kawasan ini baru mempromosikan kerjasama ekonominya pada tahun 1995 melalui sebuah kesepakatan regional. Proposal kerjasama ekonomi kawasan ini dimulai dengan inisiasi pembentukan SAPTA (South Asian Preferential Trade Agreement) kemudian SAFTA (South Asian Free Trade Agreement) dan memang transisi dari ke SAFTA mengalami penundaan yang seharusnya pada *summit* tahun 1999 menjadi pada tahun 2004 (final agreement). Walaupun ada kesepakatan nyata, namun sebenarnya negara-negara di kawasan Asia Selatan menunjukkan kengganannya untuk saling membuka pasar mereka bagi sesama anggota SAARC.³⁵

Struktur ekonomi di Asia Selatan didominasi oleh sektor pertanian yang mencapai sekitar sepertiga dari total GDP dan dua pertiga dari total pekerjaan di kawasan tersebut. Sedangkan sektor manufakturnya banyak didominasi oleh tekstil dan pakaian, serta pelaksanaan industri baja, aluminium, petrokimia, dan peralatan lainnya yang sedang dioperasionalkan secara besar-besaran saat ini. Sektor jasa juga mewakili bagian pertumbuhan besar dalam perekonomian Asia

³³ Adam Pappas, "Trade Promotion in Afghanistan: Role for Infrastructure, Policy Option for State-Building in Afghanistan" (24 April 2009), diakses dari www.sais-jhu.edu/academics/regional-studies-southasia/pdf/Pappas/20Afghan/20Policy/20Paper-20v5.1 pada tanggal 30 Mei 2012 pukul 11.54 WIB.

³⁴ "Trade Promotion in Afghanistan: Role for Infrastructure", *Loc.Cit*

³⁵ Dushi Weerakon, *Regional Economic Cooperation Under SAARC: Possibilities and Constraints*, dalam Anjum Siddiqui, *India and South Asia: Economic Development in the Age of Globalization*. (New York: M.E Sharpe, Inc, 2007), hal.234.

Selatan, yang mencakup industri pertumbuhan tinggi seperti teknologi informasi, khususnya di India. Kawasan ini telah mengalami tanda-tanda peningkatan dalam hal struktur ekonomi selama limapuluh tahun belakangan ini, dimana hasil dari sektor pertanian telah mengalami penurunan mencapai sekitar 20 % dari proporsi GDP, industri jasa telah meningkat sekitar 10 % (mencapai sekitar setengah dari GDP di Asia Selatan), sedangkan sektor manufaktur masih dalam proporsi yang serupa dengan tahun-tahun berikutnya walaupun jenis industri manufaktur memang sudah mengalami diversifikasi menuju barang-barang yang memiliki nilai yang lebih tinggi. Dengan jumlah sekitar 16% dari GDP yang berasal dari barang manufaktur yang mengalami penambahan nilai, India, Pakistan, dan Bangladesh telah menjadi negara yang perekonomiannya paling berorientasi kepada industri manufaktur.³⁶

Kenyataan perdagangan regional di Asia Selatan adalah negara-negara SAARC ketinggalan dalam hal keterbukaan dalam perdagangan internasionalnya walaupun memang mereka sudah mereformasi kebijakan ekonominya sejak tahun 1990-an, jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Hasilnya menyatakan perdagangan intra-kawasan SAARC banyak dipengaruhi oleh ketegangan politik di dalamnya, rejim perdagangan proteksionis, serta tingginya volume perdagangan informal. Ada tiga kelemahan perdagangan intra-kawasan Asia Selatan. Pertama, kawasan itu memiliki tingkat komplementaritas yang terbatas sehingga membatasi ekspansi perdagangan intra-kawasan di bawah mekanisme perdagangan bebas. Kedua, tingginya tingkat daya saing di antara negara itu menghasilkan kecilnya kemungkinan dari keberhasilan perjanjian kawasan tersebut. Ketiga, kecilnya tingkat perdagangan antar sesama negara di kawasan itu berujung terhadap diversi perdagangan daripada penciptaan dagang bagi beberapa anggota di dalam dan di luar kawasan tersebut. Tingkat ekspor India menjadi yang terbesar di kawasan Asia Selatan, yaitu sebesar 74% yang nilainya adalah 6,901 miliar dollar AS pada tahun 2009, sedangkan nilai ekspor Pakistan pada tahun yang sama adalah sebesar 824,27 juta dollar AS. Oleh karena itu, India dan Pakistan menjadi dua negara pengekspor utama di kawasan SAARC. Dari data impor intra-

³⁶*ibid*, hal.19-20.

kawasan itu, Sri-Lanka (sebesar 2,987 miliar dollar AS), Bangladesh (2,593 miliar dollar AS), dan India (1,636 miliar dollar AS) menjadi negara pengimpor yang utama di kawasan Asia Selatan tersebut pada tahun 2003-2009. Pada tahun 2009, terjadi peningkatan ekspor secara tajam dari Pakistan terhadap mitra dagang terpilih di kawasan itu dan SAARC sejak tahun 2003, kecuali dengan Bangladesh. Perdagangan yang sifatnya komplementer antara India dan Pakistan naik dari 13,59% menjadi 20,65% dari tahun 2003 ke tahun 2009, begitu juga dengan Sri Lanka. Namun persentase perdagangan Pakistan dan Bangladesh mengalami stagnasi. Di satu sisi, terjadi penurunan antara data komplementer Pakistan dengan negara-negara terpilih seperti Bangladesh dan Sri Lanka, walaupun di sisi lain nilai impor barang komplementer Pakistan meningkat dengan India dan SAARC sebagai sebuah kawasan, yaitu dari 43,08% tahun 2003 menjadi 48,73% tahun 2009.³⁷

Kelemahan kerjasama perdagangan regional melalui SAARC akan terkikis apabila tiap-tiap negara lebih mengutamakan perdagangan bebas secara bilateral. Contohnya Sri Lanka akan mendukung SAFTA hanya karena menginginkan kemudahan masuk ke pasar India (dalam perjanjian India-Lanka FTA). Kesepakatan bilateral ini akan menjadi paralel seperti kesepakatan dagang lainnya. Hal ini dapat memarginalisasikan SAFTA sebagai kesepakatan dagang regional karena tiap-tiap negara anggotanya akan memilih berdagang secara bilateral dengan anggota lain, bahkan negara negara di luar kawasan ini.³⁸

Selain itu, kelemahan industri di kawasan itu terlihat dari industri manufaktur di Sri Lanka yang fokus terhadap industri barang rendah teknologi, seperti garmen dan tekstil. Industri manufaktur Bangladesh dikhususkan terhadap produk sejenis garmen jadi, kain kapas, makanan laut yang diproses, dan obat-obatan. Sedangkan industri manufaktur India mencakup sektor kunci seperti pakaian, tekstil, baja, aluminium, dan pupuk; sektor industri berteknologi tinggi,

³⁷ Mamoona, et.al, "Pakistan Trade Competitiveness and Complementarities in South Asia", Pakistan Institute of Trade and Development (9 June 2011), diakses dari http://mpr.ub.uni-muenchen.de/31369/1/MPRA_paper_31369 pada tanggal 14 Maret 2012 pukul 00.21 WIB.

³⁸ *Loc. Cit* Weerakoon,

mencakup petrokimia, obat-obatan, barang elektronik, serta sepeda motor. Pakistan memproduksi barang-barang kebutuhan, pertambangan, dan tekstil.³⁹

2.2.2 Kesepakatan Perdagangan preferensial (SAPTA) tahun 1995

Kesepakatan SAPTA ini diprakarsai dalam Pertemuan tahunan (Summit) SAARC yang keenam di Colombo, Sri Lanka pada bulan Desember 1991, dimana disetujuinya pembentukan Kelompok dalam Pemerintah (Inter-Governmental Group/ IGG) untuk merumuskan kesepakatan perdagangan preferensial yang akan diwujudkan pada tahun 1997. Berdasarkan konsensus yang diadakan di dalam SAARC, perjanjian SAPTA ditandatangani pada tanggal 11 April 1993 dan dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 1995 sesuai dengan tanggal yang disepakati pada pertemuan tahunan di Kolombo tersebut. Kesepakatan ini mencerminkan keinginan dari tiap-tiap anggota SAARC untuk mempromosikan dan mempertahankan kesinambungan perdagangan resiprok dan kerjasama ekonomi di dalam kawasan Asia Selatan melalui pertukaran berbagai konsesi. Ada empat prinsip yang mendasari kerjasama SAPTA ini, yaitu: pertama, bahwa seluruh resiprositas dan keuntungan bersama akan menguntungkan semua negara yang terlibat kontrak, memasukkannya ke dalam perhitungan perekonomian dan pembangunan industrinya, pola perdagangan eksternalnya, dan kebijakan dagang dan tarif, serta sistem-sistemnya. Kedua, negosiasi dalam reformasi tarif dilakukan selangkah demi selangkah, meningkatkan tingkat keberhasilan melalui tinjauan ulang berkala. Ketiga, pengakuan terhadap kebutuhan spesial dari negara kurang berkembang (LDCs) yang ikut kontrak serta kesepakatan nyata terhadap ukuran-ukuran preferensial pilihan mereka. Kelima, keterbukaan terhadap semua produk, barang-barang manufaktur, komoditas dalam bentuk mentah, setengah jadi, maupun barang jadi. Empat putaran dalam negosiasi perdagangan telah disepakati melalui SAPTA yang melingkupi 5000 komoditas. Tiap-tiap putaran ambil andil terhadap sebuah trend sementara (incremental) pada produk yang terjangkau dan pendalaman kesepakatan tarif melebihi putaran sebelumnya.⁴⁰

³⁹ *Op.Cit*, Mamoon.

⁴⁰ SAARC Preferential Trading Agreements (SAPTA) diakses dari www.saarc/sec.org-areaofcooperation/detail.php/activity_id=4.htm pada tanggal 1 Februari 2012 pada pukul 20.52 WIB.

2.2.2.a Kelebihan dan Kelemahan SAPTA

Beberapa hasil besar kesepakatan dagang preferensial ini terdapat dalam sepuluh tahun pertama pengoperasionalisasiannya. Salah satu hasil dari negosiasi kesepakatan pertama di bawah SAPTA adalah pertukaran konsesi (kelonggaran) dagang di antara negara-negara anggota, dan khususnya India yang menjadi perekonomian besar yang berpartisipasi di dalam regional itu telah memberikan potongan lebih dalam sampai 50% pada rata-rata tarif MFN di dalam impor komoditas yang bernomor maksimum (106) dari negara-negara di kawasan tersebut, kemudian diikuti oleh Pakistan 10-20% dalam 35 komoditas, Bangladesh 10% dari 12, dan Bhutan 15% dalam 11 komoditas. Penyelesaian dari putaran SAPTA yang kedua menghasilkan pertukaran dari konsesi tarif sebanyak 1972 jenis. Di luar ini, India telah menawarkan konsesi (kelonggaran), pada 911 jenis tarif dan menerima kelonggaran pada 456 jenis tarif sampai pada level 6 digit. Negosiasi SAPTA putaran ketiga juga telah diselesaikan terhadap pendalaman dan pembesaran yang lebih jauh dari pertukaran konsesi dan penghilangan hambatan non-tarif. Sampai pada putaran ketiga, India telah menyediakan kelonggaran dengan total 2565 jenis tarif.

Fungsi penting SAPTA adalah seperti yang dimandatkan para pemimpin SAARC untuk menciptakan kawasan perdagangan bebas menjelang tahun 2001. Sudah ada bagian SAARC yang ditugaskan untuk mengawasi pencapaian tujuan penting tersebut berdasarkan waktunya. Komite dalam Kerjasama Ekonomi (CEC), yang dipimpin oleh Sekretaris Perdagangan yang dihormati negara-negara anggota, ada di dalam forum di bawah SAARC untuk mematangkan pertimbangan ukuran-ukuran yang akan diambil untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan perdagangan intra-kawasan. Rapat CEC di diadakan di negara yang sedang mengepalai SAARC. Beberapa langkah telah dikerjakan untuk memfasilitasi pergerakan komunitas yang berdagang di dalam kawasan dengan cara meningkatkan prosedur visa, prosedur tarif, yang disederhanakan melalui interaksi reguler di antara anggota-anggota yang berpartisipasi, juga termasuk harmonisasi standar barang manufaktur ekspor dan kendali kualitas juga di bawah pertimbangan aktif forum SAARC. Langkah-langkah sudah diambil untuk

menciptakan lingkungan yang menyenangkan untuk promosi dan perlindungan investasi intra-kawasan.⁴¹

Selain itu, perdagangan bebas regional di Asia Selatan juga menghasilkan perdagangan bilateral karena dianggap lebih menguntungkan dibanding perdagangan dengan banyak negara sesama anggota SAARC. Contohnya adalah kerjasama perdagangan bebas India-Sri Lanka (ILFTA) yang ditandatangani pada bulan Desember 1998, dimana India setuju untuk menghilangkan tarif terhadap sejumlah 1351 produknya (ada 429 jenis produk India dalam daftar produk negatifnya akan dihilangkan kewajiban tarifnya 100% pada tahun ketiga). Sedangkan Sri Lanka memberikan kebebasan tarif pada 319 produk dan 1180 produk dalam daftar negatifnya yang tarifnya akan dihilangkan dalam tiga tahun setelah perjanjian ILFTA berjalan. Walaupun perjanjian bilateral ini tampak tidak berpengaruh banyak, namun sebenarnya keberlangsungan SAARC melalui mekanisme SAPTA menjadi terancam (terkikis).⁴²

Memang tujuan awal pembentukan SAPTA adalah untuk menghasilkan perdagangan dengan keuntungan resiprositas (menguntungkan semua pihak anggota SAARC). Namun pada kenyataannya, hambatan struktural untuk berdagang masih dirasakan di banyak negara Asia Selatan walaupun sudah ada kelonggaran tarif dan barang-barang preferensial dalam daftar perdagangan juga merupakan barang yang rendah kepentingan ekspornya, serta aturan dasar SAPTA yang mencegah tiap negara untuk memperoleh keuntungan melalui kelonggaran tarif yang ditawarkan pada rejim tersebut sehingga perdagangan yang saling melengkapi perlu untuk diciptakan.⁴³ Selain itu, terdapat ketidak-seimbangan dagang (trade imbalance), dimana India menjadi negara yang mendapatkan surplus keuntungan dari perdagangan dengan semua negara anggota SAARC,

⁴¹ *South Asian Association for Regional Cooperation*, diakses dari <http://tradeportalofindia.com/contentmgmt/Desktops2.html?compid=itpo&itemcode=1207> pada tanggal 22 Februari 2012 pukul 23.37 WIB.

⁴² Dushni Weerakoon, *Regional Economic Cooperation Under SAARC: Possibilities and Constraints South Asia* dalam Anjum Siddiqui (editor), *India and South Asia: Economic Development in the Age of Globalization*. (New York: M.E Sharpe, Inc, 2007), hal.243.

⁴³ Farooq Sobhan dan Riffat Zaman, *Trade Investment in South Asia*, di dalam Ramesh Thakur dan Oddny Wiggen (editor), *South Asia in the World: Problem Solving Perspective on Security, Sustainable Development, and Good Governance*, (Tokyo: United Nations University Press, 2004), hal.148-150.

termasuk perdagangan informal dengan Pakistan dan Bangladesh yang menyelundupkan barang produk India melalui negara-negara ketiga. Pada tahun 1990, nilai ekspor India ke semua negara anggota SAARC adalah 182 juta dollar AS, kemudian menjadi 2 miliar dolar AS pada tahun 2000. Sedangkan nilai impor India dari semua negara anggota SAARC hanya mencapai 182 juta dollar AS pada tahun 1995, dan persentase perdagangan India dengan semua anggota SAARC adalah sebesar 3% dari total perdagangannya dengan seluruh dunia, dengan surplus perdagangan sebesar 2,2 miliar dollar AS.⁴⁴

2.2.2.b Ancaman dan Kesempatan terhadap keberadaan SAPTA

Kesempatan terhadap perdagangan negarap-negara di Asia Selatan adalah keberadaan perjanjian multifiber (Multifibre Arrangement/ MFA) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004, yang berarti berakhirnya pembatasan kuota ekspor tekstil dalam perdagangan dunia. Hal ini menjadi kesempatan negara pengeskor kapas, kain, dan produk dari serat untuk memasarkan produknya, khususnya negara-negara Asia Selatan. Namun pada realitanya, berakhirnya kuota MFA tidak berarti akses pasar Uni Eropa (EU) menjadi terbuka dan bebas untuk dimasuki oleh produk dari negara Asia Selatan. India, Pakistan, dan Cina diperkirakan menjadi jawara dalam kompetisi dagang tekstil ini di pasaran internasional. Namun begitu, negara-negara LDCs di Asia Selatan, seperti Bangladesh menjadi sasaran penerapan kebijakan anti-dumping oleh India, AS, dan Brazil yang membuat Bangladesh menderita kerugian sebesar 50 juta dollar AS. Lagipula, negara-negara maju, seperti AS, memberikan insentif yang sangat besar bagi produsen tekstil domestiknya untuk meningkatkan mutu produknya sehingga mampu bersaing dalam pasar tekstil internasional. Hal ini menjadi ancaman pula bagi industri tekstil di Asia selatan yang 70% hasilnya dihasilkan oleh usaha kecil dan menengah/UKM (SMEs) dan yang tingkat daya saingnya cukup rendah (kecuali India, Pakistan, dan Sri Lanka) sehingga keberlangsungan hidup UKM tersebut sangatlah krusial.⁴⁵

⁴⁴ *Op.Cit*, Dushni Weerakoon, hal.20.

⁴⁵ *Ibid*, hal.20-22.

Selain itu, studi empiris menyatakan masa depan integrasi regional di Asia Selatan yang kurang cerah. Studi Bank Dunia tahun 1993 menyatakan syarat utama yang dibutuhkan untuk menghasilkan kesuksesan perjanjian dagang tidak hadir di Asia Selatan, yang meliputi tingginya tariff sebelum perjanjian, tingginya tingkat perdagangan di kawasan tersebut sebelum adanya kesepakatan, berbagai perbedaan struktur ekonomi di antara negara tersebut, serta hadirnya perdagangan yang komplementer daripada perdagangan yang kompetitif. Hasil studi dari Srinivasan dan Canoner (1993) dan Srinivasan (1994) dengan menggunakan model gravitas menyatakan bahwa kawasan Asia Selatan lebih baik untuk melaksanakan liberalisasi unilateral. Menurut Pigato (1997), keuntungan India akan lebih besar dibanding negara lainnya di kawasan ini melalui liberalisasi unilateral dibandingkan liberalisasi preferensial. Di sisi lain, studi Pangariya (1999) menyatakan dengan kuat bahwa integrasi perdagangan regional menginisiasikan kawasan Asia Selatan akan menghasilkan kerugian bersih dan terjadi perlambatan liberalisasi unilateral.⁴⁶

2.2.3 Kesepakatan perdagangan bebas (SAFTA) tahun 2006

Sejak awal pembentukannya, SAPTA diprediksikan akan menjadi langkah pertama menuju perpindahan kepada Kawasan Perdagangan Bebas Asia Selatan (SAFTA) yang memimpin kepada Kesatuan Tarif (*Custom Union*), Kesatuan Pasar (*Common Market*), serta kesatuan perekonomian (*Economic Union*). Pada waktu pertemuan Dewan Menteri keenambelas di New Delhi pada tanggal 18-19 Desember 1995, disepakatilah perlunya untuk mensukseskan realisasi dari SAFTA hingga pada pembentukan panitia Kelompok Pakar inter-Pemerintah (Inter-Governmental Expert Group/ IGEG) pada tahun 1996 yang bertugas untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu untuk maju menuju sebuah daerah perdagangan bebas. Kemudian, pada pertemuan Summit ke 10 di Colombo pada tanggal 29-31 Juli 1998, diputuskanlah untuk membentuk Komite Pakar (COE) untuk membuat draft sebuah kerangka kesepakatan yang komprehensif (menyeluruh) untuk mewujudkan daerah perdagangan bebas di kawasan tersebut, dengan mempertimbangkan ke-asimetris-an pembangunan dalam satu kawasan

⁴⁶ Weerakon, *Op.Cit*, hal.237-238.

dan menghasilkan pikiran tentang perlunya untuk menetapkan realisasi dan target-target yang dapat dicapai.⁴⁷

Perjanjian SAFTA ditandatangani pada tanggal 6 Januari 2004 pada pertemuan Summit SAARC keduabelas yang diadakan di kota Islamabad, Pakistan. Kesepakatan tersebut diejawantahkan pada tanggal 1 Januari 2006 dan Program Liberalisasi Perdagangan dimulai pada tanggal 1 Juli 2006. Sambil berjalannya kesepakatan itu, dibentuk pula Dewan Kementrian SAFTA (SMC) yang anggotanya adalah Menteri-menteri Perdagangan negara anggota. Untuk membantu SMC, maka dibentuklah Komite Pakar SAFTA (SCOE). SCOE diekspektasikan untuk membuat laporan kepada SMC setiap enam bulan sekali. Perjanjian SAFTA menyatakan bahwa SMC harus mengadakan rapat setidaknya setkali dalam setahun sesering yang diperlukan oleh Negara-negara yang terlibat dalam kesepakatan tersebut. Setiap negara yang terlibat dalam kesepakatan ini akan mengepalai SMC satu periode dalam setahun berdasarkan perputaran (rotasi) susunan alphabet.⁴⁸

Tabel 2.4 Perbandingan share tiap negara Asia Selatan tahun 1985-2007

Bagian Andil (share) tiap negara Anggota SAARC dalam Total Perdagangan Asia Selatan						
Persentase						
Negara	1985	1990	1995	2000	2004	2007
Afghanistan	11,4	14,5	11,1	29,7	35,3	43,1
Bangladesh	4,7	6,0	12,8	7,9	10,5	9,4
Bhutan
India	1,7	1,6	2,7	2,5	3,0	2,7
Maladewa	12,5	12,7	14,3	22,2	19,8	12,2
Nepal	34,3	11,9	14,8	22,3	47,2	60,5
Pakistan	3,1	2,7	2,3	3,6	5,0	6,6
Sri Lanka	5,5	5,6	7,8	7,4	15,1	18,9

⁴⁷ *South Asian Free Trade Area (SAFTA)*, diakses dari www.saarc/sec.org/areaofcooperation/detail.php-activity_id=5.htm pada tanggal 1 Februari 2012 pukul 19.22 WIB.

⁴⁸ *South Asian Free Trade Area (SAFTA)*, Loc.cit

...: Tidak tersedia

Sumber: *Regional Co-operation Strategy and Programme, South Asia (2006-2008)*, ADB

Dari data tabel di atas bahwa Nepal dan Maladewa memiliki andil yang cukup besar dalam total perdagangan intra-Asia Selatan, masing-masing sebesar 60,5 dan 12,2 pada tahun 2007. Namun demikian, sebenarnya nilai andil (share) dalam perdagangan kedua negara tersebut bisa lebih kecil daripada India (yang hanya tercatat sebesar 2,7 %) sebab perhitungannya adalah persentase rasio nilai perdagangan tiap negara intra-SAARC dengan ekstra SAARC.

2.2.3.a Kelebihan dan Kelemahan SAFTA

Untuk mempermudah fungsi SAFTA, pemberitahuan tarif untuk mengimplementasikan Program Liberalisasi Perdagangan (TLP) diterbitkan per waktu yang disetujui oleh negara-negara anggota. Pengurangan ukuran Daftar Sensitif adalah hal yang penting untuk meningkatkan kuantum dari perdagangan regional, usaha-sauaha yang dibuat untuk mengeluarkan produk-produk tersebut dari daftar sensitif yang ada di dalam kepentingan-kepentingan ekspor terhadap negara-negara anggota untuk perdagangan di dalam kawasan Asia Selatan tersebut. Adapun nilai arus perdagangan intra-kawasan SAARC, kecuali data dari Bhutan, mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:⁴⁹

Tabel 2.5 Nilai Arus Perdagangan Intra-SAARC tahun 2006-2011

Tahun	Bangladesh	India	Maladewa	Pakistan	Sri Lanka	Total (dollar AS)
2006	0,00	0,00	14.000,15	55.324	0,00	69325, 15
2007	15.273.177,84	3.783.410,31	0,00	576.164,99	19.828,02	19652581,16
2008	98.316.963,16	8.984.420,68	0,00	31.796.718,51	40.789,22	139138891,57
2009	199.786.454,72	315.256.736,34	0,00	43.509.984,90	608.623,96	559161799,92
2010	236.711.501,24	276.933.455,74	0,00	56.119.007,59	517.566	570281530,57
2011			0,00		74.609	74609,00

⁴⁹ SAFTA, *Loc.Cit*

Total Dollar AS	550.088.096,96	604.958.023,07	14.000,15	132.057.199,99	1.261.416,20	1.288.378.737,37
-----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	--------------	------------------

Dari tabel di atas, kita dapat melihat dapat nilai ekspor f.o.b (free on board atau sampai pengapalan dan pengantaran oleh sipenjual) mencapai total 1,3 milyar dollar AS. Sebenarnya nilai ini perdagangan ini bisa ditingkatkan mengingat besarnya potensi jumlah penduduk sebagai pasar untuk menjual barang dan sebagai sarana industri pada karya (memerlukan banyak tenaga buruh). Namun demikian, perjanjian perdagangan bebas bilateral, seperti kerjasama Pakistan dan Sri-Lanka yang dijalankan pada bulan Juni 2005 bisa menjadi hambatan bagi pelaksanaan SAFTA, termasuk indikasi bahwa India dan Sri Lanka akan meningkatkan hubungan perdagangan bebas mereka dengan Bangladesh di masa yang akan datang⁵⁰.

Terlebih lagi, yang menjadi kekurangan dalam mekanisme perdagangan bebas SAFTA sehingga mendorong beberapa eksportir kecil untuk lebih memilih perdagangan ilegal (informal) disebabkan karena tiga faktor di luar SAFTA, yaitu kebijakan domestik negara anggota SAARC, biaya transaksi, dan biaya transportasi. Memang sebagian besar negara anggota SAARC sudah mulai menurunkan tarif hambatan impor negaranya, namun tidak diikuti oleh tiga faktor di atas. Pertama, kebijakan domestik tiap negara yang menyimpang (tidak sinkron) dari kebijakan dalam negeri tiap negara, seperti kebijakan fiskal dalam hal struktur pajak yang tetap tinggi, reservasi yang lazim terhadap 800 jenis produk dari sektor kecil. Hal ini menyebabkan perusahaan besar yang sudah memproduksi produk tersebut tidak dapat meningkatkan kapasitasnya, terutama di negara India, sehingga perusahaan-perusahaan besar India beroperasi di Nepal dan Sri Lanka. Penyimpangan kebijakan domestik juga mencakup pengaturan harga dalam sistem distribusi publik serta kurangnya subsidi domestik terhadap para produsen domestiknya membuat jalur informal menjadi pilihan untuk mengurangi biaya perdagangan yang tinggi. Faktor kedua adalah tingginya biaya transaksi, seperti urusan administrasi (official) sehingga membuat para eksportir kecil

⁵⁰ *Op.Cit*, Dushni Weeraloon, hal.244.

memilih untuk berdagang secara informal. Faktor ketiga adalah biaya transportasi, dimana kurang memadainya sistem transportasi dan sistem transit (pengapalan, kereta api, dokumen lambat berjalan, dll), kurangnya jalan penghubungan antar-negara seperti antara India dan Nepal sehingga membuat biaya transportasi menjadi sangat mahal.⁵¹

Selain karena alasan di atas, perdagangan informal juga mengembangkan mekanisme kelembagaan yang efisien untuk menegakkan kontrak, arus informasi, pengurangan dan *sharing* risiko dalam perdagangan. Berbagai studi menyatakan bahwa pedagang-pedagang informal juga menyediakan solusi yang lebih baik untuk menghindari peraturan yang kurang dan tidak efisien melalui jalur perdagangan formal, khususnya dalam penelitian di perbatasan India-Nepal.⁵²

2.2.3.b Ancaman dan Kesempatan terhadap keberadaan SAFTA

Kerjasama *Cancun Ministerial*, terutama di bidang agrikultur, akhirnya berakhir pada tahun 2003. Kurangnya dampak positif dari kerjasama multilateral yang juga beranggotakan negara-negara anggota SAARC terhadap peningkatan arus perdagangan ekonomi ini membuat India mengikuti pendekatan dua-jalur (*two-track approach*) dalam beberapa tahun terakhir ini. Bukannya, berusaha untuk mempererat kerjasama intra-kawasannya, malah membuat pilihan kerjasama dua jalur ini menjadi menarik. Di satu sisi, India berusaha untuk mempengaruhi negosiasi perdagangan WTO, namun di sisi lain ia juga melibatkan diri di dalam negosiasi perdagangan secara bilateral dan regional. Contohnya adalah kerjasama perdagangan bebas (FTA) India dengan MERCOSUR, Singapore, Thailand (untuk menciptakan sebuah kelompok negara-negara Asia Timur yang luas), serta dengan Mesir.⁵³ Tentu saja hal ini bisa

⁵¹ Nisha Taneja, "Informal Trade in SAARC Region", Jurnal *Economic and Political Weekly* vol.36, no.11 diakses dari <http://www.jstor.org/stable/4410401> pada tanggal 6 Oktober 2011 pukul 15.23 WIB.

⁵² Nisha Taneja dan Sanjeb Pohit, "India's Informal Trade with Nepal", *Economic and Political Weekly*, vol.36 no.25 tahun 2001, diakses dari www.jstor.org/stable/4410778 tanggal 16 Februari 2011 pukul 12.19 WIB.

⁵³ Pradeep S. Metha dan Pranav Kumar, "South Asian and RTAs: Option in the Wake of Cancun Fiasco", presentasi makalah pada peringatan 10 tahun ASARC 27-28 April 2004 di University House, Australian National University, Canberra, diakses dari www.crawford.anu.edu.au/.../WP2004_11.pdf pada tanggal 19 April 2012 pukul 10.57 WIB.

berdampak negatif terhadap terkikisnya komitmen dan prinsip SAARC untuk mendahulukan kerjasama intra-regional dibanding kerjasama multilateral dan bilateral. Walaupun begitu, bisa saja dengan kebijakan *look-east* (merangkul negara-negara di Asia Timur seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan) dalam hal kerjasama ekonomi-perdagangan, seperti yang dilakukan oleh India, akan membuat negara-negara di Asia Selatan semakin tertantang untuk lebih merekatkan kerjasama di antara mereka karena pasti semakin tingginya tingkat kompetisi perdagangan sehingga mendorong tiap-tiap negara anggota SAARC untuk lebih meningkatkan tingkat daya saing negaranya sehingga dapat meraih keuntungan dari kerjasama tersebut.

Peluang lain untuk meningkatkan keberhasilan proses liberalisasi perdagangan di kawasan tersebut adalah perlunya mempromosikan investasi regional. Hal ini diperlukan karena ekspansi perdagangan di kawasan Asia selatan tidak mungkin hanya mengandalkan mekanisme SAPTA dan SAFTA apabila tidak mengikut-sertakan kerjasama untuk mempromosikan arus investasi. Selain itu, Asia Selatan dapat memfasilitasi arus investasi yang masuk dengan membangun *SAARC Investment Area* yang sama dengan *ASEAN Investment Area*. Peningkatan arus perdagangan berakibat wajar terhadap peningkatan arus investasi, inti perdagangan-investasi penting bagi negara anggota SAARC yang terlihat kurang dalam hal kemampuan produksi dan ekspornya. Kerjasama investasi juga membutuhkan integrasi keuangan untuk meyakinkan bahwa saling terhubungnya sistem perbankan dan nilai tukar yang diharmonisasikan. Kerjasama investasi juga mencakup kebijakan kompetisi, serta harmonisasi ekonomi makro dan integrasi keuangan.⁵⁴

2.2.4 Konflik dan Kerjasama Politik-Keamanan di Asia Selatan

Namun permasalahan yang muncul di kawasan tersebut dan kurang terselesaikan dengan baik melalui forum SAARC adalah instabilitas politik yang telah menghasilkan tiga peran antara India dan Pakistan, gerakan separatis di Sri Lanka oleh kelompok Mancan Tamil, ditolaknya sistem demokrasi di Nepal, serta ketidak-stabilan politik Bangladesh. Perang terhadap terorisme di Pakistan dan

⁵⁴ *Ibid*, Farooq Sobhan dan Riffat Zaman, hal.166-167.

provinsi perbatasan utara-barat Pakistan, dan belum terselesaikannya masalah Kashmir telah membuat gejolak dan ketidak-stabilan politik di kawasan tersebut. Ukuran langsung ketidak-stabilan politik ini adalah proporsi pengeluaran militer dalam perekonomiannya yang kira-kira mencapai 2,7 % dari GDP dibandingkan dengan 1% pengeluaran kesehatan, serta 3,7% untuk pendidikan, terutama negara Pakistan, sehingga terjadi perlombaan senjata antara Pakistan dan India.⁵⁵

Di bawah ini adalah kronologi berbagai konflik besar di kawasan Asia Selatan dari tahun 1985-2004 dan kesepakatan untuk menyelesaikannya⁵⁶:

Tabel 2.6 Berbagai Jenis Konflik Bilateral di Asia Selatan

Konflik intra-negara				
Tahun	<i>India–Bangladesh</i>	<i>India–Sri Lanka</i>	<i>India–Nepal</i>	<i>India–Pakistan</i>
1985	Konflik Muhurichar Island			
1987		India mengirim IKPF ke Tamil Nadu untuk melucuti kelompok Tamil		
1988			Keterangan menyebabkan ketidaksetujuan dalam kesepakatan transit	
1989		Pengeluaran IPKF atas permintaan pemerintah Sri Lanka		
1991		India memboikot Pertemuan tahunan (summit) SAARC di Colombo		
1998				Kedua negara melakukan uji coba senjata nuklir secara bersamaan
1999				Konflik Kargil-Kashmir yang dipicu oleh India

⁵⁵ Ed. Anjum Siddiqui, *India and South Asia: Economic Development in the Age of Globalization*. (New York: M.E Sharpe, Inc, 2007), hal.18.

⁵⁶ Shaheen Rafi Khan (editor), *Regional trade integration and conflict resolution*, (Oxon: Routledge, 2009).

2001	Konflik perbatasan Desa Pyrdiwah			Serangan teroris di gedung parlement India dan menyalahkan Pakistan. Hal ini menyebabkan kedua negara mengarahkan pasukan di sepanjang perbatasan
Konflik antar negara				
	<i>Sri Lanka</i>	<i>India</i>	<i>Maladewa</i>	<i>Pakistan</i>
1983	Menyebarnya anti Tamil yang membuat kekacauan dan diikuti dengan matinya tentara pada saat penyerangan LTTE secara tiba-tiba			
1984		Perdana Menteri Indira Gandhi dibunuh oleh pasukan pengawal Sikh setelah memerintahkan pasukan untuk mengusir para militan Sikh dari Amritsar		
1988			Pencobaan kudeta yang digagalkan oleh pasukan India	
1990		Gerakan separatis Kashmiri mendapatkan momentum		
1992		Kericuhan Hindu-Muslim di Ayodhya menyusul penghancuran Masjid Babri		
1993	Presiden Premadasa terbunuh di dalam serangan bom LTTE			
1999				Prime Minister Nawaz Sharif disingkirkan lewat kudeta militer yang dipimpin oleh General Pervez Musharraf

2004				Konflik Waziristan dan Balochistan
Sumber: Kompilasi SDPI <i>in-house</i> , Agustus 2006				

Tabel 2.7 Kronologi dari Kesepakatan Bilateral Kunci di Asia Selatan

Negara	Bentuk dari Kesepakatan dan Tahun
India–Pakistan	Perdamaian (Place of Worship) – 1953, 1955 Perbatasan – 1948, 1952, 1955, 1958, 1959, 1960, <i>Indus Water Treaty</i> (1960), 1965, 1965, 1966, 1972, 1974, 1991, 1999 Konflik – 1965, 1966, 1971, 1972, 1973, 1974(2), 1975, 1988 Perdagangan – 1947, 1957, 1960, 1961, 1963, 1974, India memperpanjang MFN, Pakistan memundurkannya
India–Bangladesh	Perbatasan – 1972(2), 1974, 1976, Sumber daya alam – Farakka 1977, 1982, 1983, 1984, Pembagian Air Sungai Gangga (1996) Perdagangan – 1972, 1973, 1974, 1980, 1981, 1982, 1988 FTA India tertarik, Bangladesh was-was terhadap proteksionisme
India–Bhutan	Perdamaian–1949 Perdagangan – <i>Trade and Commerce</i> (1995)
India–Maladewa	Perbatasan – 1976(2) Perdagangan – 1975, 1981
India–Nepal	Perdamaian – 1950, 1953, 1954 Sumber daya alam – 1958, 1987, <i>Mahakali Treaty</i> (1996) Trade – 1950, 1954, 1958, 1959, 1960, 1964, 1966, 1971, 1973, 1976, 1978(3), 1985, 1987, 1990, 1991(3), 1996, 1999, 2001
India–Sri Lanka	Perdamaian – 1954, 1986, 1987, 1989 Perbatasan–1964, 1974, 1986 Perdagangan – FTA (1998), <i>Credit Agreement</i> (2001)

Sumber: South Asia Foundation www.southasiafoundation.org; Bilaterals www.bilaterals.org

Dari data di atas dapat dilihat bahwa sangat banyak konflik yang terjadi di antara negara-negara anggota SAARC selama kurun waktu tiga puluh tahun. India menjadi negara besar yang banyak terlibat dalam konflik dengan negara tetangganya, terutama dengan Pakistan. Jenis konflik yang terjadi adalah seputar daerah perbatasan dalam hal sumber daya alam, perdagangan, serta keamanan karena alasan kedaulatan negara.

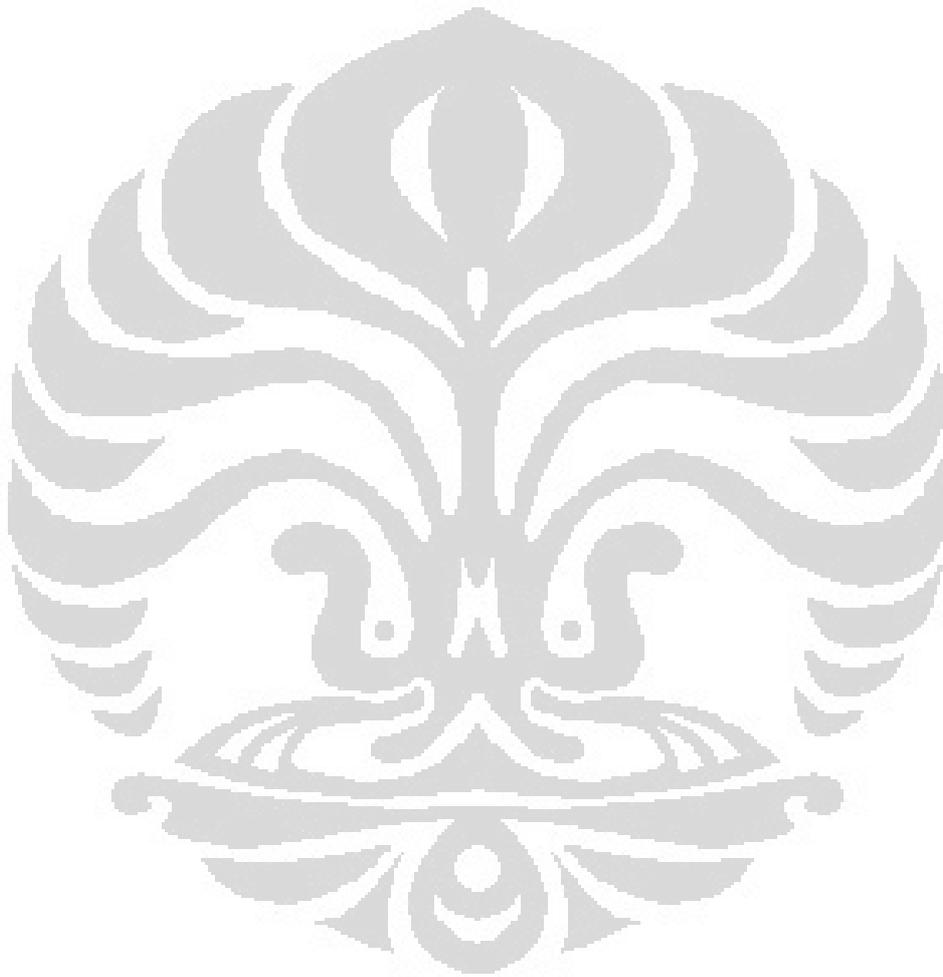
2.2.5 Dinamika Ekonomi-Politik Internasional serta Pengaruh AS dan Cina di kawasan Asia Selatan

Realita kerjasama ekonomi-politik Asia selatan juga sangat dinamis. Pengaruh politis lebih kuat dibandingkan ekonomi selama lima puluh tahun belakangan ini. Pakistan dan India menjadi dua negara yang cukup dominan di kawasan ini. Walaupun secara ekonomi India dan Pakistan memang dominan di kawasan Asia selatan, tetapi tidak dalam pengaruh politiknya. Dalam hubungan kerjasama klien-patron, hanya Bhutan-lah yang menjadi negara kliennya India, sedangkan Pakistan, Sri Lanka, Nepal dan Bangladesh memilih kebijakan luar negeri yang independen. Terdapat beberapa negara luar, seperti Cina dan AS yang juga memiliki pengaruh terhadap kawasan Asia Selatan. AS memiliki sekutu India dan Pakistan (walaupun sudah sedikit menurun tingkat kedekatannya dengan AS karena alasan untuk menghormati kemampuan Pakistan dalam menyediakan fungsi dasarnya sebagai sebuah negara). Kedekatan AS dan Pakistan terjalin secara khusus pasca peristiwa 9/11 dalam hal perang terhadap terorisme, pengayaan program nuklir, demokratisasi, dan perbaikan hubungan Pakistan yang kurang harmonis dengan India. AS juga bekerjasama dengan Afghanistan sejak tahun 2002 dalam hal pemberantasan Al-Qaeda, menjaga keadaulatan, serta kesejahteraan dan stabilitas. Selain itu, terdapat Cina yang banyak membantu beberapa negara di Asia Selatan dalam hal keamanan (militer) untuk menghadapi terorisme & *insurgency*, seperti menjadi penyedia senjata bagi Nepal, Bangladesh, dan Pakistan. Namun demikian, China memiliki sedikit pengaruh politis terhadap tiga negara tersebut secara khusus, apalagi di kawasan Asia Selatan secara umum. Memang Cina sedang mencari pasar untuk pertumbuhan ekonominya bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi India yang membuat mereka akhirnya bersama-sama berusaha untuk mempromosikan perdagangan dan melakukan hubungan dengan negara-negara tetangganya.⁵⁷

Dengan demikian, AS dan China sama-sama sadar akan pentingnya keamanan Asia Selatan terhadap kepentingan mereka, dimana AS berkepentingan

⁵⁷ Edelgart Mahant, *The Political Economy of South Asia*, dalam Anjum Siddiqui (editor), *India and South Asia: Economic Development in the Age of Globalization*, (New York: M.E Sharpe, Inc, 2007), hal. 51-52.

dalam hal perang terhadap teror dan China untuk kemudahan kepentingan ekonomi, terutama perdagangan (melalui pembangunan jalan raya atau infrastruktur yang menghubungkan antara China dengan beberapa negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan wilayahnya).



BAB III

ANALISIS EMPAT DETERMINAN UTAMA KEUNTUNGAN KOMPETITIF BANGSA PORTER

3.1 Produk Komparatif dari tiap-tiap Negara SAARC

Tabel 3.1 Indeks Keuntungan Komparatif (IRCA) Lima Negara di Asia Selatan tahun 1980-2009⁵⁸

Negara	Industri Manufaktur	Tahun				
		1980	1990	2000	2005	2009
Bangladesh	Besi dan Baja	0,000	0,002	0,000	0,131	0,158
	Bahan-bahan kimia	0,192	0,192	0,128	0,189	0,122
	Obat	-	-	0,020	0,075	0,088
	Produk otomotif	0,038	0,003	0,001	0,026	0,013
	Perlengkapan kantor dan Telekomunikasi	0,004	0,000	0,004	0,005	0,055
	Perlengkapan transportasi dan mesin	0,068	0,048	0,063	0,100	0,124
	Tekstil	20,189	6,780	2,523	3,889	4,202
	Pakaian	0,112	12,273	25,914	27,919	28,138
	Manufaktur lainnya	0,683	0,361	0,141	0,376	0,566
India	Besi dan Baja	0,305	0,439	1,401	1,709	1,474
	Bahan-bahan kimia	0,601	0,862	1,129	1,090	0,962
	Obat	-	-	1,598	1,041	1,022
	Produk otomotif	0,000	0,119	0,153	0,299	0,430
	Perlengkapan kantor dan Telekomunikasi	0,052	0,117	0,060	0,077	0,216
	Perlengkapan transportasi dan mesin	0,000	0,307	0,293	0,450	0,611
	Tekstil	5,267	4,009	5,391	4,264	3,314
	Pakaian	3,929	4,491	4,596	3,250	2,787
	Manufaktur lainnya	2,396	0,854	0,083	1,302	3,060
Nepal	Besi dan Baja	0,000	0,000	0,000	0,004	5,455
	Bahan-bahan kimia	0,000	0,048	0,831	0,572	0,606
	Obat	-	-	0,537	0,000	0,069
	Produk otomotif	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001
	Perlengkapan kantor dan Telekomunikasi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003

⁵⁸ Abu Hasan, "International Business Relations of Emerging India with South Asian Neighbors: Analysing of Manufacturing Export", Dhaka University, diakses dari www.freit.org/WorkingPapers/Papers/TradePatterns/FREIT386 pada tanggal 14 Maret 2012 pukul 00.18 WIB.

	Perlengkapan transportasi dan mesin	0,000	0,000	0,025	0,021	0,051
	Tekstil	9,829	13,344	9,296	11,091	17,696
	Pakaian	0,589	7,768	8,510	3,990	4,071
	Manufaktur lainnya	0,635	0,518	0,095	3,361	0,075
Pakistan	Besi dan Baja	0,000	0,002	0,043	0,137	0,182
	Bahan-bahan kimia	0,000	0,052	0,718	0,289	0,317
	Obat	-	-	0,276	0,185	0,257
	Produk otomotif	0,000	0,005	0,008	0,016	0,028
	Perlengkapan kantor dan Telekomunikasi	0,008	0,008	0,005	0,040	0,018
	Perlengkapan transportasi dan mesin	0,000	0,051	0,055	0,076	0,119
	Tekstil	12,383	15,672	20,590	22,636	21,789
	Pakaian	1,977	5,757	7,761	8,458	7,515
	Manufaktur lainnya	0,903	0,680	0,554	0,723	1,137
	Sri Lanka	Besi dan Baja	0,000	0,020	0,000	0,021
Bahan-bahan kimia		0,000	0,019	0,000	0,123	0,088
Obat		-	-	0,000	0,153	0,009
Produk otomotif		0,000	0,024	0,000	0,033	0,034
Perlengkapan kantor dan Telekomunikasi		0,006	0,029	0,000	0,080	0,040
Perlengkapan transportasi dan mesin		0,000	0,137	0,000	0,195	0,267
Tekstil		0,110	0,431	1,843	1,098	1,182
Pakaian		5,122	10,641	16,922	17,057	16,112
Manufaktur lainnya		2,219	0,861	1,311	1,238	1,543

Tabel di atas merupakan indeks perbandingan tingkat keunggulan komparatif lima negara anggota SAARC (melalui metode Revealed Comparative Advantage Index), selain Bhutan dan Maladewa, dimana semakin besar angkanya maka semakin besar pula tingkat keuntungan komparatif dari jenis barang manufaktur yang diproduksi oleh masing-masing negara. Indeks ini menjadi salah satu sumber utama pemilihan produk komparatif (unggulan) dari tiap negara anggota SAARC dan akan dianalisis sejauh mana produk ini dikreasikan menjadi produk kompetitif. Industri pada produk barang komparatif di atas adalah produk yang menghasilkan jumlah ekspor yang signifikan atau investasi asing langsung yang menarik banyak kekuatan dan keahlian yang diciptakan di dalam negara asal. Oleh karena itu, produk komparatif utama yang akan dianalisis secara

mendalam dari tujuh negara anggota SAARC dalam penelitian ini ada di bawah ini.

- India : Tekstil (T&C) dan Peralatan Teknologi Informatika (TI)
 Pakistan : Tekstil (T&C)⁵⁹
 Bangladesh : Tekstil (T&C)⁶⁰
 Sri Lanka : Tekstil (T&C), dan Teh⁶¹
 Nepal : Tekstil (T&C) dan Pariwisata
 Bhutan : Industri Pariwisata dan Tenaga air (hydropower)
 Maladewa : Industri Pariwisata dan Perikanan.

Dari daftar di atas, dapat diketahui bahwa tidak semua negara industri di Asia Selatan menghasilkan produk barang yang menghasilkan keuntungan komparatif, tetapi produk jasa juga. Khusus untuk membandingkan tingkat daya saing produk tekstil dan kain, yang adalah hasil produksi utama (ekspor andalan) India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, dan Nepal, akan dilakukan dengan cara memperbandingan produktivas⁶² beberapa industri domestik di tiap-tiap negara

⁵⁹ Khalid Amin, *Regional Cooperation in South Asia: Pakistan Perspective*, dalam Sadiq Ahmed, et.al, *Promoting Economic Cooperation in South Asia: Beyond SAFTA*, (Washington: SAGE, 2010), hal.329.

Sektor industri tekstil berkontribusi sebanyak lebih dari 67% dari total ekspor Pakistan dan diperkirakan akan bekerja dengan baik pada rejim perdagangan bebas. Empat tahun belakangan ini, sektor tekstil Pakistan telah menginvestasikan 4 miliar dolar AS untuk membawa produksinya sejajar dengan kualitas dunia. Produk tekstil ini adalah baju tidur, pakaian rajut, dan pakaian jadi.

⁶⁰ Mohammed Ziaul Haider, "Competitiveness of the Bangladesh Ready-made Garment Industry in Major International Market", *Asia-Pacific Trade and Investment Review* (vol.3, No.1 June 2007) diakses dari www.unescap.org/tid/publication/aptir2456.pdf pada tanggal 5 April 2012 pukul 14.08 WIB.

Pada tahun 1976, persentase ekspor produk garmen siap pakai (Ready-made Garment) Bangladesh terhadap total nilai pendapatan ekspornya hanya sebesar 0,001% dan berubah menjadi 75% pada tahun 2005, yang nilainya mencapai 6,9 miliar dolar AS pada tahun 2005, sama dengan 2,5% dari nilai total global (276 miliar dolar AS). Industri garmen ini tumbuh rata-rata sebesar 15% per tahun selama 15 tahun lalu. Jenis RMG dari Bangladesh adalah kain tenun rajutan, tekstil buatan rumahan & tekstil buatan pabrik (kaus, celana panjang, jaket, sweater, dll).

⁶¹ *A competitiveness Strategy for Sri Lanka's Tea Industry*, diakses dari www.pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADT760.pdf pada tanggal 13 Juni 2012 pukul 14.58 WIB

Teh adalah ekspor andalan Sri Lanka sampai tahun 1980-an ketika kontribusinya melebihi industri pakaian. Setelahnya, industri pakaian menjadi sektor andalan, walaupun kemudian kontribusi nilai sektor pakaian turun menjadi 50% dari nilai ekspor total, sebaliknya kontribusi teh naik menjadi 75-85% dari nilai ekspornya.

⁶² *Op.Cit*, Porter, hal. 808.

dalam menghasilkan produk yang harganya lebih murah dengan kualitas dan jenis produk tersebut berdasarkan empat determinan Porter selama tahun 1996-2010. Pada tahun 2007, produk T&C adalah 80% dari ekspor Bangladesh dan mempekerjakan sebanyak 5 juta penduduknya; 55% dari total ekspor Pakistan dan mempekerjakan 15 juta penduduknya; 45% dari total ekspor Sri Lanka dan mempekerjakan 1,8 juta penduduknya; serta sekitar 12% dari total ekspor India dan mempekerjakan 35 juta penduduknya.⁶³

Sedangkan analisis tingkat daya saing barang dan jasa untuk Bhutan dan Maladewa akan lebih menekankan dari sisi kebijakan pemerintah dalam bidang pariwisata dan *hydropower* ditambah dengan kreativitas pelaku industri pariwisata domestiknya dari tahun 1996-2010. Di bawah ini adalah analisis mengenai empat determinan utama Porter, yang terdiri dari kondisi faktor-faktor produksi, permintaan domestik dan internasional, keberadaan industri pendukung, serta strategi dan persaingan perusahaan domestik.

3.2 Kondisi Faktor-faktor Produksi Domestik

Faktor-faktor yang dianugerahkan terhadap suatu bangsa/ negara memainkan peranan penting dalam keuntungan kompetitif perusahaannya, terutama untuk industrinya. Faktor-faktor produksi tersebut dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu. Pertama, sumber daya manusia (SDM) yang mencakup kuantitas, kemampuan, dan biaya perorangan yang juga diklasifikasikan sebagai pekerja yang terlatih dan berpendidikan. Kedua, sumber daya fisik, seperti kelimpahannya, kualitas, kemampuan untuk diaksesnya, biaya tanah, air, mineral dari suatu negara, termasuk kondisi cuaca yang juga meliputi lokasi dan ukuran geografis negara tersebut yang berimplikasi terhadap biaya dan kemudahan untuk saling mempertukarkan kebudayaan dan bisnis. Ketiga, sumber daya pengetahuan, yang mencakup cadangan IPTEK (dalam berbagai disiplin ilmu) dan pengetahuan pasar yang menghasilkan barang dan jasa dari negara itu. Keempat, sumber daya

Produktivitas adalah penghasilan yang didapatkan melalui pekerjaan per unit waktu (yang menentukan upah) dan hasil kembali yang didapatkan melalui modal. Dua indikator ini adalah dua sumber pendapatan nasional.

⁶³ *Potential Supply Chains in Textiles and Clothing Sectors in South Asia: An Exploratory Study*, (oleh UN, UNCTAD, dan Commonwealth Secretariat) diakses dari www.archive.unctad.org/en/docs/ditctncd2011d3_en pada tanggal 3 Mei 2012 pukul 13.45 WIB

modal (berasal dari utang, surat berharga, obligasi) yang tersedia untuk membiayai industri di negara itu. Kelima, infastruktur menurut jenis, kualitas, dan biaya pengguna yang mengakibatkan kompetisi di dalam sistem transportasi, sistem komunikasi, pembayaran atau transfer dana, pengurusan kesehatan.⁶⁴

Keuntungan kompetitif dari faktor-faktor tersebut bergantung pada seberapa efisien dan efektif pengerahannya. Hal ini merefleksikan pilihan-pilihan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan suatu negara untuk menggerakkan faktor-faktor tersebut, termasuk teknologinya, untuk menciptakan produktivitas. Ada dua jenis tingkatan faktor-faktor yang penting, yaitu faktor dasar meliputi sumber daya alam, iklim, lokasi, buruh yang tidak punya keahlian dan semi keahliannya. Faktor-faktor tingkat atas (*advanced factors*), seperti infrastruktur komunikasi data digital modern, serta pekerja yang berpendidikan. Selain itu ada kreasi faktor yang mekanismenya meliputi lembaga pendidikan publik dan swasta, lembaga litbang pemerintah, rumah sakit komunitas, dan lainnya yang menyatakan bahwa bangsa akan semakin kompetitif dengan kualitas kreasi faktor yang tinggi.⁶⁵

Negara	Keterangan	Kategori
Bangladesh (Produksi RMG)	Faktor dasar: Bangladesh kekurangan sumber daya alam sebagai bahan mentah untuk memproduksi RMG dan harus diimpor. Faktor <i>advance</i> : Infastruktur masih kurang mencukupi. Lembaga pendidikan yang menghasilkan lulusan dalam sektor tekstil secara teknis adalah <i>Bangladesh College of Textile Technology</i> , pemerintah juga sudah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan status lembaga pendidikan itu menjadi <i>Textile University</i> serta akan mendirikan sekolah teknik dengan tekstil sebagai sebuah subyek dalam kurikulumnya sejak tahun 2005 s/d 2015. ⁶⁶ Walaupun begitu, Bangladesh masih kekurangan	Rendah

⁶⁴ *Ibid*, Porter, hal.74-75

⁶⁵ *Ibid*, hal.76-80.

⁶⁶ Mr.Toufique G.K.M Hassan, "Bangladesh Textile Industry", diakses dari www.unescap.org/tid/publication/tipub2500_pt2chap1 pada tanggal 14 Mei 2012 pukul 16.19 WIB.

	tenaga ahli serta banyak buruh yang dibayar murah (paling murah dibandingkan dengan gaji buruh di seluruh Asia Selatan).	
Bhutan (Jasa Pariwisata dan Produksi Hydropower)	<p>Faktor dasar: kaya akan sumber daya alam tenaga air (hydropwer) yang berasal dari pegunungan Himalaya, tetapi kurang modal tenaga ahli untuk memberdayakannya, serta kondisi gunung yang tidak rata. Untuk pariwisata, alam Bhutan juga masih sangat alami, termasuk flora, fauna, dan biodiversitas yang unik, sehingga sangat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan, namun kurang infastruktur yang mendukung.</p> <p>Faktor <i>advance</i>: Beberapa penghambat dalam pertumbuhan ekonomi Bhutan, seperti infrastruktur yang tidak mencukupi, biaya transportasi yang mahal, sulitnya akses terhadap keuangan, kurangnya kemampuan manajemen, minimnya tenaga profesional, tingkat produktivitas buruh yang rendah, ketidakhadiran kapabilitas litbang.⁶⁷</p>	Tinggi
India (Industri Tekstil dan IT)	<p>Faktor dasar: India memiliki hasil panen kapas yang cukup melimpah sebagai bahan baku industri tekstil domestiknya.</p> <p>Faktor <i>advance</i>: India memiliki potensi yang besar dalam pengembangan Litbang dan inovasi. Asosiasi Semikonduktor India memperkenalkan ide <i>ISA Technovation</i> di berbagai universitas dan lembaga penelitian untuk melembagakan kesadaran paten dalam sektor TI. Untuk industri pakaian, banyak perancang India yang dilatih di <i>National Institute of Fashion Technology</i> (India) dan bekerja di luar negeri, seperti di Bangladesh.⁶⁸</p> <p>Pusat pengembangan penjualan aplikasi bisnis kemasan banyak mengalami peningkatan tanggungjawab. Hal ini menyebabkan</p>	Tinggi

⁶⁷ Laporan *Economy Development Policy of the Kingdom of Bhutan 2010* (Royal Government of Bhutan) diakses dari www.rtm.gnhc.gov.bt/RTMdoc/EDP_2010 pada tanggal 26 Mei 2012 pukul 11.41 WIB.

⁶⁸ Meenu Tewari, *Deepening Intraregional Trade and Investment in South Asia The Case of Textiles and Clothing Industry*, (Working Paper No.213, April 2008, Indian Council of Research International Economic Relations) diakses dari www.adb.org/Documents/Trade/chap03.p pada tanggal 15 Maret 2012 pukul 12.38 WIB

	<p>banyak perusahaan menerapkan <i>offshoring/outsourcing</i> untuk pengembangan aplikasi pesanan (AD) sehingga menghasilkan efek yang baik dalam menghadapi kompetitor asing dari Eropa Timur, Cina, dan Vietnam. Hasilnya, India lebih populer dalam pengembangan aplikasi (AD), dimana salah satu perusahaan domestiknya bernama SSA yang membangun pusat penelitiannya di Mumbai tahun 1989 dan di Hyderabad tahun 1995. perusahaan penjual AD lainnya adalah Oracle, SAP, dan i2 Technologies.⁶⁹</p> <p>Untuk industri garmennya, industri skala kecil yang berdiri sendiri masih menjadi sektor dominan di India, namun India memiliki tingkat kapabilitas mesin pemintal dan teknisi yang lebih baik dibandingkan negara lain di kawasan Asia Selatan.</p>	
<p>Maladewa (Jasa Pariwisata dan Industri Perikanan)</p>	<p>Faktor dasar: Maladewa akan negara kepulauan yang sangat menarik bagi wisatawan, dimana kondisi alamnya sangat alami.</p> <p>Faktor <i>advance</i>: Hampir di tiap pulau besar memiliki bandara udara sehingga sangat memudahkan untuk berwisata ke daerah ini serta kapasitas perhotelan (jumlah tempat tidur untuk menampung wisatawan serta kualitas pelayanan) telah ditingkatkan dari tahun ke tahun. Kekurangannya adalah kekurangan terhadap tenaga manusia yang berkualitas dan ahli. Para ahli yang tersedia tidak digunakan dengan efisien, dimana penduduk yang memiliki kualifikasi tidak dipekerjakan karena kurang investasi atau mereka terlalu banyak dipekerjakan sehingga pemerintah harus mengimpor tenaga kerja ekspatriat (pekerja, dokter, kontraktor, akuntan, guru, dalam jumlah besar dan perawat sehingga mengakibatkan transfer devisa ke luar negeri).⁷⁰</p> <p>Maladewa merupakan negara kepulauan dengan sumber ikan</p>	<p>Tinggi</p>

⁶⁹ Jati K. Sengupta, *India's Economic Growth: A Strategy for the New Economic*, (New York: Palgrave Mac millan, 2005), hal.126-127.

⁷⁰ The Government of Maladewa, (3rd UN Conference on LDCs, 14-20 Mei 2001) diakses dari www.unctad.org/fr/docs/acconf191inf3_enfrsp.pdf pada tanggal 22 Mei 2012 pukul 14.42 WIB

	<p>tuna dan jenis lain yang melimpah, khususnya di jalur laut EEZ (Zona Ekonomi Eksklusif). Sektor perikanan Maladewa juga terbantu dengan pengembangan transportasi udara dan laut yang dikembangkan untuk sektor pariwisatanya.⁷¹</p>	
<p>Nepal (T&C) dan Produksi Hydropower</p>	<p>Faktor dasar: Topografi Nepal menyebabkan investasi asing untuk membangun jalan menjadi sangat sulit dilaksanakan, baik untuk pariwisata maupun untuk pengantaran barang industri pakaian.</p> <p>Faktor <i>advance</i>: Jalan raya di Nepal adalah jalan yang kepadatannya paling rendah di Asia Selatan dengan 40% penduduknya tinggal dengan jarak lebih dari 2 jam perjalanan dari jalan terdekat. Perbaikan jalan juga masih kurang. Asosiasi Garmen Nepal (GAN) sudah menginisiasikn GPZ (Garmen Specialized Zone) sebagai daerah khusus spesialisasi industri garmen dan tersedia beragam fasilitas industri yang dibutuhkan.⁷² Walaupun demikian, Nepal menjadi salah satu daerah tujuan wisata yang alamnya sangat menarik dan terdapat banyak tempat ibadah Hindu yang dapat dikunjungi. Masalahnya adalah rendahnya tingkat transportasi dan akomodasi, termasuk faktor SDM dengan tingkat melek huruf yang rendah serta buruknya pelatihan terhadap pengembangan pariwisata dengan tingkat keberadaan modal yang terbatas pula.⁷³</p> <p>Subsektor pakaian Nepal terbagi atas dua jenis industri difokuskan permintaan domestik dan total untuk ekspor. Perusahaan orientasi domestik masih bersifat tradisional dan</p>	<p>Rendah</p>

⁷¹ Graeme Macfadyen dan Edward Allison, "Climate Change Fisheries, Trade, Competitiveness: Understanding Impacts and Formulating Response for Commonwealth Small States" (November 2009), diakses dari www.thecommonwealth.org/files/219183/FileName/ClimateChangeFisheriesTradeandCompetitiveness/UnderstandingImpactsandFormulatingResponsesforCommonwealthSmallStates pada tanggal 13 Juni 2012 pukul 15.29 WIB.

⁷² Kiran P Saakha, Nepal, diakses dari www.unescap.org/tid/publication/tip.org pada tanggal 17 Juni pukul 18.20 WIB

⁷³ Sudha Barahi, et.al, "Tourism Cluster in Nepal: Microeconomics of Competitiveness" (6 Mei 2011), diakses dari [www.isc.hbs.ed/pdf/Student Projects/Nepal Tourism 2011](http://www.isc.hbs.ed/pdf/Student%20Projects/Nepal%20Tourism%202011) pada tanggal 2 Juni 2012 pukul 16.22 WIB.

	<p>terpecah-pecah dengan pertumbuhan melambat, sedangkan sektor industri orientasi ekspor tercatat sebanyak 1067 menurut Asosiasi Garmen Nepal. Perusahaan sektor garmen Nepal juga mengalami penurunan dari 158 tahun 2003 menjadi 136 tahun 2004.⁷⁴</p>	
<p>Pakistan (Industri Tekstil)</p>	<p>Faktor mendasar: Pakistan adalah produsen kapas mentah keempat terbesar di dunia sehingga ia mampu menghasilkan harga tekstil yang lebih kompetitif dibanding pesaingnya, seperti India, Bangladesh, dan Kamboja, walaupun beberapa tahun ini mereka harus mengimpor kapas karena pertumbuhan panen kapas yang stagnan.⁷⁵</p> <p>Faktor <i>advance</i>: ada tiga sub-sektor dalam pertentunan, seperti terintegrasi, bagian tenun yang terpisah, serta unit Daya Alat tenun. Sektor pemintalan Pakistan memakai 4 ribu buah perkakas tenun <i>air jet</i> dan 24 ribu buah alat tenun tanpa kumparan (<i>shuttless looms</i>), serta ada 300 ribu <i>power looms</i> yang dipasang dengan baik. Produk yang memakai <i>shuttless looms</i> dan perkakas tenun <i>air jet</i> memiliki kualitas yang baik dan digunakan untuk memproduksi barang jadi mutakhir.⁷⁶</p>	<p>Tinggi</p>
<p>Sri Lanka (Industri Tekstil dan Teh)</p>	<p>Faktor mendasar: Untuk bidang agrikultur, Sri Lanka diberkati dengan SDA seperti teh yang melimpah, termasuk iklim. Sedangkan untuk industri tekstilnya, Sri Lanka memang sangat kuat bergantung pada bahan baku garmen yang diimpor.</p> <p>Faktor <i>advance</i>: Pada sektor industri tersedia banyak tenaga buruh yang tinggi tingkat melek huruf dan standardnya, serta sedang gajinya. Sri Lanka dikenal sebagai negara dengan tingkat upah tekstil tertinggi di Asia Selatan dan memberikan semboyan</p>	<p>Industri T&C: Rendah</p> <p>Industri Teh: Tinggi</p>

⁷⁴ Nepal, *Loc.Cit*

⁷⁵ *Ibid*, *Potential Supply Chains in Textiles and Clothing Sectors in South Asia: An Exploratory Study*

⁷⁶ *Ibid*,

	<p>“Garmen tanpa Kekerasan” dan penyerapan tenaga kerja yang beretika.⁷⁷ Namun demikian, produktivitas buruh di Sri Lanka masih cukup rendah.</p> <p>Untuk produksi teh: Sri Lanka memiliki dasar keahlian sejarah yang baik, infrastruktur, reputasi dunia, kehadiran litbang, pengetahuan akan pasar masa kini.⁷⁸</p>	
--	---	--

3.3 Situasi Permintaan Domestik (home demand)

Hal penting yang paling berpengaruh dari permintaan domestik terhadap keuntungan kompetitif adalah melalui campuran dan sifat dari kebutuhan pembeli domestik. **Komposisi kebutuhan domestik** tersebut membentuk bagaimana industri merasa, menginterpretasikan, dan merespon terhadap kebutuhan pembeli. Bangsa (negara) akan memperoleh keuntungan kompetitif dari industri atau bagian-bagian industri yang di dalamnya kebutuhan dalam negeri memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas dan awal dari kebutuhan pembeli daripada gambaran yang dimiliki oleh saingan asingnya. Bangsa juga akan memperoleh keuntungan jika para pembeli domestik menekan perusahaan lokal untuk berinovasi dengan lebih cepat dan mendapatkan keuntungan yang mengagumkan dibanding pesaingnya. Oleh karena itu, industri domestik harus menaruh perhatian terhadap pembeli untuk merasakan dan menafsirkan keinginan mereka, selain itu pihak produsen harus meningkatkan produk mereka berdasarkan komunikasi dengan pembeli.⁷⁹

Ada tiga karakteristik penyusun permintaan domestik, khususnya yang signifikan untuk mendapatkan keuntungan kompetitif bangsa, yaitu struktur segmen permintaan (penyaluran permintaan terhadap jenis-jenis khusus, mencakup kisaran segmen: absolut atau kurang diminati), sifat dasar dari pembeli (budaya dan jarak, termasuk permintaan pembeli terhadap barang yang berkualitas tinggi, fitur, dan layanan), serta kebutuhan pembeli yang sifatnya antisipatoris

⁷⁷ *Deepening Intra-regional Trade and Investment in South Asia The Case of Textiles and Clothing Industry, Loc.Cit*

⁷⁸ *A competitiveness Strategy for Sri Lanka's Tea Industry, Loc.Cit*

⁷⁹ Porter, *Op.Cit.*, hal.86-97

yang disebabkan oleh lingkungan sosial dan politik dari suatu negara yang akhirnya menghasilkan pemutakhiran dari suatu produk dari waktu ke waktu dan bisa bersaing pada segmen yang sedang tampak. Selain itu, permintaan domestik juga dipengaruhi oleh ukuran pasar permintaan (akan menghasilkan keuntungan kompetitif bila diikuti dengan fasilitas skala besar, pengembangan teknologi, dan peningkatan produktivitas) dan pola pertumbuhannya dari jumlah permintaan dalam negeri, serta jika terjadi internasionalisasi permintaan domestik oleh pembeli yang bergerak (turis), pembeli lokal multinasional serta pembeli asing.⁸⁰

Negara	Keterangan	Kategori
Bangladesh	Industri RMG Bangladesh 100% ditujukan untuk ekspor menurut kebijakan pemerintah tahun 1980-an, AS dan Eropa adalah pembeli asing utamanya. Produksi industri RMG Bangladesh terus mengalami perkembangan, terutama sejak berakhirnya masa kebijakan kuota pakaian (MFA) akhir tahun 2004. ⁸¹	Industri RMG: Tinggi
Bhutan	Untuk sektor <i>hydropower</i> : Permintaan listrik tenaga air (<i>hydropower</i>) domestik Bhutan cukup tinggi, yaitu sekitar 1665 GWh (Giga watt per hour), permintaan <i>power system</i> sebesar kira-kira 194 MW (megawatt), dimana konsumsi energi per orang (kapita) adalah sebesar kira-kira 2200 kWh. ⁸² Untuk sektor wisata: Kedatangan turis ke Bhutan naik sebesar 31% dan meningkatkan pendapatan negara sebesar 30,2% menjadi 38,8 juta dolar AS. ⁸³	Industri Hydro power dan Pariwisata: Tinggi
India	Penggunaan teknologi canggih dalam produksi kain India membuat konsumen domestik tekstil melihat ketersediaan merek	Industri T&C dan

⁸⁰ *Ibid*, Porter, hal.97-99

⁸¹ Muhammad Yunus dan Tatsufumi Yamagata, *The Garment Industry and Government Role in Bangladesh*, diakses dari www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Report/2011/pdf/410_ch6 pada tanggal 22 Mei 2012 pukul 14.58 WIB

⁸² Tahsi Dorjee, *Clean Energy Development in Bhutan* (11-13 Juli 2011 di Male, Maladewa) diakses dari www.sari.energy.org/PageFiles/What_We_Do/activities/Maladewa_Transitioning_South_Asian_Energy_Market_July_2011/presentations/Day2/BhutanCountryoverview pada tanggal 26 Mei 2012 pukul 11.19 WIB.

⁸³ *Structure of Association of Bhutanese Tour Operators (2008-2010)*, diakses dari www.abto.org.bt/wp-content/uploads/2009/08/Structure-of-ABTO pada tanggal 2 Juni pukul 14.19 WIB.

	<p>tekstil internasional di pasar domestik yang dibuat oleh industri garmen India sehingga meningkatkan permintaan domestik. Namun kekurangannya adalah ketepatan waktu (leads time) pengantaran tekstil jadi kepada konsumen, terkadang sampai tiga bulan sehingga membuat pembeli sudah kehilangan selera terhadap produk tersebut (selera konsumen domestik biasanya musiman). Solusinya adalah diskon atau ekstrimnya pembatalan permintaan.⁸⁴</p>	<p>TI: Tinggi</p>
Maladewa	<p>Maladewa memiliki tingkat pasar domestik yang kecil yang di dalamnya terdapat promosi produksi industri untuk diekspor serta untuk konsumsi lokal. Para pebisnis tidak mau untuk berusaha karena tidak menghasilkan keuntungan dari skala ekonominya.⁸⁵ Untuk sektor perikanan, penduduk Maladewa banyak mengkonsumsi ikan karena kaya akan protein. Namun demikian, Maladewa juga mengekspor ikannya (tuna jenis <i>skipjack</i> dan <i>yellowfin</i> dan udang batu) ke kawasan Uni Eropa, khususnya negara Inggris dan Jerman. Harga penjualan ikan di pasar Uni Eropa relatif stabil dan menginginkan volume penjualan regular; pedagang eceran juga memberikan dapat dipercaya dalam hal suplai yang membangkitkan kesadaran konsumen akan produk tertentu. Permintaan akan ikan sangat kuat di pasaran Uni Eropa, khususnya pada saat musim panas dan setelah Natal berlalu, tetapi pasar UE terkadang menjadi tidak fleksibel dalam menyerap produksi ikan dalam jumlah besar ketika suplainya telah tersedia di pasarnya.⁸⁶</p>	<p>Wisata: Tinggi</p> <p>Perikanan: Tinggi</p>
Nepal	<p>Terdapat turis dan penerimaan wisata yang paling lama tinggal di Asia (12 hari), walaupun dasar kepariwisataan ini tergolong kecil, termasuk pertumbuhan keparwisataannya yang condong kepada</p>	<p>Industri T&C: Rendah</p> <p>Wisata: Rendah</p>

⁸⁴ India Textile Competitiveness, diakses dari <http://www.fibre2fashion.com/services/article-writing-service/content-promotion-services.asp> pada tanggal 2 Juni 2012 pukul 14.29 WIB.

⁸⁵ *The Government of Maldives, Loc.Cit.*

⁸⁶ *Climate Change Fisheries, Trade, Competitiveness: Understanding Impacts and Formulating Response for Commonwealth Small States, Loc.Cit*

	<p>para <i>backpacker</i> nilai rendah. Rendahnya ketertarikan turis negara tetangga serta rendahnya tingkat kesadaran dunia akan keunikan Nepal.⁸⁷</p> <p>Untuk industri garmen: Terjadi penurunan jumlah ekspor ke AS karena Nepal tidak mendapatkan kesempatan akses perdagangan preferensial ke AS dari tahun 2000-2006. Sedangkan ke pasar Uni Eropa, Nepal belum bisa memanfaatkan kesempatan akses pasar tersebut dengan sepenuhnya. Produk pakaian Nepal di pasar AS didominasi oleh garmen yang terbuat dari kain kapas bernilai rendah, sedangkan di pasar UE adalah pakaian yang bernilai tinggi dan terbuat dari bulu domba dan sutra. Akses pasar preferensial Kanada dan Jepang juga kurang berarti bagi peningkatan keuntungan Nepal dari garmen. Ditambah lagi dengan merosotnya jumlah buruh industri garmen dengan berakhirnya kuota MFN⁸⁸</p>	
Pakistan	<p>Pakistan menjadi konsumen kapas nomor tiga terbesar di dunia untuk konsumsi lokal. Lebih dari 50% ekspor garmen Pakistan ditujukan kepada Eropa dan Amerika Utara. Namun, kebijakan proteksionis dan superioritas teknologi negara Barat membuat Pakistan dirugikan sehingga harus mencari pasar baru, seperti Afrika.⁸⁹</p>	Industri T&C: Tinggi
Sri Lanka	<p>Sekitar 45% pendapatan ekspor Sri Lanka berasal ekspor pakaian ke negara di luar kawasan Asia Selatan, seperti Uni Eropa (39%), AS (56%), Inggris, Italia, Jerman, dan Perancis. Dapat dikatakan bahwa pembeli internasional menjadi konsumen utama produk industri pakaiannya, terutama untuk jenis pakaian dalam wanita, pakaian renang, serta pakaian untuk kegiatan formal.⁹⁰ Produk kain Sri Lanka telah meng-internasionalisasi.</p> <p>Di sisi lain, produksi teh Sri Lanka kekurangan merk terkenal,</p>	Industri T&C dan Teh: Tinggi

⁸⁷ *Tourism Cluster in Nepal: Microeconomics of Competitiveness, Loc.Cit*

⁸⁸ Nepal, *Loc.Cit*

⁸⁹ Afia Malik, *Demand for Textile and Clothing Exports of Pakistan*, diakses dari www.pide.org.pk/Research/report180 pada tanggal 17 Juni 2012 pukul 18.17 WIB.

⁹⁰ *Deepening Intra-regional Trade and Investment in South Asia, Loc.Cit*

	walaupun reputasinya sudah terkenal di dunia internasional. Walaupun demikian, terdapat peningkatan ketertarikan terhadap teh karena khasiatnya dan beberapa pembeli mau untuk membayar produk yang terdiferensiasi. ⁹¹	
--	--	--

3.4 Kehadiran Industri-industri yang Berhubungan dan Mendukung

Industri-industri yang berhubungan dan mendukung ini haruslah yang secara berdaya-saing secara internasional. Keuntungan kompetitif dari beberapa industri penyedia (supplier) memberikan keuntungan potensial bagi perusahaan dari sebuah bangsa (negara) karena mereka memproduksi *input* yang secara luas digunakan dan penting untuk berinovasi atau internasionalisasi. Industri-industri pendukung yang kompetitif secara internasional menciptakan keuntungan dalam beberapa cara, seperti ketersediaan bahan-bahan pendukung yang paling canggih dan akses informasi dari industri penyedia tersebut, serta ketersediaan barang/ jasa yang sifatnya komplementer.⁹²

Negara	Keterangan	Kategori
Bangladesh (Industri RMG)	<p>Figure 1: Growth in spinning capacity (1983-2009). The chart shows two metrics: No. of mills (left vertical axis, 0-600) and Spindle capacity (mill) (right vertical axis, 0.0-9.0). Both metrics show a strong upward trend over the period.</p> <p>Figure 2: Growth of yarn and fabric production (1972-73-2008-09). The chart shows two metrics: Fabric (Million Metres) (left vertical axis, 0-5000) and Yarn (Million kgs) (right vertical axis, 0-1200). Both metrics show a strong upward trend over the period.</p> <p>Grafik 3.4 Kapasitas Mesin Pintal dan produksi hasil Tenun Sumber: UNCTAD 2011⁹³</p>	Rendah

⁹¹ *A competitiveness Strategy for Sri Lanka's Tea Industry, Loc.Cit*

⁹² *Ibid*, Porter, hal.100-104

⁹³ *Potential Supply Chains in Textiles and Clothing Sectors in South Asia: An Exploratory Study, Loc.Cit*

	<p>Pada grafik di atas diketahui bahwa terdapat peningkatan industri pendukung RMG (ready-made garment) Bangladesh, seperti pertumbuhan kapasitas penenunan (tabel kiri atas) dari tahun 1983-2009 yang cukup pesat sehingga menciptakan peningkatan produksi benang (tabel sebelah kanan atas mencapai lebih dari 600 juta kg) dan kain tenunan (mencapai lebih dari 4 juta meter) dari tahun 1972-2009. Namun demikian, industri pendukung untuk menghasilkan RMG, seperti kapas mentah dan serat buatan manusia seperti serat viscose (kental) dan serabut polyester bergantung pada impor. Pada tahun 2010—2011 diperkirakan ada 900 ribu ton yang harus diimpor. Pemerintah menetapkan bebas pajak dan bea masuk terhadap impor suku cadang dan seluruh bahan celup, bahan kimia serta perekat kain yang digunakan dalam sektor tekstil⁹⁴.</p>	
Bhutan	<p>Bhutan kekurangan inisiatif dari sektor swasta dalam mengembangkan potensi <i>hydropower</i>⁹⁵.</p> <p>Namun di sisi lain, investor domestik Bhutan tertarik untuk berinvestasi dalam bidang pariwisata sejak privatisasi bulan Oktober 1991, seperti dalam hal kepemilikan restoran. Pariwisata ini didukung dan mendukung sektor jasa lainnya seperti kehadiran perusahaan transportasi, telekomunikasi, perhotelan, restoran, termasuk keberadaan industri <i>cottage</i> masyarakat asli kerajinan tangan di Thimpu dan daerah lain.⁹⁶</p>	<p>Hydropower Rendah</p> <p>Wisata: Tinggi</p>
India	<p>Industri pendukung sektor T&C India melingkupi industri yang memproduksi serat, seperti rami, kapas, sutra, serat/benang <i>cellulosic</i>, benang/serat sintesis. Industri pendukung menjadi salah satu produsen terbesar di dunia di bawah China. Termasuk</p>	<p>Tinggi</p>

⁹⁴ *Bangladesh Textile Industry, Loc.Cit*

⁹⁵ *Clean Energy Development in Bhutan, Loc.Cit*

⁹⁶ Tandi Dorji, Sustainability of Tourism in Bhutan, diakses dari www.thlib.org-static-reprints/jbs/JBS_03_01_03 pada tanggal 2 Juni 2012 pukul 14.21 WIB.

	kapasitas pemasangan perkakas tenun, baik tenun yang memakai kumparan, maupun tenun tangan. ⁹⁷	
Maladewa	<p>Sektor pariwisata: Ekspansi tempat persinggahan (penginapan: kapasitas tempat tidur) bagi turis, menjadi salah satu sektor yang dibangun di Maladewa. Namun demikian, pendanaan modal sulit untuk diamankan oleh para pengusaha wisata di sana.⁹⁸</p> <p>Industri pendukung perikanan di Maladewa adalah kehadiran pengelola (processor) lokal yang memiliki sarana pengelola, seperti tempat pendingin, pembeku, dan kontainer. Mereka memegang izin kontrak dari pemerintah untuk membeli, memproses, serta mengekspor ikan tuna <i>skipjack</i> dari kawasan perikanan yang dirancang.⁹⁹</p>	<p>Wisata: Rendah</p> <p>Perikanan: Tinggi</p>
Nepal	<p>Industri pendukung pariwisata adalah keberadaan produk kerajinan tangan masyarakat asli dan agrikultur yang potensial untuk menjual barang-barang unik dan mempromosikan wisata ekonomi. Namun demikian, dengan cluster eceran dan tempat penjualan makanan yang belum dikembangkan. Jasa kesehatan juga tidak memadai di Nepal.¹⁰⁰</p> <p>Untuk industri pendukung produk garmen, seperti bahan-bahan mentah, harus diimpor dari luar negeri seperti dari India sehingga menambah biaya produksinya.¹⁰¹</p>	<p>Wisata dan industri T&C: Rendah</p>
Pakistan	Pakistan memang menjadi produsen besar produk tekstil, tetapi negara ini tidak memproduksi mesin-mesin dan suku cadang	<p>industri T&C: Rendah</p>

⁹⁷ *Potential Supply Chains in Textiles and Clothing Sectors in South Asia: An Exploratory Study*, Loc.Cit.

⁹⁸ *Background Note: Maladewa*, diakses dari www.m.state.gov/md5476.htm pada tanggal 12 Juni 2012 pada pukul 13.15 WIB.

⁹⁹ *Climate Change Fisheries, Trade, Competitiveness: Understanding Impacts and Formulating*, Loc.Cit

¹⁰⁰ *Tourism Cluster in Nepal: Microeconomics of Competitiveness*, Loc.Cit

¹⁰¹ Anil Belabase dan Paras Kharel, "Competitiveness of Nepalese Ready-Made Garment after expiry of the Agreement on Textile and Clothing", (Asia-Pacific Research Training Network on Trade Working paper Series No.70, June 2009) diakses dari www.unescap.org/tid/artnet/pub/wp7009 pada tanggal 17 Juni 2012 pukul 18.17 WIB.

	untuk produksi tekstil sehingga harus diimpor dari luar negeri (terutama dari Eropa, Timur Jauh). ¹⁰²	
Sri Lanka	<p>Walaupun industri garmennya ditujukan untuk ekspor, Sri Lanka harus mengimpor kapas dan benang karena hanya ada sedikit industri kecil yang memproduksi kain dan benang yang tinggi kualitas dan yang banyak jumlahnya sebagai pendukung industri tekstil negaranya.¹⁰³ Ekspor pakaian dari Sri Lanka sangat bergantung pada impor tekstil (kain dan beragam aksesoris seperti resleting, kancing, dan mesin) dari negara Asia Timur seperti Cina (Hongkong), Taiwan, dan Korea karena alasan efisiensi harga, biaya energi, biaya transportasi dan birokrasi.¹⁰⁴</p> <p>Industri teh di Sri lanka kekurangan modal, terdapat sedikit pabrik teh dan sedikitnya modal investasi lokal serta tingginya tingkat bunga yang ditetapkan oleh bank lokal. Sektor perbankan kurang menjadi penolong dalam pendanaan industri ini.¹⁰⁵</p>	<p>industri T&C dan Teh: Rendah</p>

3.5 Strategi, Struktur, dan Persaingan Perusahaan (Industri)

Strategi dan struktur perusahaan mencakup tujuan akhir serta cara bagaimana mengorganisasikan industri yang akan menghasilkan keuntungan nasional bila ada perpaduan yang baik di antara pilihan-pilihan ini dan sumber-sumber keuntungan kompetitif dari industri khusus. Banyak aspek dari suatu bangsa yang mempengaruhi cara-cara yang di dalamnya perusahaan diorganisasikan dan dikelola, beberapa di antaranya adalah sikap terhadap otoritas, norma dalam interaksi antar individu, perilaku para pekerja terhadap manajemen dan sebaliknya serta norma sosial dari individualistis atau kelompok perilaku, dan standar profesional.¹⁰⁶

¹⁰² *Op.Cit, Regional Cooperation in South Asia: Pakistan Perspective*, hal.337.

¹⁰³ *Potential Supply Chains in Textiles and Clothing Sectors in South Asia: An Exploratory Study*, Loc.Cit.

¹⁰⁴ *Deepening Intraregional Trade and Investment in South Asia*, Loc.Cit

¹⁰⁵ *A competitiveness Strategy for Sri Lanka's Tea Industry*, Loc.Cit

¹⁰⁶ Porter *Op.Cit*, hal.107-124

Pola persaingan di dalam negeri juga memainkan peranan besar di dalam proses inovasi dan prospek penting bagi kesuksesan internasional. Kemauan dan kemampuan dari perusahaan untuk berkompetisi secara global adalah bagian dari fungsi determinan lain seperti tekanan dari kejenuhan pasar dalam negeri atau persaingan lokal dan dorongan oleh permintaan internasional. Sikap manajerial memainkan peranan penting dalam lingkungan nasional yang berdampak signifikan terhadap perkiraan internasional kepada perusahaan, atau juga kemudahan dan keinginan mereka untuk bekerjasama secara global. Sikap ini meliputi sikap berkeliling (bepergian) serta kemampuan berbahasa dan sikap untuk mempelajari bahasa baru.¹⁰⁷

Negara	Keterangan	Kategori
Bangladesh	Peningkatan daya saing industri RMG Bangladesh banyak dipengaruhi oleh keterlibatannya dengan pasar internasional sehingga membuat kebanyak perusahaan mengadopsi teknologi tinggi untuk menaikkan kualitas produksi garmen. Untuk menghasilkan staff terlatih dalam mengoperasikan teknologi tersebut, maka Asosiasi Eksporir dan Industri Garmen Bangladesh (BGMEA) didirikan tahun 1982 serta dengan keberadaan <i>National Institute of Fashion Technology</i> (NIFT).	Tinggi
Bhutan	Persaingan industri operator wisata di Bhutan menghasilkan kerjasama dalam forum <i>Association of Bhutanese Tour Operators</i> tahun 1999 sebagai upaya <i>self-regulation</i> dan <i>self-control</i> . Untuk kompetisi dalam produksi hydropower juga kurang kelihatan, dimana pemerintah Bhutan dan investor asing yang memiliki kemampuan pengembangan sektor ini.	Rendah
India	Masuknya perusahaan garmen internasional ke India membawa desain baru, manajemen sains modern, serta strategi pemasaran yang memperkuat mekanisme industri-industri (kecil domestik)	Garmen dan IT: Tinggi

¹⁰⁷ *Ibid*, Porter, hal.107-124

	<p>untuk mengembangkan produk baru, nama merk baru, pengembangan teknologi, serta pelatihan staff untuk meningkatkan tingkat daya saing pasar. Namun kekurangannya adalah perusahaan kain kecil di India sulit memperbesar usahanya karena kebijakan pemerintah mengenai buruh serta kurangnya perencanaan canggih dan penggunaan sistem informasi di dalam perusahaannya.¹⁰⁸</p> <p>Tingkat kompetisi sektor TI di India cukup tinggi karena banyaknya perusahaan dalam negerinya yang bahkan dijuluki India'Silicon Valley.</p>	
Maladewa	<p>Industri pariwisata Maladewa sangat kreatif dan berhasil dalam menciptakan strategi pemasaran dan diplomasi publik di antara negara-negara pulau kecil lainnya melalui merk Maladewa: <i>The Sunny side of Life</i>. Kegiatan merancang dan pelaksanaan promosi yang hati-hati melalui berbagai media internasional juga telah menghasilkan keberhasilan promosi citra Maladewa sebagai tujuan berlibur yang sempurna dengan pantai berpasir putih, air bersih yang tidak berpolusi, dan lingkungan bawah laut yang sangat menarik. Petugas MTPB menyatakan bahwa saluran promosi pariwisata lainnya adalah melalui program TV kabel di Eropa (yang menghasilkan banyak pelancong), koran dan majalah terpilih, website, iklan mulut ke mulut, pameran dagang, serta untuk distributor menggunakan operator asing/lokal.¹⁰⁹</p> <p>Untuk sektor perikanan, pesaing Maladewa adalah negara Pasifik, Thailand, Scheyless, dan Afrika Barat.</p>	Tinggi
Nepal	<p>Identifikasi Pemerintah Nepal terhadap pariwisata sebagai fokus pengembangan strategis dan lingkungan yang kompetitif dengan pemain dalam kelompok kecil. Biasanya para pemain ini</p>	Rendah

¹⁰⁸ *India Textile Competitiveness, Loc.Cit*

¹⁰⁹ Ibrahim Naem, *Economic and Commercial Diplomacy Microstates: A Case Study of the Maldives and Mauritius* (Tesis Master di Universitas Malta, 31 Juli 2008) diakses dari [www.diplomacy.edu/sites/default-files-23082010103242Naeem\(library\)](http://www.diplomacy.edu/sites/default-files-23082010103242Naeem(library)) pada tanggal 22 Mei 2012 pukul 14.48 WIB.

	<p>tergolong pada bisnis keluarga yang mengejar biaya rendah sebagai proposisi nilai utama. Tidak ada pemain global dalam sektor ini dan kurangnya strategi pemasaran yang terkoordinasi serta pemosisian Nepal sebagai pemain global. Termasuk teknik pemasaran pariwisata yang menggunakan mulut ke mulut, mengandalkan relasi keluarga, serta kurang memanfaatkan promosi lewat media TV.¹¹⁰</p> <p>Sedangkan permasalahan strategi dan persaingan antar perusahaan produsen pakaian di Nepal adalah dalam menciptakan permintaan dan waktu pengantaran barang yang tidak efisien (kurang kemampuan manajemen perusahaan).¹¹¹</p>	
Pakistan	<p>Industri domestik Pakistan masih ditujukan terhadap industri berteknologi rendah serta pengembangan litbang yang dominan dibiayai oleh pemerintah, bukan pihak swasta. Hal ini membuat inovasi produksinya juga rendah. Pakistan terkenal memiliki kelebihan di bagian harga dan kemampuan untuk memproduksi kain dalam jumlah besar.¹¹²</p> <p>Walaupun demikian, sektor terbesar tekstil Pakistan, seperti celana panjang dan kain kepar (denim) masih dihasilkan dalam jumlah kecil dan kualitasnya rendah karena industri kecil dan menengah (home textile) yang dominan sebagai produsennya tidak mampu memasarkan produknya menjadi merk dunia.¹¹³</p>	Rendah
Sri Lanka	<p>Produksi tekstil Sri Lanka memiliki kelebihan dari segi kualitas, inovasi, desain, konsistensi dan realibilitas dibandingkan dengan India, Bangladesh, dan Pakistan.¹¹⁴ Waktu pengantaran (deliverance) barang menjadi masalah bagi Sri Lanka untuk bersaing di tingkat dunia karena dibutuhkan waktu yang cukup lama (90-150 hari) dibandingkan dengan waktu normal (60 hari)</p>	<p>Industri tekstil: Tinggi</p> <p>Industri teh:</p>

¹¹⁰ *Tourism Cluster in Nepal: Microeconomics of Competitiveness, Loc.Cit*

¹¹¹ *Nepal, Loc.Cit*

¹¹² *Deepening Intraregional Trade and Investment in South Asia, Loc.Cit*

¹¹³ *Potential Supply Chains in Textiles and Clothing Sectors in South Asia: An Exploratory Study, Loc.Cit*

¹¹⁴ *Deepening Intraregional Trade and Investment in South Asia, Loc.Cit*

	<p>dalam perputaran industri garmennya karena kekurangan industri kain tenunan dan aksesoris.¹¹⁵ Namun demikian waktu ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan India, Bangladesh, dan Pakistan.</p> <p>Industri teh Sri Lanka dikarakteristikan sebagai usaha kecil dan ada pemisahan identitas antara produsen dan eksportir. Selain itu banyak pemilik industri teh yang bermigrasi dari Sri Lanka dan mereka kekurangan modal. Sri Lanka kekurangan kemampuan untuk memonitor perubahan permintaan konsumen sehingga harus beragantung terhadap agen luar negeri. Industri teh domestik Sri Lanka hanya memusatkan perhatiannya pada kompetisi harga, bukan pada pengembangan, spesialisasi, dan inovasi.¹¹⁶</p>	Rendah
--	--	--------

3.6 Analisis Empat Determinan Teori Intan Porter

3.6.1 Terhadap Peningkatan Keuntungan Daya Saing Tiap Negara anggota SAARC tahun 1996-2010

3.6.1.1 Produk Tekstil

Dari tabel di atas, Produk tekstil dan kain (T&C) masihlah menjadi industri utama di empat negara Asia Selatan (India, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, dan Nepal). Adapun determinan yang mendukung industri tekstil di lima negara tersebut adalah sumber daya alam, ketersediaan buruh, kebutuhan kain domestik yang cukup tinggi (terutama di Pakistan), serta kehadiran industri pendukung kecil dan menengah. Semua faktor ini menghasilkan produk T&C yang lebih murah dibanding dengan negara di kawasan lain, kecuali China, sehingga kebanyakan dari hasil industrinya ditujukan untuk ekspor ke luar kawasan, seperti AS dan Eropa Barat. India dan Pakistan memiliki keuntungan kompetitif dibanding Sri Lanka, Bangladesh, dan Nepal karena sumber daya

¹¹⁵ *Potential Supply Chains in Textiles and Clothing Sectors in South Asia: An Exploratory Study, Loc.Cit*

¹¹⁶ *A competitiveness Strategy for Sri Lanka's Tea Industry, Loc.Cit*

alamnya menghasilkan barang-barang mentah (seperti kapas) yang mendukung industri tekstil dan pakaian (T&C) di Asia Selatan. Namun demikian, produk industri tekstil dan Nepal kalah kompetitif dengan produk India, Bangladesh, Pakistan, dan Sri Lanka di pasaran internasional.

Walaupun sama-sama memproduksi tekstil, namun empat negara tersebut memiliki beberapa diversifikasi, antara lain Pakistan yang mengkhususkan pada produk tekstil dari kapas tingkat menengah (benang rajutan), industri Bangladesh (gaji buruh paling murah) dan Sri Lanka menghasilkan kain yang bergantung pada benang rajutan, serta India yang menghasilkan industri sektor yang tinggi tingkat kompleksitasnya yang mencakup seluruh nilai dan produksi rantai dari produksi serat kepada manufaktur garmen dan pengemasannya.

Lebih, para pembeli internasional (global) juga melihat bahwa beberapa spesialisasi jenis T&C dari empat negara di atas berdasarkan lima jenis utama produk tekstil dan kain yang diekspor dari: Pakistan, yaitu kain tenunan ukuran sedang, kain lenan tempat tidur, perabot rumah tangga, karpet, pakaian pria dasar dan kaus kaki. Sri Lanka, yaitu pakaian dalam wanita, pakaian renang bahan serat buatan tangan dan campuran kapas, baju formal. Bangladesh, yaitu pakaian rajut pria, pakaian olahraga, pakaian informal (kaos, celana panjang, T-shirt), dan baju atasan. India, seperti baju atas wanita, kemeja dan baju dalaman wanita, dan tenunan bergambar.¹¹⁷ Sedangkan industri pakaian Nepal lebih dikhususkan terhadap baju atasan seperti kardigan, serta celana panjang dan pendek.

Memang benar, bahwa nilai ekspor intra-SAARC naik drastis, tetapi hal itu juga diikuti kenaikan nilai ekspor ke dunia sehingga persentase perdagangan intra-kawasannya tetap rendah. Sebagian besar industri yang terdapat di Asia Selatan memiliki beberapa kelemahan yang sama, seperti Pertama, fokus pada jenis industri teknologi rendah, kecuali India, dan kesamaan jenis produksi (walaupun dalam jenis pakaian yang sedikit berbeda) membuat tingkat komplementaritas (saling melengkapi) produk kompetitif kawasan ini menjadi rendah. Penggunaan teknologi tinggi kurang memungkinkan, kecuali bagi India dan Pakistan, karena kurangnya dana (lokal dan asing) untuk membelinya.

¹¹⁷ *Deepening Intra-regional Trade and Investment in South Asia, Loc.Cit*

Solusinya adalah kerjasama industri intra-kawasan, seperti ekspor kapas mentah dan pengembangan teknologi.

Namun di sisi lain, negara-negara di Asia Selatan memanfaatkan fakta produk rendah teknologi ini, terutama tekstil untuk bisa masuk ke pasar AS dan Uni Eropa yang sudah berkonsentrasi pada produksi barang berteknologi tinggi. Sehingga akan lebih menguntungkan apabila negara anggota SAARC tetap mempertahankan keadaannya ini. Kedua, struktur persaingan lokal dalam hal strategi pemasaran dan pengembangan jenis produk masih kurang. Hal ini disebabkan oleh kekurangan insentif modal, pekerja yang kurang kompeten, ataupun perusahaan yang tidak memiliki visi jangka panjang. Walaupun memang, kedua hal ini menghasilkan ketidak-mampuan dari kebanyakan perusahaan (kecil dan menengah) di Asia Selatan untuk melaksanakan inovasi, seperti diversifikasi jenis (variasi) pakaian sehingga lebih kompetitif sehingga tiap negara memiliki ciri khas.

Kelemahan ketiga adalah kekurangan infrastruktur yang memadai, seperti jalan raya, bandara udara, pelabuhan, telekomunikasi dan sarana/prasarana lainnya. Dari keterangan tabel di atas diketahui bahwa sebagian negara di Asia Selatan tidak bisa memperbaiki infrastrukturnya, baik karena tidak ada peran pemerintah yang signifikan atau ide dari pebisnis (Asosiasi Bisnis). Nepal adalah salah satu negara yang pemerintahnya tidak memberikan andil positif terhadap perbaikan infrastruktur dalam mendukung industri domestiknya sehingga membuat asosiasi garmennya (GAN) sendiri yang berinisiatif membuat zona spesialisasi untuk memproses garmen, walaupun ide ini akan dikerjakan bersama-sama dengan pemerintah nantinya. Beruntungnya deregulasi dalam hal telekomunikasi telah membawa dampak positif terhadap pengembangannya.

Kelemahan keempat adalah sebagian besar negara di Asia Selatan kekurangan tenaga terampil (berpendidikan dan terlatih) dan produktif, kecuali India. Hal ini berhubungan dengan ketersediaan lembaga pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, terutama sektor tekstil. Di Bangladesh dan India, sudah ada institusi pendidikan yang menghasilkan lulusan untuk bekerja di sektor garmen. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya tingkat penelitian dan pengembangan

produk garmen di tiap perusahaan, contohnya litbang di Pakistan masih disponsori oleh negara bukan bagian strategi perusahaan domestiknya, karena kurang dana.

Kelemahan kelima dari adalah beberapa negara seperti Bangladesh dan Sri Lanka tidak mengimpor bahan baku kain dari negara tetangganya, seperti India dan Pakistan, selain karena pertimbangan efisiensi biaya transportasi, harga, energi dan birokrasi adalah pertimbangan sejarah. Pada tahun 1970-an ketika Sri Lanka pertama kali meliberalisasi sistem perekonomiannya, tidak ada negara di Asia Selatan yang dapat menyuplai kebutuhan dasar kain untuk industri pakaiannya sehingga harus diimpor dari Asia Timur, yang pada saat itu sedang mengalami masa industrialisasi besar-besaran. Bahkan produk sintetis Asia Timur masih lebih murah dibanding produksi India dan Pakistan, walaupun memang untuk produk berbahan dasar kapas, seperti kain lenan tempat tidur dan handuk lebih murah harganya di Asia Selatan.¹¹⁸ Oleh karena itu, Dewan Menteri SAFTA (SMC) harus sungguh-sungguh mendorong dan memfasilitasi tiap negara anggotanya untuk membangun sarana transportasi dan sistem komunikasi untuk mengefisienkan biaya perdagangan intra-kawasan Asia Selatan. Selama ini, kondisi infrastruktur yang tidak memadai menjadi penghalang utama sehingga kebanyakan negara produsen kain di Asia Selatan tidak bersedia mengimpor bahan baku dari negara tetangga di kawasan tersebut. Memang terdapat kesepakatan untuk bantuan teknis (sesuai dengan Annex II Perjanjian SAFTA), seperti pembangunan kapasitas, promosi ekspor, dan bantuan litbang bagi negara anggota yang tergolong kurang berkembang seperti Bangladesh, Bhutan, dan Nepal. Namun, implikasi positifnya masih kurang berdampak terhadap pengembangan industri domestik mereka.

Dapat dikatakan bahwa Asia Selatan belum dapat menjadi *regional supply chain* bagi industri tekstil India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, bahkan Nepal. Ditambah lagi dengan jenis produk yang dimasukkan dalam daftar barang yang akan dikurangi tarifnya melalui mekanisme perdagangan bebas (SAPTA dan SAFTA) bukanlah jenis produk bahan dasar untuk mendukung industri pakaian. Oleh karena itu, SAARC harus mendorong anggotanya, terutama India dan

¹¹⁸ *Deepening Intra-regional Trade and Investment in South Asia, Loc.Cit*

Pakistan, untuk mengeluarkan jenis produk bahan dasar pakaian dari daftar produk sensitifnya. Jika tidak, nilai perdagangan intra-kawasan Asia Selatan tidak akan naik secara signifikan, walaupun berbagai hambatan tarif dan non-tarif sudah mulai dikurangi, bahkan dihilangkan. Walaupun nyatanya, masih terdapat “tarif terselubung” yang belum sepenuhnya dapat dikurangi dan dihilangkan. Selain itu, ketidaksiapan industri domestik untuk bersaing di dalam kompetisi perdagangan kawasan Asia Selatan juga menjadi salah satu penghambat tiap-tiap negara untuk mempercepat *timing* pengurangan dan penghilangan berbagai jenis hambatan tariff. Oleh karena itu, diperlukan banyak *entrepreneur* yang berjiwa kompetitif dan memiliki visi untuk mengembangkan perusahaannya, terutama industri T&C, serta menggunakan setiap peluang dan strategi yang ada.

Selain itu, kerjasama SAFTA juga harus memberikan perhatian besar terhadap SAARC *Investment Fund* yang sedang dibahas.¹¹⁹ Tujuannya adalah menghasilkan kesepakatan yang memfasilitasi kemudahan perpindahan modal (investasi asing) dari satu negara anggota SAARC ke negara lainnya. Investasi asing ini dapat dipergunakan untuk membantu negara yang kekurangan dana untuk membangun industri T&C; yang dampak positifnya adalah membuka lapangan kerja di negara tujuan investasi (mengurangi pengangguran dan kemiskinan), menambah pendapatan negara, serta yang paling penting adalah membangun industri yang produktif dalam menghasilkan produk kompetitif untuk dijadikan sebagai jaringan produksi regional serta menjadi *regional supply chain* bagi produk T&C di kawasan Asia Selatan. Kerjasama antar-industri di kawasan Asia Selatan (secara vertikal dan horizontal serta transfer teknologi) akan sangat memungkinkan karena tiap negara memiliki jenis produk yang dapat mendukung pengembangan industry di negara anggota SAARC lainnya. Dengan melihat fakta bahwa tidak semua negara penghasil produk T&C yang kompetitif memiliki SDA (kapas) dan industri pendukung domestik, dapat disimpulkan “kemandirian” perusahaan di masing-masing negara tidak mutlak dapat diterapkan di Asia Selatan.

¹¹⁹ *Deepening Intra-regional Trade and Investment in South Asia, Loc.Cit*

Kebanyakan perusahaan T&C di kawasan Asia Selatan adalah perusahaan yang pada awalnya tidak akan mampu berkembang pesat dengan sendirinya jika produksi barangnya tidak memiliki peminat (buyer). Dari berbagai pemaparan tabel di atas, ada peran pemerintah yang sebenarnya tidak akan mungkin dilepaskan dari aktivitas perekonomian dalam menciptakan minat pembeli lokal dan internasional terhadap produk domestiknya, contohnya adalah pemerintah Bangladesh yang memasarkan produk garmennya melalui skema pemerintah ke pemerintah Bangladesh-Eropa Timur. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk membahas sejauh mana peran pemerintah di dalam mendorong pengembangan industri (perusahaan) domestiknya terhadap empat determinan dalam teori Porter. Terlebih lagi dengan kondisi krisis keuangan zona Euro sampai pertengahan tahun 2012 membuat penurunan pertumbuhan ekonomi terhadap negara-negara yang pertumbuhan ekonominya didorong oleh ekspor barang ke Eropa, contohnya India.¹²⁰ Krisis ekonomi zona Euro yang berkelanjutan meredam pasar global dan berdampak negatif pada negara dengan sistem *export-led growth*. Kemampuan beli masyarakat Eropa terhadap barang-barang impor-nya akan berkurang. Oleh karena itu, perdagangan intra-kawasan menjadi salah satu cara untuk mengurangi kerugian ekspor.

3.6.1.2 Produk Non-Tekstil

Kesepakatan SAPTA dan SAFTA yang ditujukan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi melalui perdagangan intra-kawasan belum membuahkan hasil yang cukup baik, termasuk terhadap produk non-tekstil, seperti agrikultur, *hydropower*, perikanan, pariwisata dan IT. Seharusnya dengan diberlakukannya perdagangan bebas di kawasan Asia Selatan, permintaan pasar akan menjadi semakin meningkat. Faktanya, produk agrikultur kebanyakan negara Asia Selatan menunjukkan pengurangan dalam segi jumlah produksi dan keuntungan komparatif, contohnya produksi teh di Sri Lanka yang terus menurun sehingga memberikan kontribusi kecil terhadap porsi GDP-nya sejak tahun 1990-an s/d sekarang berdasarkan data dari tabel di atas. Di satu sisi, hal ini dikarenakan

¹²⁰ PM India Desak Eropa Atasi Krisis Keuangan, diakses dari www.m.yahoo.com/w/legobengine/news/pm-india-desak-eropa-atasi-krisi-keuangan-005211958--finance.html pada tanggal 17 Juni 2012 pukul 12.45 WIB.

minimnya dana investasi, kurangnya pendampingan oleh pemerintah, serta tidak menggunakan teknologi canggih dalam produksinya sehingga tidak memproduksi dalam skala besar dan harganya menjadi mahal dibandingkan para pesaingnya di luar negeri. Di sisi lain, turunnya produktivitas produksi hasil pertanian, seperti teh ini adalah karena harganya (term of trade) yang merosot dibandingkan dengan produk manufaktur yang nilainya lebih tinggi di pasaran regional dan internasional.

Sektor industri teknik informatika (TI) India juga cukup kompetitif, terutama di daerah Bangalore, Hyderabad, Kolkata, dan Chennai yang didukung oleh kebijakan pro-aktif pemerintah sejak tahun 1990-an, kemampuan penduduknya terutama dalam penggunaan Bahasa Inggris (terutama dalam bahasa *programming*) yang menjadi bahasa kedua penduduknya, termasuk kerjasama dengan universitas untuk pelatihan pengembangan kemampuan. Sektor TI ini sangat mendukung dalam perdagangan elektronik (e-commerce) global dan internet karena masyarakat sebagai konsumen akan mendapatkan informasi serta pembeli dan penjual mudah melakukan transaksi pembayaran melalui mesin ATM lokal.¹²¹ Fakta tingginya daya saing penggunaan teknologi (berpengaruh terhadap harga dan diversifikasi jenis barang) inilah yang menjadi bukti bahwa India sangat diuntungkan melalui perdagangan intra-kawasannya dan yang membuat negara tetangganya ketakutan untuk berdagang dengannya. Oleh karena itu, SAARC harus secara aktif dan “halus” mendorong India (baik pemerintah maupun kaum teknisi/pakar TI) agar bersedia membantu negara tetangganya untuk transfer teknologi. Namun demikian, ancaman terhadap penjualan produk TI India ini adalah kecilnya kebutuhan pasar akan produk berteknologi tinggi, karena sebagian besar penduduk di Asia Selatan, kecuali India, kurang melek teknologi. Artinya, walaupun India memiliki produk kompetitif TI, tetapi negaranya harus menjualnya ke negara di kawasan lain yang memiliki kebutuhan besar akan produk IT, seperti piranti lunak komputer, karena sudah terintegrasinya

¹²¹ Science and Techology in *India's Growth* dalam Jati K. Sengupta, 2005, *India's Economic Growth: A Strategy for the New Economic*. (New York: Palgrave Mac Millan), hal.130-142.

pendidikan (proses belajar-mengajar) dengan teknologi, seperti yang terjadi di China.

Untuk produksi *hydropower* Bhutan dan Nepal, masalahnya adalah kekurangan modal dan orang-orang yang ahli di bidang teknik, sementara arus listrik sangat diperlukan untuk konsumsi industri dalam dan luar negeri. Hal ini memang sudah diatasi dengan kerjasama yang dilakukan oleh Bhutan dengan Uni Eropa, India, dan negara investor lainnya. Tugas yang perlu dikerjakan adalah memaksimalkan penggunaan pembangkit listrik tenaga air (*hydropower*) ini untuk meningkatkan produktivitas industri dalam negeri karena pastinya industri domestik akan mengeluarkan biaya (*expenditure cost*) yang lebih kecil dibandingkan dengan negara lain. Industri pariwisata di Nepal dan Bhutan juga masih kurang dikembangkan dengan maksimal karena keterbatasan dana dan kemampuan manajemen perusahaan penyedia jasa wisata (*tour agent*) untuk menyediakan transportasi, akomodasi, dan telekomunikasi. Salah satu solusinya adalah menggunakan kerjasama regionalisme Asia Selatan dalam mempromosikan pariwisata, terutama kepada masyarakat India yang sangat banyak jumlahnya.

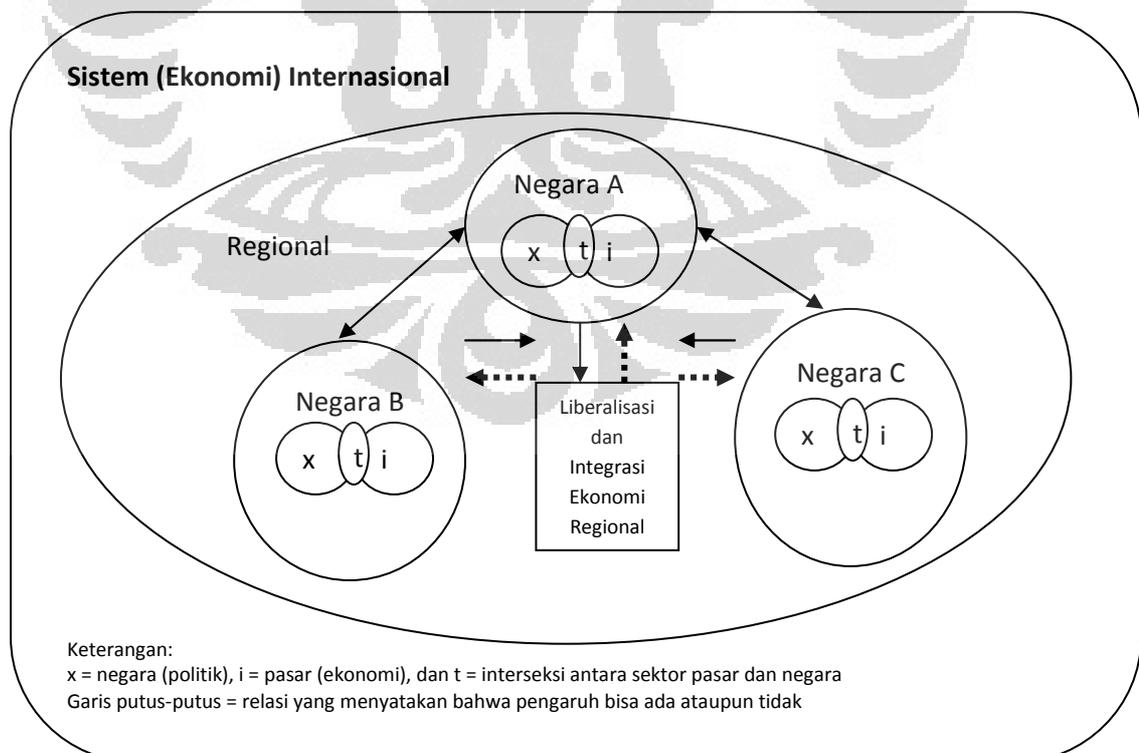
Dengan demikian, sebagian besar industri domestik dari tiap negara anggota SAARC masih dapat dikategorikan sebagai kurang berdaya-saing tinggi, terutama untuk produktif menciptakan barang/jasa yang terdiversifikasi secara jenis, dan kurang mampu memanfaatkan keuntungan dari keberadaan perjanjian SAPTA dan SAFTA sejak tahun 2000-2010. Penyebab utamanya adalah kurang strategi dalam berinovasi, kurang kemauan untuk berkompetisi, dan kurang memiliki pemahaman riil akan lingkungan nasional dan cara-cara untuk mengembangkannya. Oleh karena itu, harus usaha lobi oleh sektor swasta terhadap pemerintah untuk mengejar kerjasama yang dapat menguntungkan industri domestiknya, terutama industri yang masih dikategorikan sebagai industri bayi (*infant industries*), dan respon positif dari pemerintah. Karena memang nyatanya, ketidakmampuan banyak perusahaan domestik di Asia Selatan untuk menjadi kompetitif adalah karena terlalu bergantung pada bantuan dan proteksi dari pemerintahnya dalam jangka waktu lama.

BAB IV

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TIAP NEGARA ANGGOTA SAARC TAHUN 2000-2010

Dalam sistem internasional, negara adalah aktor utama yang paling sering dianalisis menurut level analisis studi Hubungan Internasional. Negara berperan untuk mengusahakan kepentingan negaranya (national interest) melalui artikulasi kebijakan luar negerinya, termasuk di dalam kerjasama bilateral dan multilateral, baik dalam kerjasama tingkat dunia maupun regional. Kepentingan nasional itu bisa dalam hal keamanan, ekonomi, kesehatan, atau sektor lainnya. Dalam bagian ini, analisis ditujukan dalam proses kerjasama ekonomi tingkat regional, khususnya melalui perdagangan intra-kawasan. Kebijakan pemerintah yang berupaya untuk dianalisis adalah kebijakan industri dan perdagangan domestiknya serta diplomasi ekonomi yang dilakukannya untuk mendukung keberhasilan industri dalam negerinya. Di bawah ini adalah gambaran pola relasi antar negara tersebut tersebut:

Gambar 4.1 Skema Sistem Ekonomi Internasional



Dari gambar di atas, perdagangan internasional (kompetisi perdagangan) merupakan salah satu bagian dari proses interaksi antar negara, baik secara bilateral maupun multilateral. Untuk menghasilkan keuntungan dalam perdagangan internasional, maka terlebih dahulu harus ada kesepakatan antara pemerintah sebagai regulator dengan pihak swasta (pasar). Interseksi (persinggungan) antara peran pemerintah dan swasta memang terkadang tidak selalu mulu atau berjalan searah, bahkan akan terjadi konflik kepentingan. Negara berusaha untuk mengartikulasikan kepentingan nasional, sedangkan perusahaan (pasar) berusaha untuk memaksimalkan keuntungan pribadi dengan meminimalisir biaya produksi (efisiensi). Oleh karena itu pada bagian ini, penulis berusaha untuk memaparkan bagaimana pemerintah tiap negara SAARC berusaha untuk menyelaraskan antara strategi perusahaan domestiknya dengan kebijakan pemerintah untuk menghasilkan keuntungan kompetitif bangsa.

4.1 Kebijakan Pemerintah terhadap Industri

Pemerintah juga memiliki signifikansi peran dalam menciptakan dan melanjutkan keuntungan kompetitif melalui pengaruhnya lewat kebijakan/regulasi, hanya saja sifatnya parsial (sebagian). Pada intinya, Porter mengatakan bahwa pemerintah harus mendukung terciptanya lingkungan dimana industri domestik dapat menghasilkan keuntungan kompetitif daripada pemerintah terlibat secara langsung di dalamnya prosesnya, kecuali di negara-negara yang sedang berada pada tahap awal pembangunan kompetitif. Pemerintah juga harus melibatkan industri dalam penentuan faktor-faktor apa yang diciptakan dan mendorong perusahaan untuk memainkan peranan penting terhadap penciptaan faktor mereka sendiri. Tujuannya adalah untuk mengarahkan sumber daya bangsa (pekerja dan modal) dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Selain itu, keuntungan kompetitif bangsa juga tidak dapat direfleksikan secara penuh melalui peningkatan produktivitas jika bangsa itu tidak memiliki akses terhadap pasar asing sehingga pemerintah perlu mengejar akses pasar terbuka melalui kebijakan perdagangan serta untuk menghilangkan praktik dagang yang tidak adil.¹²²

¹²² Porter, *Op.Cit*, hal. 196-217

Memang fokus penelitian Porter adalah pada negara maju, tetapi prinsip-prinsip dari teori keuntungan kompetitif bangsa juga bisa diterapkan di negara-negara sedang berkembang, yakni negara yang telah mengecap tingkat pembangunan dasar dan sedang mencari status pembangunan yang lebih lagi. Negara-negara berkembang biasanya sangat proteksionis sehingga untuk memperoleh kemajuan mereka harus meningkatkan empat bagian dari Intan Porter sehingga bisa berkompetisi dengan negara maju. Prioritas utama yang harus dikembangkan adalah penciptaan faktor-faktor tingkat tinggi (*advanced factors*), seperti pendidikan, kemampuan teknis lokal, pendasaran terhadap informasi, serta infrastruktur modern adalah prasyarat utama. Selain itu, penciptaan kebutuhan domestik, industri-industri yang mendukung, serta adaptasi teknologi canggih adalah hal yang sangat diperlukan untuk mempercepat dan melanjutkan pembangunan. Alat kebijakan pemerintah secara langsung pada tahap pembangunan awal ini adalah melalui penyediaan modal, subsidi, dan perlindungan industri (seperti devaluasi mata uang) sementara. Kemudian, pemerintah harus beralih terhadap kebijakan tidak langsung, yaitu mendorong agar industri domestik tetap melakukan inovasi dan sedikit demi sedikit mengurangi intervensi agar tidak kontra-produktif ketika industri (perusahaan) mencari tingkat keuntungan kompetitif yang lebih tinggi.¹²³

4.2 Bangladesh

4.2.1 Kebijakan Industri secara umum

Selama periode paska kemerdekaan, perkembangan industri Bangladesh telah diarahkan melalui beberapa kebijakan: Kebijakan Industri tahun 1973, Kebijakan Industri baru 1982, Kebijakan Industri yang Direvisi 1986, Kebijakan Industri tahun 1999 diikuti dengan sejumlah kebijakan lain, dengan kebijakan Industri tahun 2010. Semua kebijakan ini telah berusaha untuk mengubah sektor dengan sebuah pandangan untuk menciptakan ekonomi yang berdasarkan manufaktur yang kuat. Sebagai hasilnya, berdasarkan data BBS (Bangladesh Bureau Statistic) dari tahun fiskal (FY: Fiscal Year 2009-2010), kontribusi sektor manufaktur terhadap GDP adalah 17,86%, serta tercatat sebesar 17,9% pada FY08-09. BBS

¹²³ *Ibid*, Porter, hal. hal. 196-217.

mencatat bahwa rata-rata pertumbuhan sektor manufaktur adalah 5,73% pada tahun fiskal (FY) 09-10. Pengumuman Kebijakan Industri 2010 baru-baru ini adalah pengajuan sebuah strategi terintegrasi dari pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi yang pesat. Bayangannya adalah terjadi kenaikan andil sektor industri dalam GDP s/d 40% sampai tahun 2021 kenaikan dengan proporsi angkatan kerja sebesar 25% dari total pekerja secara bersamaan. Data yang tersedia dari BBS menunjukkan bahwa kuantum dari produksi industri yang mewakili industri-industri skala menengah sampai industri berskala besar meningkat menjadi 413,40 pada FY 08-09 dari 254,45 pada FY 02-03. Pada FY 2000-10 rata-rata QIP berdiri pada 431,51. Industri RMG (Ready-made garment) adalah industri utama.¹²⁴

4.2.2 Kebijakan Industri RMG

Peran pemerintah Bangladesh dalam memperkenalkan industri RMG cukup luar biasa. Pada awalnya, penjualan kaus domestik buatan Bangladesh ke luar negeri dilakukan melalui agen perdagangan negara, *the Trading Corporation of Bangladesh*, dimana negara tujuannya adalah kawasan Eropa Timur pada pertengahan tahun 1970-an melalui perhitungan perjanjian dagang. Bangladesh mewarisi kerangka kerja kebijakan industri dari Pakistan yang memfokuskan kontrol birokrat terhadap sektor industri swasta secara besar dengan penekanan terhadap industri substitusi impor dan sedikit investasi asing. Setelah kemerdekaan, rejim pemerintah memilih untuk mempertahankan kendali yang ketat terhadap perekonomian dan mulai untuk menasionalisasi industri-industri berskala besar secara perlahan-lahan, secara khusus pada industri rami, tekstil kapas, gula, dan kebanyakan bank. Pada saat batas waktu, dipaksakan terhadap investasi pribadi dan pada FDI. Setelah kudeta tahun 1975, sejumlah kebijakan sosialis oleh rejim sebelumnya dibalikkan menjadi lebih pro-pasar dan cenderung bergerak bebas melalui rejim baru yang secara berkala mengintervensi proses pembangunan ekonomi. Konsekuensinya, penerimaan investasi dan prosedur pembayaran hutang disederhanakan untuk meliberalisasi iklim investasi di sana.¹²⁵

¹²⁴ *The Garment Industry and Government Role in Bangladesh, Loc.Cit*

¹²⁵ *Ibid, Garment Industry and Government Role in Bangladesh*

Selama tahun 1980-an, pemerintah memodifikasi kebijakan rejim kebijakan impor dengan industri pakaian (garmen) yang 100% berorientasi ekspor untuk menyediakannya dengan jangkauan fasilitas gudang bebas bea yang dibatasi sebagai ganti sistem bea yang kekurangan. Karena alasan untuk memberlakukan anti-penyimpangan ekspor di dalam rejim kebijakan, maka kemudian terdapat pembatasan terhadap impor bahan-bahan mentah, tetapi modifikasi kebijakan diijinkan 100% ekspor mengarahkan pembangunan RMG untuk mengimpor barang-barang tenunan, berbagai aksesoris untuk mempermudah iklim bebas bea. Modifikasi kebijakan ini menambah pinggirannya ekstra menuju kekompetitifan (berdaya saing) melalui penghilangan hambatan bea masuk/tarif. Di samping itu, terjadi penurunan jumlah ekspor industri RMG Bangladesh karena pembatasan kuota MFA (Multi-fibre agreement) yang berlangsung dari tahun 1974-2005. Walaupun tingkat produksi RMG Bangladesh lebih tinggi daripada China, Sri Lanka, dan Vietnam, namun Bangladesh masih tertinggal dari mereka jika diukur dari segi standar kehidupan dan upah para buruhnya. Para pekerja akan lebih dapat meningkatkan produksi jika mereka tidak sulit untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Penelitian Shahiduzzaman (2010) menyatakan bahwa para pemilik pabrik garmen tidak mematuhi Hukum Perburuhan dan Konvensi ILO sehingga pemerintah Bangladesh berinisiatif untuk menetapkan tingkat upah minimum berdasarkan hasil konsultasi dengan berbagai pemangku jabatan sosial. Walaupun memang para pekerja menyatakan kekurang-setujuannya terhadap struktur upah baru, bahkan pihak perusahaan juga tidak mau menerapkan kebijakan pemerintah ini.¹²⁶

Namun demikian, terdapat kelemahan dari peran pemerintah Bangladesh terhadap industri RMG-nya, meliputi implementasi ketepatan waktu dan perlunya kebijakan dan berbagai strategi. Para realitanya, aturan dan peraturan yang muncul hanya ada pada kertas; terlihat kurang berarti dan tidak sebagaimana harusnya serta tidak tepat dalam pengejawantahannya. Contohnya adalah proses monitoring dan pelaksanaannya yang masih dibatasi oleh kompleksitas birokrasi serta korupsi di berbagai bidang. Karena itu, instabilitas politik dan kurangnya pemerintahan yang baik perlu untuk diperbaiki. Selain itu, pembangunan

¹²⁶ *The Garment Industry and Government Role in Bangladesh, Loc.Cit*

infrastruktur, seperti bandara udara dan sarana-prasarana juga harus dilaksanakan untuk mempermudah penyaluran barang, meningkatkan sistem keamanan, serta menghasilkan lingkungan bisnis yang bebas dari korupsi dan stabilitas politis.¹²⁷

4.3 Bhutan

4.3.1 Kebijakan Ekonomi-Politik Bhutan

Bhutan adalah sebuah negara kerajaan turun-temurun yang diperintah oleh Raja Jigme Singye Wangchuck dengan bantuan sebuah Pemerintah dan sebuah Dewan Nasional. Namun demikian, telah terjadi perubahan pada tahun 1998 yang memperkuat peran forum yang terpilih dan peralihan yang lebih jauh telah memperkuat unit-unit administrasi level yang lebih rendah (the dzongkhags dan geogs). Inisiatif politik baru-baru ini tergabung dengan Repelita kesembilan (9th FYP) seharusnya menghasilkan struktur administrasi/politik yang lebih terdesentralisasi, dengan otoritas pusat menjadi manajer utama dan koordinator dari proses pembangunan ketika badan distrik dan sub-distrik mengasumsikan perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kekuasaan. Proses desentralisasi ini juga meningkat *good governance* serta mengurangi tingkat korupsi di tingkat administratif.¹²⁸

Perekonomian rakyat Bhutan hanya sekedar diorientasikan untuk menyambung hidup dan dipusatkan pada sektor pertanian. Walaupun negara ini banyak diberkahi dengan SDA (tenaga air, hutan yang padat, dan simpanan mineral seperti batu gamping/kapur dan dolomit), namun pemanfaatan sumber alam ini masih terhalang oleh karena kondisi geografi dan iklim yang ekstrim. Berbagai kelemahan Bhutan, seperti keter-isolasiannya dari dunia luar dalam sejarahnya, keberadaan hambatan dalam pengembangan ekspor, ketergantungan yang berlebihan terhadap India sebagai mitra dagang utama dan kerapuhan perekonomiannya terhadap arus barang luar negeri yang masuk ke dalam Bhutan

¹²⁷ *Ibid*, *The Garment Industry and Government Role in Bangladesh*

¹²⁸ "Bhutan & the European Community Cooperation Strategy 2002-2006" (Country Strategy Paper oleh European Commission, 21 Maret 2003) diakses dari http://europa.eu.int/comm/external_relations/bhutan/csp/index.htm pada tanggal 5 April 2012 pukul 13.45 WIB.

telah membuatnya terintegrasi ke dalam sistem hubungan perdagangan internasional.¹²⁹

4.3.2 Kebijakan Pemerintah Bhutan dalam bidang Industri, Perdagangan, dan Pariwisata

Proses pembangunan Bhutan diinisiasikan pada tahun 1961 dan telah mengalami kesuksesan dalam perencanaan pembangunan selama empat dekade. Rencana Lima tahun yang Kedepalan (8th Five Year Plan/ FYP) tahun 1997-2002 memprioritaskan pembanguna tenaga air, industrialisasi, pembangunan sumber daya manusia lembaga, pembangunan daerah desa terintegrasi serta peningkatan layanan sosial. Berbagai tujuan ini telah mendorong bantuan negara donor sebesar 23% dari GDP tahun fiskal 1998/1999. Pembangunan lima tahun yang kesembilan (9th Five Year Plan/FYP) tahun 2002-2007 menitik-beratkan pada pembangunan infastruktur dan kualitas pelayanan sosial. Pada sektor industri dan perdagangan, menempatkan penekanan terhadap diversifikasi perdagangan (produk dan kebijakan daerah), pembatas terhadap peran sektor publik dan kebijakan untuk menyediakan lingkungan bagi sektor privat. Penitik-beratan lainnya adalah pembangunan tanah perindustrian, mendorong penciptaan industri kerajinan tangan/rakyat dan pengusaha kecil, serta memperkenalkan wisata dengan skala yang berkesinambungan serta layak.¹³⁰ Di bawah ini adalah daftar beberapa produk domestik Bhutan yang berpengaruh terhadap jumlah GDP-nya.

Tabel 4.2 Persentase *share* (andil) sub-sektor dari GDP ril Bhutan¹³¹

Tahun	1980	1990	2000	2006	2007	2008
Sektor Agrikultur	27,8	15,4	12,7	9,9	8,9	9,1
Cadangan (livestock)	12,5	10,6	7,4	6,5	5,2	5,5
Kehutanan (Forestry & Logging)	15,5	9,62	6,6	5,9	4,7	4,4
Seluruh Penjualan dan Perdagangan Eceran	10,9	4,66	4,5	5,9	5,1	5,0
Transportasi, Penyimpanan, dan Komunikasi	4,3	6,62	9,1	10,3	9,1	9,9
Komunitas, Pelayanan Sosial	10,8	16,8	14,3	12,4	10,8	11,0
Keuangan, Insuransi, dan Perumahan	6,3	8,73	7,1	8,6	8,1	9,3
Pertambangan dan Beton	0,6	0,86	1,6	2,2	1,8	2,3

¹²⁹ *Loc.Cit, Bhutan & the European Community Cooperation Strategy 2002-2006*

¹³⁰ *Bhutan & the European Community Cooperation Strategy 2002-2006, Loc.Cit*

¹³¹ *Laporan Economy Development Policy of the Kingdom of Bhutan 2010, Loc.Cit*

Manufaktur	3,2	7,71	8,2	7,8	8,2	8,5
Listrik, Air, dan Gas	0,2	8,66	11,4	10,7	20,4	19,1
Konstruksi	7,9	8,4	14,0	15,2	13,7	11,5
Perhotelan dan Restoran		0,18	0,45	0,8	0,7	5,0

Sumber: Data Statistika Nasional tahun 1990-2004,2000-2008, NSB Laporan Tahunan Otoritas Keuangan Kerajaan (Royal Monetary Authority Annual Report) 2007/08.

*: mencakup keseluruhan penjualan dan perdagangan eceran tahun 1980

Dari di atas dapat diketahui bahwa sub-sektor yang memberikan andil (share) dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama 28 tahun, yaitu perlistrikan: air dan gas dengan rata-rata peningkatan 16,73% per tahun dari 2006-2008, sedangkan industri manufaktur tidak mengalami kenaikan persentase andil yang signifikan.

Kebijakan pembangunan ekonomi Bhutan meliputi reformasi ekonomi besar-besaran, yang mencakup restrukturisasi ekonomi makro berdasarkan tenaga air (hydro power), industri jasa, pertanian organik dan informasi teknologi untuk pengetahuan masyarakat. Pemerintah Bhutan juga sedang mengembangkan perekonomiannya melalui “Brand Bhutan” (untuk mencapai GNH: *Gross National Happiness* melalui visi 2020) melalui sumber daya alam, kepariwisataan, budaya, kerajinan tangan, industri tekstil dan agro-industri. Untuk pengembangan industri, pemerintah Bhutan menjadi energi yang dihargai secara kompetitif sebagai faktor pendorong utama industri serta mengaktifkan UU Perlindungan Konsumen (Consumer Protection Act) 2010 dan UU Kompetisi (Competition Act) dalam Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita) yang kesepuluh untuk tahun 2007-2012. Pengembangan tenaga air memerlukan banyak dana investasi yang diperoleh dari kerjasama dengan pemerintah dan investor India serta lembaga ADB. Dalam sektor pariwisata, kebijakan kepariwisataan Bhutan juga dikembangkan sesuai dengan prinsip “high value low impact” (nilai tinggi, dampak rendah). Dalam kebijakan pengembangan ekonomi itu juga, Pemerintah Kerajaan berusaha mendorong dan mempromosikan kepariwisataan ke seluruh negara setiap tahun karena sektor ini adalah salah satu sektor pertumbuhan yang penting dan dapat digunakan untuk mendiversifikasi ekonomi pedesaan. Prioritasnya adalah pembangunan dan promosi pasar-pasar baru. Jumlahnya akan

ditentukan oleh kapasitas serap dari negara sesuai dengan infrastruktur, budaya, keamanan, dan lingkungan.¹³²

Kebijakan pemerintah Bhutan dalam bidang kepariwisataan sejak tahun 1999 menekankan kualitas pelayanan dan pengalaman yang dipertahankan oleh persaingan “market share” di antara pelaksana wisata, peraturan pemerintah (lisensi pelaksanaan wisata, pendampingan wisatawan, serta perhotelan). Kebijakan penetapan harga minimum adalah sebuah mekanisme yang efektif dan efisien untuk mengatur jumlah penghasilan maksimum, yaitu pendapatan maksimum dengan dampak minimum (walaupun jika jumlahnya berada dalam skala ekonomi yang sangat kecil akan mengurangi keuntungan investasi dan selanjutnya akan menguntungkan secara nasional).¹³³

4.4 India

4.4.1 Kebijakan Ekonomi-Politik India sejak tahun 1990-an

Sumber percepatan pertumbuhan ekonomi India berasal dari reformasi kebijakan pada masa pemerintahan Perdana Menteri P.V Narasimha Rao pada awal tahun 1990-an. Pemerintahannya meliberalisasikan perekonomian dengan cara menghilangkan kendali impor dan menghilangkan tarif bea, mendevaluasi mata uang, menghilangkan kendali atas investasi pribadi, dan menghancurkan monopoli bisnis sektor publik dari industri-industri kunci. Namun demikian, sebenarnya hasil pertumbuhan ekonomi telah melalui kebijakan *state-capitalism* pada masa pemerintahan P.M Jawaharlal Nehru dengan ciri sosialis pada tahun 1960-an dan kemudian reformasi kebijakan transisional yang diperkenalkan pada masa pemerintahan Rajiv Gandhi sebelum tahun 1985 sehingga disebut gelombang reformasi ekonomi pertama. Gelombang reformasi ekonomi kedua berlangsung pada tahun 1990-an dengan memperkuat dan mempertahankan akselerasi pertumbuhan ekonomi India dari tahun 1980-an.¹³⁴ Sejak tahun 1990-an ini India mengalami perubahan sistem ekonomi dari yang sifatnya proteksionis

¹³² *Economy Development Policy of the Kingdom of Bhutan 2010, Loc.Cit*

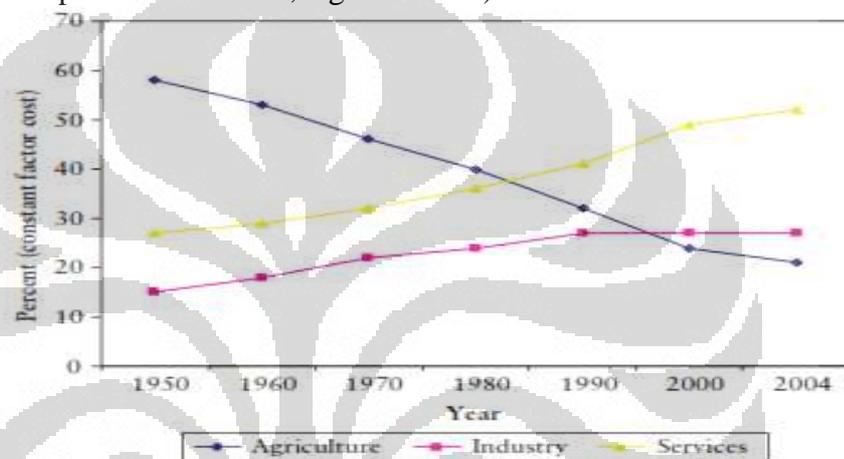
¹³³ Sandra Brunet, et.al, *Tourism Development in Bhutan Tension's between Tradition and Modernity*, diakses dari www.citeseerx.ist.psu.edu pada tanggal 26 Mei 2012 pukul 11.54 WIB

¹³⁴ Baldev Raj, *India's Economic Growth Miracle in Global Economy: Past and Future*, dalam Anjum Siddiqui *India and South Asia: Economic Development in the Age of Globalization*, (USA: M.E Sharpe, 2007), hal. 61-62

(industri substitusi impor/ inward looking) menjadi sistem yang lebih terbuka (out-ward looking) dimana pertumbuhan ekonominya didorong oleh ekspor besar-besaran, terutama ke luar kawasan Asia Selatan, dan peningkatan nilai investasi asing serta perusahaan asing ke India. Di bawah ini adalah gambaran mengenai perubahan persentase kontribusi beberapa sektor utama terhadap GDP India dari tahun 1950-2004.

Tabel 4.4. Grafik Share Sektoral terhadap GDP India tahun 1950-2004

(Sumber: Database pusat Bank Dunia, Agustus 2005)¹³⁵



Pada fase ketiga, reformasi kunci ekonomi India meliputi pengelolaan ekonomi makro yang bijaksana, dimana inflasi dijaga dan defisit neraca berjalan berada di bawah kontrol selama periode secara keseluruhan, liberalisasi tingkat kurs dan perdagangan, liberalisasi sektor keuangan, dan deregulasi investasi. Deregulasi dan orientasi ke luar sepanjang ekonomi makro dikelola dengan hati-hati menghasilkan perekonomian yang lebih terbuka dan kompetitif, investasi asing yang ditingkatkan, dan gelora produktivitas.¹³⁶

Namun demikian, India masih dipandang kurang stabil dalam politiknya, baik di tingkat pusat dan negara, terlihat dari koalisi pemerintah dan mandat yang terpecah. Dalam praktiknya, pemerintah Aliansi Demokratis Nasional (NDA) terdahulu yang dipimpin oleh PM Atal Behari Vajpayee yang berkuasa selama enam tahun dan merupakan waktu yang panjang bagi suatu pemerintahan di dalam

¹³⁵ Sadiq Ahmed, *India's Longterm Growth Experience: Lesson and Prospects*, (Washington: World Bank, 2007), hal. 22

¹³⁶ *Loc.Cit*, Sadin Ahmed, hal.8

negara yang demokratis serta terdapat kualitas peraturan yang kurang baik di India, serta tingkat korupsi yang masih tergolong cukup tinggi dibanding China, apalagi dibandingkan dengan Singapura.¹³⁷

4.4.2 Kebijakan India dan dampak terhadap Industri dan Jasa IT

Sebelum tahun 1991, terdapat peraturan "*license raj*", dimana pemerintah yang memberikan lisensi kepada berbagai perusahaan domestik untuk menghasilkan barang apa yang harus diproduksi. Hal ini menyebabkan perusahaan di India menjadi kaku dan birokratik. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan peraturan yang memberikan jaminan pekerjaan berlebihan bagi para pekerjanya, dimana upah tunggakan tetap menjadi utang perusahaan meskipun perusahaan itu telah bangkrut sehingga menyebabkan para pemimpin perusahaan sangat enggan untuk merekrut pegawai kecuali mereka yakin bahwa pabrik atau kantor mereka akan tetap berdiri selama puluhan tahun. Sehingga ketika PM Rajiv Gandhi memerintah tahun 1985 dan mengganti sistem ekonomi sosialis Nehru dan Gandhi, banyak birokrat yang tidak menyetujuinya. Ia mengubah peraturan untuk mengizinkan lebih banyak impor dan ekspor, memotong pajak, mengurangi lisensi yang dibutuhkan bagi perusahaan dalam memproduksi barang, menaikkan batas antimonopoli membuat perusahaan mungkin untuk bertumbuh sampai senilai 80 juta dolar AS. Pada tanggal 1 Juli 1991 terjadi reformasi bersejarah di India pada masa pemerintahan PM Narasimha Rao, dimana Singh sebagai menteri keuangan untuk mendevaluasi mata uang India lebih dari 9% dalam upaya untuk mendorong ekspor untuk mendatangkan mata uang asing yang diperlukan (cadangan devisa), serta terjadi reformasi struktural perbankan dan reformasi industri, serta menurunkan pajak penghasilan dari 56% menjadi 40% hingga tahun 1993. Berbagai kebijakan ini membuka jalan bagi revolusi komputer di India, seperti perusahaan raksasa Infoys Technologies milik Narayana Murthy, dibangun pada tahun 1981 di Bangalore dan memperkerjakan 176 karyawan pada tahun 1991 dan kemudian memperkerjakan 70 ribu karyawan

¹³⁷*Ibid*, Desh Gupta dan Bhagwan Dahiya, *Governance Issues in India*, dalam Anjum Siddiqui, hal.354

dengan gaji yang mengesankan, reputasinya seperti perusahaan Microsoft di AS.¹³⁸

Kebijakan reformasi yang dikejar oleh pemerintah BJP selama periode Oktober 1999 s/d Mei 2004 dapat diklasifikasi sebagai berikut: Pertama, melanjutkan kebijakan privatisasi kewirausahaan sektor publik, yang telah menuai kesuksesan pada bidang telekomunikasi, perbankan, dan sektor keuangan seperti asuransi. Kedua, langkah positif selebihnya adalah mengundang arus investasi langsung asing (FDI) di dalam sektor TI yang mencakup bidang automobil, telekomunikasi, dan beberapa barang konsumen yang berkaitan dengan obat-obatan (farmasi) dan elektronik. Ketiga, strategi spesial yang dilakukan dalam sektor piranti lunak di kota-kota, seperti Bangalore dan Hyderabad. Sektor IT membantu peningkatan bagian ekspor dengan jumlah yang signifikan. Keempat, liberalisasi dalam aturan investasi oleh NRIs (non-resident Indian) menolong untuk meningkatkan cadangan devisa asing dengan jumlah yang signifikan, bahkan melebihi Singapura, dan negara NICs lain di Asia. Walaupun demikian, kebijakan liberalisasi berdampak negatif terhadap pertumbuhan GDP India selama tahun 2000-2003 yaitu 6-7% per tahun dan sebagian besar adalah pertumbuhan ekspor TI, sehingga secara keseluruhan terjadi penurunan pertumbuhan dari 22,2% menjadi 1,5% per tahun. Fenomena hasil industri piranti lunak dan sektor yang berhubungan dengan TI memperbesar kegagalan pasar dengan sangat buruknya melalui dua sisi, yaitu: Pertama, kegagalan untuk menyebarkan keuntungan dari pertumbuhan sektor industri terhadap sektor lain, seperti perdagangan dalam negeri dan pertanian, termasuk sektor jasa lainnya seperti pariwisata dan pembangunan infrastruktur. Kedua, kegagalan wirausahawan India untuk mengantisipasi pertumbuhan permintaan dunia akan jasa teknis seperti *handphone* dan komunikasi internasional, serta untuk melaksanakan investasi baru pada bidang ini.¹³⁹

Pada tahun 2004, PM Manmohan Singh mengumumkan program minimum umum dengan enam prinsip pemerintahan (governance), yang

¹³⁸ Robyn Meredith, *The Elephant and the Dragon: Fenomena Kebangkitan India dan Cina yang Luar Biasa serta Pengaruhnya terhadap Kita* (terjemahan), (Bandung: Penerbit Quacana, 2008), hal.35-46.

¹³⁹ *Op.Cit*, Jati K. Sengupta, hal.32

melingkupi langkah-langkah terhadap sektor industri, yaitu: Pertama, pengaktifan UU Jaminan Pekerjaan Nasional untuk menyediakan jaminan resmi bagi selambat-lambatnya 100 hari dan dimulai pada program pekerjaan umum. Kedua, pemerintah akan meyakinkan bahwa industri jasa akan didukung sepenuhnya untuk mengisi potensi pertumbuhan pekerjaan. Industri jasa ini mencakup jasa piranti lunak (software) dan industri yang menggunakan TI, perdagangan, penyaluran, transportasi, komunikasi, keuangan, dan pariwisata. Ketiga, pemerintah berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan kemajuan pendidikan serta dijadikan kriteria utama di tingkat kampus dan universitas. Serta pemerintah UPA (United Progressive Alliance yang beraliansi dengan DMK, RJP, dan RPI) berusaha meningkatkan dana pendidikan sekurang-kurangnya 6% dari GDP, dimana minimal setengah dari dana tersebut ditujukan bagi pendidikan dasar dan lanjutan.¹⁴⁰

4.5 Maladewa

4.5.1 Kebijakan Ekonomi dan Politik Maladewa

Pariwisata adalah sumber pertumbuhan ekonomi Maladewa sejak tahun 1990-an, yang menghasilkan banyak devisa yang dibutuhkan. Sektor ini mengambil bagian sebesar 34,5% dari jumlah GDP tahun 1995-1998, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 7,8% selama periode tersebut. Dengan logika keuntungan komparatif, pemerintah meningkatkan efisiensi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui privatisasi. Sejumlah perusahaan milik negara telah bekerjasama dengan perusahaan swasta dalam dan luar negeri. Pemerintah juga mengurangi keterlibatan yang terlalu besar terhadap pengelolaan perusahaan-perusahaan tersebut.¹⁴¹

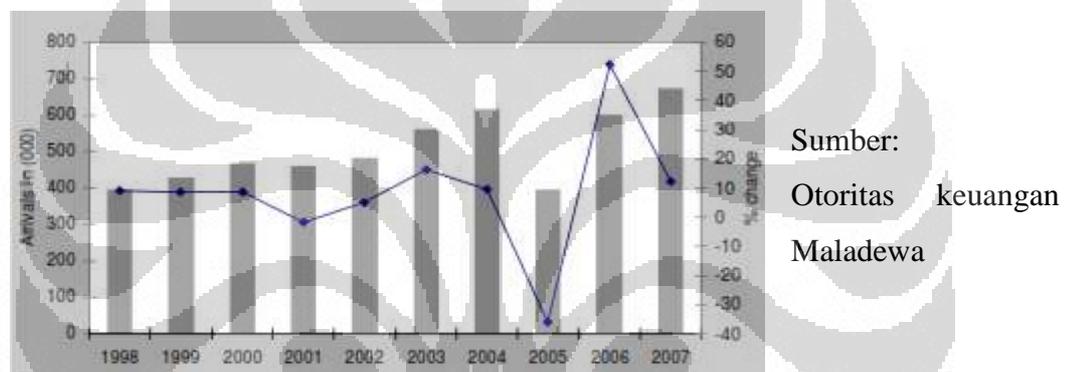
Perencanaan formal terhadap kepariwisataan dimulai pada tahun 1980 dalam bentuk Rencana Besar 10 tahun (10-year Master Plans). Rencana Besar 10 tahun yang pertama terdiri dari tahun 1982-1992, yang kedua diluncurkan pada tahun 1994 yang mencakup tahun 1996-2005, rencana ketiga mencakup rentang waktu tahun 2007-2011. Melalui rencana ini, perluasan pariwisata sampai ke pulau karang terluar dari kepulauannya. Sampai akhir tahun 2007, sebanyak 89

¹⁴⁰*Ibid*, Jati K.Sengupta, hal.34

¹⁴¹The Government of Maldives, *Loc.Cit*

tempat persinggahan turis telah beroperasi dan lebih dari 50 pulau tambahan sedang menjalankan pembangunan di berbagai tingkatan. Walaupun mengalami penurunan secara periodik pada industri pariwisata, namun tetap terjadi pertumbuhan kedatangan turis ke Maladewa selama tiga puluh tahun belakangan ini, dimana sekitar 650 ribu turis datang sampai pada tahun 2007 dengan rata-rata tingkat penghunia sekitar 83%. Fakta ini menyatakan keberhasilan industri pariwisatanya. Di bawah ini terdapat tabel yang berisi grafik jumlah kedatangan turis ke Maladewa dari tahun 1998-2007, dimana selalu terjadi kenaikan setiap tahunnya, kecuali tahun 2005 dan 2006.¹⁴²

Tabel 4.5 Grafik Jumlah Kedatangan turis ke Maladewa dari tahun 1998-2007



Di sisi lain, sektor perikanan mengambil bagian sekitar 7,2% dari jumlah GDP Maladewa, sedangkan sektor manufaktur bidang listrik dan air memiliki nilai *share* sebesar 2,4% dari total GDP-nya. Walaupun perikanan menjadi industri kedua terpenting di Malidives, namun negara ini sangat rentan dengan guncangan harga minyak dunia, dimana kalau harga minyak dunia naik, maka kapal untuk menangkap ikan menjadi tidak beroperasi apalagi karena jatuhnya harga ikan yang diekspor di pasar internasional.¹⁴³

Sebelum tahun 2000, jumlah ekspor perikanan Maladewa memiliki tambahan nilai yang sangat kecil sampai akhirnya sektor ini diliberalisasi dan mengakhiri dua puluh tahun monopoli negara terhadap pengadaan dan ekspor tuna. Sebelum diliberalisasi, ekspor ikan terdiri dari tuna *skipjack* yang bernilai

¹⁴² Ibrahim Naem, *Op.Cit*

¹⁴³ The Government of Maldives, (3rd UN Conference on LDCs, 14-20 Mei 2001), *Loc.Cit*

rendah dalam bentuk ikan yang dibekukan dan dikalengkan. Negara tujuan ekspor utamanya adalah Thailand.

4.6 Nepal

4.6.1 Kebijakan Ekonomi-Politik Nepal

Nepal mengakhiri konflik sepanjang satu dekade ketika para pemangku jabatan kunci mencapai kesepakatan melalui *Comprehensive Peace Agreement* pada tahun 2006 dan sukses melakukan pemilihan Majelis Konstituen (Constituent Assembly) pada tahun 2008. Negara ini telah berusaha membangun Nepal yang baru melalui struktur pemerintahan yang bertanggungjawab dan terbuka (inklusif). Selain itu, penyediaan layanan seperti pendidikan dan kesehatan meningkat seiring peningkatan kelompok-kelompok komunitas yang terlibat dalam pengambilan keputusan yang berefek terhadap kehidupannya. Sektor jasa adalah sektor yang kurang terpengaruh oleh instabilitas politik dan telah menjadi engeri pertumbuhan. Kontribusinya terhadap GDP Nepal sebesar 52% dari sebelumnya 46% sepuluh tahun yang lalu. Sektor ini bertumbuh pada rata-rata 5,8% pada tahun fiskal (FY) 2007 dan 2009. Tiga faktor yang membuat pertumbuhan sektor jasa tetap tinggi, yaitu kepariwisataan bertumbuh dari 5,6% menjadi 8,5%, telekomunikasi dengan pelayanan telepon yang bertumbuh dari 8% pada pertengahan tahun 2007 menjadi 28% pada tahun 2009, dan jasa pelayanan sosial dari 9% pada tahun fiskal 2009 menjadi 6,6% pada tahun fiskal 2010.¹⁴⁴

Untuk mengatur perdagangan dan investasi, pemerintah menetapkan beberapa UU dan peraturan, seperti UU Transfer Teknologi dan Investasi Asing tahun 1992, UU Usaha Perindustrian dan Kebijakan Perindustrian tahun 1992, UU Buruh tahun 1992, Peraturan dan UU Persatuan Dagang tahun 1992, UU Privatisasi tahun 1994, UU Pajak Pendapatan 2002, UU (Bank Sentral) Bank Rastra Nepal tahun 2002, Kebijakan Pekerjaan dan Buruh tahun 2005, Perjanjian Dagang Nepal-India tahun 2002, dan UU NRN tahun 2006.¹⁴⁵

¹⁴⁴ World Bank, *Nepal Economic Update April 2010*, diakses dari www.worldbank.org-NEPALEXTN pada tanggal 5 Maret 2012 pukul 13.37 WIB.

¹⁴⁵ Madan Kumar Dahal, et.al, *A Generic Guideline for Development through Economic Diplomacy*, (Nepal: Insititue of Foreign Affairs, 2008), hal.54.

4.7 Pakistan

4.7.1 Kebijakan Ekonomi-Politik Pakistan

Pakistan telah meliberalisasikan kebijakan perdagangannya secara signifikan selama lebih dari dua puluh tahun yang lalu (1990-an), walaupun kebijakan ekonomi Pakistan ini masih tergolong proteksionis oleh standar internasional. Pakistan telah mengurangi tarif impornya secara unilateral sehingga angka yang diterapkan sudah sesuai dengan komitmen para anggota WTO. Rata-rata tarif barang manufaktur terhadap Pakistan telah diturunkan sejak dikurangnya dari 30% menjadi 25% pada tahun 2002, walaupun memang kebanyakan tarif sensitif (pada produk tekstil dan sepeda motor) masih tetap tinggi.¹⁴⁶

Pengembangan industri Pakistan dikarakteristikan sebagai peralihan yang berulang dari penekanan inisiatif sektor privat dan intervensi sektor publik. Promosi ekspor dan industri substitusi impor telah digunakan sejak tahun awal untuk pembangunan negara yang berbasis industri. Sektor swasta telah memimpin pengembangan industri. Instrumen yang mendukung industri mencakup kebijakan kurs, insentif finansial, tarif, pengendalian kuantitatif dan non-kuantitatif. Sektor ini bertumbuh pada kisaran 9% per tahunnya, industri-industri yang memproduksi modal dan barang-barang tingkat menengah yang menunjukkan pertumbuhan kuat pada pertengahan tahun 1950-an. Pada tahun 1965, ekspor manufaktur Pakistan melebihi campuran India, Thailand, Turki, dan Korea Selatan, namun terjadi kesenjangan distribusi sumber daya di antara kelompok masyarakat dan berdasarkan daerah. Pada tahun 1980-an pemerintah menaikkan batas sebagian deregulasi dan liberalisasi ekonomi dan mendorong ekspor hasil industrialisasi. Tujuan kebijakan industrialisasi pada awal tahun 1990-an adalah menghasilkan lapangan pekerjaan, pengembangan usaha kecil menengah, dan promosi industri kunci (bioteknologi, *fiberoptic*, perlengkapan energi matahari, komputer dan piranti lunak, perlengkapan elektronika, dan pupuk). Pemberlakuan iklim bisnis yang lebih liberal, walaupun bertentangan dengan pernyataan kebijakan pada

¹⁴⁶ Sanjaya Lall dan John Weiss, "Industrial Competitiveness: The Challenge for Pakistan", Makalah Latar belakang untuk Asian Development Bank dalam *Seminars on International Competitiveness in Pakistan*, November 2003), diakses dari www.nttfc.org/reports/IndustrialCompetitiveness pada tanggal 28 Mei 2012 pukul 11.43 WIB.

tahun awal, masih belum ada usaha yang sistematis dan serius terhadap orientasi ekspor dan pembangunan regional, serta Pakistan belum memiliki keuntungan komparatif dalam industri yang dituju. Tujuan Rencana Lima Tahunan kedelapan (tahun 1993-1998) adalah meningkatkan daya saing sektor industri dengan mengadopsi strategi yang berorientasi ke luar, meliberalkan perekonomian, memprivatisasi industri, dan memperkenalkan inovasi teknologi serta meningkatkan pertumbuhan produktivitas.¹⁴⁷

4.8 Sri Lanka

4.8.1 Kebijakan Ekonomi dan Dinamika Politik Domestik

Sebagai reaksi terhadap hasil perekonomian yang kurang menguntungkan dari kebijakan ekonomi berorientasi ke dalam (inward-looking), Sri Lanka mulai melakukan proses liberalisasi ekonomi yang luas pada tahun 1977 dan menjadi negara pertama di kawasan Asia Selatan yang memberlakukan kebijakan ekonomi ini. Putaran reformasi pertama berlangsung pada tahun 1977-1979, yang meliputi perdagangan yang signifikan dan reformasi keuangan, seperti pergantian hambatan kuantitatif terhadap impor dengan tarif dan revisi struktur tarif untuk mendapatkan keseragaman yang lebih besar, mengurangi hambatan terhadap investasi asing dengan insentif baru terhadap investasi asing yang berorientasi ekspor di bawah skema zona perdagangan bebas yang menarik, menyesuaikan tingkat bunga melebihi rata-rata inflasi, membuka sektor perbankan terhadap bank asing, serta membebaskan pasar kredit untuk menentukan tingkat bunga, meletakkan dasar pada partisipasi sektor publik di dalam perekonomian, serta menciptakan sebuah program untuk privatisasi usaha publik, penyusunan kembali tingkat nilai tukar (kurs) dan insentif terhadap ekspor non-tradisional.¹⁴⁸

Reformasi kebijakan perdagangan merupakan elemen kunci dari paket kebijakan liberalisasi ekonomi yang diperkenalkan pada tahun 1977. Pada bulan November 1977, pembatasan tarif impor mendekati apa yang berlaku secara umum, digantikan oleh sistem tarif yang direvisi yang menahan hanya 280 jenis

¹⁴⁷ Zehra Aftab, et.al, *Industrial Policy and the Environment in Pakistan* (United Nations Industrial Development Organization, 11 Maret 2000), diakses dari www.citeseerx.ist.psu.edu pada tanggal 26 Mei 2012 pukul 12.09 WIB.

¹⁴⁸ Premachandra Athukorda, *Policy Reforms and Industrialization in Sri Lanka*, dalam Anjum Siddiqui, *Op.Cit*, hal.269

berdasarkan lisensi. Ketika banyak perubahan tarif yang mengalami peningkatan rata-rata diumumkan secara resmi, sebaliknya terjadi pengurangan tajam tingkat proteksi dalam pembuatan tarif yang disebabkan oleh rejim pembatasan kuantitatif keras. Sebagai bagian dari reformasi liberalisasi gelombang kedua yang dibentuk pada akhir tahun 1980-an, tarif impor jauh berkurang dengan tujuan untuk bergerak ke depan menuju tiga kelompok struktur tarif yang mencakup rata-rata 10, 20, dan 35%. Pada tahun 1997, tarif tekstil dihilangkan dan tarif impor pakain dikurangi secara drastis dengan pandangan untuk memfasilitasi perluasan ledakan industri garmen.¹⁴⁹ Walaupun sudah meliberalisasi perekonomiannya, sektor garmen Sri Lanka tidak lebih kompetitif jika dibandingkan dengan India, Pakistan, dan Bangladesh sampai dengan saat ini.

Proses reformasi ekonomi Sri Lanka kehilangan momentumnya pada awal tahun 1980-an karena sebuah peralihan prioritas kebijakan yang tidak menguntungkan terhadap penarikan proyek investasi yang berunsur politik, serta karena terjadinya penyerangan akibat konflik etnis. Keemasan liberalisasi gelombang kedua yang signifikan dilaksanakan pada awal tahun 1990-an, yang mencakup program privatisasi yang ambisius, pemotongan tarif dan penyederhanaan struktur tarif, penghapusan kendali kurs pada neraca transaksi berjalan, dan beberapa perubahan penting terhadap kebijakan investasi asing sejalan dengan meningkatnya orientasi ekonomi ke luar. Setelah memerintah selama 17 tahun, Partai Nasional Bersatu (the United National Party) reformis kehilangan kekuasaannya pada pemilu 1994 kepada Aliansi Masyarakat (the People's Alliances) sehingga menyebabkan iklim politik yang fluktuatif dan mau menerima ide baru terhadap kebijakan nasionalis dan proteksionis dengan pertumbuhan kecenderungan menurunnya partai-partai politik. Adapun, terjadi pemusatan kebijakan-kebijakan ekonomi yang luas di antara partai politik dan pengelompokan, yang mempertahankan keterbukaan terhadap perdagangan dan FDI yang disokong oleh dua parpol di Sri Lanka.¹⁵⁰

Pada saat perubahan kebijakan berorientasi pasar tahun 1977, sektor usaha kecil berjumlah lebih dari 60% dari total hasil manufaktur dan 50% dari lapangan

¹⁴⁹ *Ibid*, hal.270

¹⁵⁰ *Ibid*, Premachandra Athukorda, *Policy Reforms and Industrialization in Sri Lanka*, dalam Anjum Siddiqui, hal.269.

pekerjaan manufaktur. Sektor publik ini mendominasi dan tidak tergantikannya sampai pada pertengahan tahun 1980-an. Dari pertengahan 1980-an, posisi sektor usaha kecil terkikis oleh keberadaan sektor privat dan terjadi peningkatan privatisasi sektor usaha kecil ini pada tahun 1990-an sehingga hanya menjadi kurang dari 3% dari total hasil manufaktur sampai pada abad 21. Seperti yang diperkirakan, usaha pekerja, sektor usaha yang berorientasi pada ekspor yaitu yang menggunakan produk pakaian, alas kaki, barang yang terbuat dari karet, dan produk bulu mengindikasikan hasil pertumbuhan yang mengesankan. Andil persentase pakaian dalam total manufaktur yang menambah nilai dan dalam lapangan pekerjaan meningkat dari yang tadinya kurang dari 10% pada pertengahan tahun 1980-an menjadi lebih dari 35% pada pertengahan tahun 1970-an.¹⁵¹

4.9 Analisis Pengaruh Kebijakan Pemerintah untuk Menghasilkan Keuntungan Kompetitif Bangsa

Pada abad ke-17 dan ke-18, peran negara sangatlah dominan, dimana kebanyakan negara (nation states/league of states) memakai sistem pemerintahan monarkhi absolut dan kemudian berubah menjadi sistem pemerintahan yang mempopulerkan demokrasi; kedaulatan populer bercampur dengan nasionalisme pada abad ke-19 dan 20. Dan pada abad ke-21 ini, porsi peran negara (state actor) banyak diambil alih oleh perusahaan (firms) sebagai aktor non-negara yang merupakan gambaran negara masa kini (modern state). Nasionalisme dan demokrasi telah mengubah cara setiap negara berelasi satu sama lain serta menciptakan dasar-dasar baru terhadap konflik dan kerjasama. Realita ini menghasilkan empat jenis negara, yaitu negara kuat (tinggi kohesi/kerekatan sosial-politiknya), negara lemah, negara kekuatan kuat (*strong power* dalam hal kapabilitas militernya), serta negara berkekuatan lemah (*weak power* dalam hal kemampun militernya). Walaupun demikian, negara tetap memiliki tanggung-jawab besar terhadap daya saing ekonomi bangsanya.¹⁵²

Pada bagian ini, penulis menganalisis bagaimana peran tiap negara (state actor) anggota SAARC dalam peningkatan masing-masing daya saing ekonomi

¹⁵¹ *Ibid*, hal. 276 dan 279.

¹⁵² Barry Buzan dan Richard Little, *International System in World History: Remaking the Study of International Relations*, (US: Oxford University Press, 2000), hal.254-255.

negaranya berdasarkan kebijakan yang dikeluarkannya dan keefektifan dari kebijakan domestik tersebut. Dari tujuh negara anggota SAARC, dapat dikatakan bahwa liberalisasi ekonomi domestiknya (keterbukaan ekonomi dalam menerima investasi asing dan kompetisi industri dalam negerinya) menjadi faktor penyebab utama meningkatnya daya saing/ produktivitas sektor industrinya untuk menghasilkan produk komparatif menjadi kompetitif. Namun demikian, sebagian industri domestik di kawasan Asia Selatan masih terkategori sebagai industri “setengah matang” karena masih menggunakan teknologi rendah, contohnya dalam produksi produk tekstil (garmen), dan kurang melakukan inovasi untuk mendiversifikasi produknya ke sektor manufaktur yang nilai jualnya lebih tinggi.

4.9.1 Liberalisasi yang Terkendali

Biasanya, peran pemerintah dalam negara kategori LDCs (Least Developed Countries) lemah, terlihat dari ketidakmampuannya untuk mengatur keamanan negara, baik dalam hal keamanan ekonomi (kesejahteraan masyarakatnya), termasuk memberdayakan potensi sumber daya alamnya¹⁵³. Tapi tidak demikian halnya dengan pemerintah Bangladesh, dimana ide dari pengusaha diakomodir oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan industri dan pendanaan eksternal untuk mendapatkan input dengan harga internasional sehingga mendukung industri RMG-nya sejak tahun 1970-an menjadi kompetitif. Sebenarnya, Bangladesh mengalami kudeta militer dari pemerintahan sosial sebelum tahun 1975 menjadi pemerintahan yang cukup terbuka serta banyak diwarnai oleh ketidak-stabilan politik. Reformasi kebijakan ekonomi oleh pemerintah dapat dikatakan cukup berhasil sehingga bisa dikategorikan sebagai negara *strong state, weak power* karena memiliki kemauan untuk mendukung gerakan Asosiasi Eksportir dan Manufaktur Tekstil (BGMEA) dalam memperjuangkan hak buruh anak melalui diplomasi bersama ILO dan UNICEF tahun 4 Juli 1995. Hal ini menyatakan betapa pemerintah Bangladesh sangat berperan aktif dalam memperkuat hubungannya dengan masyarakatnya sehingga menjadi salah satu kunci keberhasilan dan tingginya tingkat daya saing industri RMG Bangladesh. Sejak tahun 1980-an Bangladesh, pemerintah aktif dalam membina kerjasama ekonomi dengan Korea Selatan untuk menanamkan

¹⁵³ *The Garment Industry and Government Role in Bangladesh, Loc.Cit*

modalnya dalam industri tekstil di Bangladesh dan memberikan pelatihan bagi pekerja pabrik tekstil. Selain itu, Bangladesh bekerjasama dengan pemerintah Uni Eropa (skema preferensi EU-GSP melalui *Everything but Arm Arrangement/EBA*) sehingga memberikan keuntungan untuk memudahkan produk RMG-nya memiliki akses pasar ke Uni Eropa, terutama pasca berakhirnya MFA. Pemerintah Bangladesh menyadari bahwa keberadaannya perlu untuk mengartikulasikan kepentingan nasional bangsanya, terutama dalam hal diplomasi ekonomi. Kelemahan Bangladesh, seperti yang juga tercatat dalam studi pustaka, bahwa korupsi dan sistem administrasi domestiknya yang buruk mengurangi kepercayaan investor asing untuk menanamkan modalnya, termasuk faktor infrastruktur.

Demikian juga halnya dengan peran negara di India dalam mereformasi kebijakan ekonominya menjadi terbuka untuk menggalang dana dan tidak membatasi pihak swasta untuk memproduksi jenis barang melalui kebijakan “license raj”. India dapat dikategorikan sebagai negara kuat (strong state) dengan *strong power* karena mampu menghadirkan keamanan dalam negeri melalui kapasitas militernya untuk mendukung iklim perindustrian yang nyaman dengan sistem pemerintahan yang sangat demokrasi. Walaupun pemerintah India membebaskan aktivitas ekonominya, namun pemerintah masih memegang peranan penting dan pasar tidak bebas sebebaskan menurut filosofi *laissez-faire* (to leave alone).

Di India, negara menjadi inisiator utama dalam mengatur strategi kebijakan ekonominya untuk meningkatkan daya saing produk tekstil dan TI-nya, baik secara langsung melalui kebijakan perdagangan/industri dengan mengundang investasi asing melalui liberalisasi perdagangan, maupun secara tidak langsung melalui peningkatan kualitas pendidikan dan penguasaan teknologi warganya sehingga menghasilkan pekerja yang terdidik dan terlatih. Kemampuan India ini lahir dari visi pemerintahnya untuk menjadikan negaranya sebagai ekonomi kekuatan dunia sejak tahun 1991. Saat ini, mimpi itu sudah menjadi kenyataan dimana India menjadi salah satu negara sebagai kekuatan dunia yang sedang diperhitungkan, selain China, khususnya setelah merosotnya kekuatan ekonomi AS dan Jepang, masing-masing terutama karena krisis finansial global 2008 (subprime mortgage). Indikator kekuatan India ini diukur dari tingkat

penguasaan teknologinya yang banyak diterapkan terhadap produk industri domestiknya, jumlah penduduknya yang menjadi terbesar kedua di dunia (hal ini menjadi kekuatan karena penduduknya bisa menjadi pasar penjualan barang domestik yang sangat besar), negara demokratis terbesar di dunia, serta memiliki kekuatan militer yang disegani di kawasan Asia (kemampuan rudalnya). Hal ini menjadi sumber *power* dan *leverage* India di dalam arena internasional untuk memuluskan pengartikulasian kepentingan nasionalnya.

Sebenarnya, pemerintah India sudah membuktikan kepada dunia mengenai komitmennya untuk aktif di level internasional dan kompetitif di level domestik. India juga sudah mengurangi sifat buruknya, yaitu sering berkonflik dengan negara tetangga di kawasan Asia Selatan, terutama dengan Pakistan melalui pemberian status MFN (Most Favored Nation) untuk meningkatkan kerjasama ekonomi-perdagangan. Walaupun demikian, ketakutan akan dominasi (hegemoni) dan surplus perdagangan India di Asia Selatan masih menghasilkan keengganan Pakistan, dan Bangladesh (kecuali Nepal dan Bhutan yang memang menjadikan India sebagai mitra dagang utama) sebagai mitra dagangnya sehingga membuat India juga tidak terlalu banyak memberikan andil dalam nilai perdagangan intra-kawasan Asia Selatan. Hal ini ditambah dengan kurangnya *political will* dari India untuk menjadikan dirinya sebagai sahabat, bukan hegemon, bagi semua negara tetangga di kawasan Asia Selatan, contohnya dengan cara memberikan bantuan tanpa banyak campur-tangan (intervensi) terhadap kebijakan ekonomi-politik negara yang dibantu seperti yang dilakukannya terhadap Bangladesh yang akhirnya menghasilkan konflik.

Pakistan juga cukup membuka negaranya terhadap mekanisme pasar, walaupun pemerintah masih menetapkan batas intervensi dan batas deregulasi ekonominya. Kebijakan ekonomi terbuka ini menghasilkan kemajuan dalam sektor industrinya, seperti industri tekstil di Pakistan. Namun demikian, kebijakan pemerintah ini terhambat oleh kapabilitas dalam pelaksanaannya. Sehingga walaupun dapat dikategorikan sebagai *strong power*, tetapi ia masih menjadi *weak state* karena tidak dapat menyelaraskan kebijakan ekonomi sebagai pilihan politik (*political choice*) dengan fakta di dalam akvitas ekonomi lingkungan sosial masyarakatnya. Selain itu, dalam hal produk T&C, Pakistan cukup tertinggal

dengan pesaingnya, yaitu India dan Bangladesh, terutama pasca berakhirnya MFA tahun 2005. Hal ini dikarenakan penggunaan mesin berteknologi tinggi dalam perindustriannya masih tergolong lebih rendah jika dibandingkan dengan India dan Bangladesh terutama dalam mendiversifikasi jenis produk pakaian dan tekstilnya. Pakistan juga kesulitan untuk menembus pasar Uni Eropa karena negaranya tidak tergolong sebagai non-Least Developed Countries sehingga tidak diberikan kebebasan tarif seperti Bangladesh (LDCs) di bawah skema EBA¹⁵⁴. Hal ini membuat penurunan jumlah ekspor produk tekstil Pakistan, terutama setelah tahun 2005. Di sisi lain, Pakistan sepertinya tidak bersemangat untuk menurunkan hambatan tarif terhadap barang impor dari negara anggota SAARC lainnya, terutama impor dari India. Hal ini dikarenakan sikapnya yang belum bisa menerima India sepenuhnya, termasuk tawaran pemberian status MFN oleh India kepada Pakistan. Keengganan Pakistan ini membuat nilai perdagangan intra-kawasan Asia Selatan menjadi cenderung statis karena India dan Pakistan adalah dua negara ekonomi terbesar di kawasan tersebut, serta memiliki jumlah penduduk sebagai konsumen untuk memasarkan barang antara kedua negara tersebut. Jika Pakistan mau untuk membuka pasarnya dengan India, maka kemungkinan besar akan menaikkan volume perdagangan intra-kawasan SAARC, terutama melalui mekanisme SAFTA.

Selain itu, pemerintah Pakistan juga kurang bersedia untuk memperbaharui hubungan bilateralnya dengan India. Baru akhir-akhir ini saja Pakistan menaruh sedikit perhatian terhadap tawaran kerjasama perdagangan India. Padahal jika pemerintah Pakistan “melunakkan” hatinya untuk menyelesaikan konflik Kashmir dengan India, maka banyak manfaat positif yang bisa didapatkannya, termasuk dalam alih teknologi dari India. Perilaku pemerintah Pakistan ini cenderung menunjukkan bahwa pertimbangan militer menjadi yang dominan dalam pengejawantahan politik luar negerinya, walaupun kurang berdampak positif terhadap peningkatan perekonomiannya. Pakistan tidak mau seolah-olah tunduk

¹⁵⁴ Skema EBA (Everything but Arm) adalah pembebasan tarif masuk yang diberikan oleh Uni Eropa kepada negara LDCs (Least Developed Countries) untuk 7218 jenis produk (kecuali senjata, beras, pisang, dan gula). Lihat Dr.Sajid Akhtar, *Post ATC Threats to Pakistan Textiles and Clothing Exports: Identification of Product at A Disaggregate Level*, (Pakistan: Pakistan Institute of Trade and Development), hal.38-39.

kepada India karena ia juga memiliki keinginan menjadi negara hegemon di kawasan Asia Selatan.

Bhutan dan Nepal sebagai negara yang baru mengalami perubahan sistem pemerintahan dari kerajaan dengan kebijakan feodal serta orientasi ekonomi untuk kecukupan diri sendiri (self-sufficient) menjadi negara demokratis dan tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan produk komparatifnya menjadi produk kompetitif karena pemerintahnya tidak memiliki kapasitas/kapabilitas sumber daya manusia yang memadai untuk mengusahakan kesejahteraan penduduknya, walaupun memang kondisi sosial-politik domestiknya cukup stabil, seperti tidak terjadinya aksi kudeta militer. Perbedaannya, politik luar negeri Nepal yang lebih terbuka dengan dunia internasional sejak awal abad 19 dan 20 membuat negaranya banyak dibantu oleh negara lain dalam mengembangkan perekonomiannya¹⁵⁵. Sebaliknya, politik luar negeri Bhutan baru sedikit terbuka dengan dunia internasional melalui reformasi kebijakan oleh raja ketiganya pada tahun 1950-an sehingga membuat negara ini cenderung isolasionis dulunya¹⁵⁶ terhadap terhadap dunia internasional sehingga negara lain sulit untuk membantu Bhutan, terutama dalam hal investasi asing langsung (FDI) untuk mengembangkan perekonomiannya. Selain itu, Bhutan dan Nepal dapat dikategorikan sebagai negara *weak state* dengan *weak power* sehingga sangat bergantung pada negara besar, contohnya India, sebagai mitra dagang utama serta mengandalkan bantuan luar negeri untuk mengembangkan perekonomiannya.

Kondisi India cukup berbeda dengan Sri Lanka yang sudah melakukan liberalisasi ekonomi tahun 1977 di Asia Selatan, namun tingkat ekspor industri unggulan, yaitu tekstil, masih lebih kecil dibandingkan India, Pakistan, dan Bangladesh. Ternyata, hal ini dikarenakan terlalu kuatnya unsur politik di dalam lingkungan aktivitas perekonomiannya sehingga kurang menghasilkan kerekatan hubungan antara pemerintah dan sektor bisnis (swasta) yang ingin menanamkan investasinya di sana. Sri Lanka digolongkan sebagai *weak state* dengan *strong power*. Kekuatan militernya mulai terbukti dengan ditangkapnya pemimpin gerakan separatis dan pengacau, LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam),

¹⁵⁵ Karma Galay, *International Politics of Bhutan*, diakses dari www.bhutanstudies.org.bt/pubFiles/v10/8 pada tanggal 2 Juni 2012 pukul 18.16 WIB.

¹⁵⁶ *International Politics of Bhutan, Loc.Cit*

Vellupilia Prabhakaran pada bulan Mei 2009, dan penguasaan pasukan pemerintah terhadap daerah kekuasaan kelompok ekstrimis ini.¹⁵⁷ Dari sisi politik internasionalnya, Sri Lanka sangat aktif dalam menjalin kerjasama dengan negara lain dan mendapat bantuan asing dari AS, India, dan China walaupun Sri Lanka memiliki polugri yang bersifat netral (non-aligned).¹⁵⁸

Keaktifan pemerintah Sri Lanka dalam menjalin kerjasama perdagangan bebas, seperti dengan India dan Pakistan, dan dana bantuan internasional tidak diikuti dengan peningkatan kualitas daya saing industri domestiknya secara bersamaan. Hal ini terbukti bahwa sektor swasta dan bisnis TI kurang dikembangkan di dalam negaranya, walaupun Presiden Mahinda sudah mencetuskan “Pemikiran Mahinda” (Mahinda Chintana) tahun 2005 dan 2010 untuk menuntun kebijakan ekonomi pemerintah dalam mengembangkan perekonomiannya, mengurangi kemiskinan, dan menjadi negaranya sebagai *hub* bandara, energi, perdagangan, dan penerbangan dengan membangun infarastruktur serta tidak memprivatisasi sektor-sektor BUMN strategis.¹⁵⁹ Walaupun demikian, produk kebijakan ini sudah melambangkan visi dan komitmen yang kuat dari Presiden Mahinda untuk meningkatkan daya saing Sri Lanka dalam jangka panjang. Sebaiknya, sektor swasta juga harus sadar dan mendukung upaya pemerintahnya. Kerjasama antara pemerintah, asosiasi industri dan perusahaan besar (khususnya industri tekstil) dalam hal menyejahterahkan buruh pabrik melalui peningkatan upah kerja dan tingginya tingkat kesadaran perusahaan untuk menyalurkan CSR (Corporate Social Responsibility) menurut laporan Lembaga Penelitian Ekonomi Internasional India tahun 2007.¹⁶⁰

Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Maladewa adalah keributan oleh tentara bayaran Tamil Sri Lanka pada tahun 8 November 1988, yang membuat mantan Presiden Maladewa, Gayoom (2003-2008), meminta pasukan India untuk menekan para pengacau tersebut pada bulan September 2003.¹⁶¹ Demikian juga dengan protes dari kaum oposisi yang menurunkan Presiden

¹⁵⁷ *Background Note: Srilanka*, diakses dari www.state.gov/r/pa/eibgn/5249.htm pada tanggal 7 Juni 2012 pukul 15.20 WIB.

¹⁵⁸ *Background Note: Srilanka, Loc.Cit*

¹⁵⁹ *Ibid, Background Note: Srilanka*

¹⁶⁰ *Deepening Intra-regional Trade and Investment in South Asia, Loc.Cit*

¹⁶¹ *Background Note: Maladives, Loc.Cit*

Nasheed (29 Oktober 2008 s/d Februari 2012) atas alasan penahanan Abdullah Muhammed tanpat surat penangkapan legal sehingga menimbulkan konfrontasi antara pendukung MDP (Maldivian Democratic Party yang didirikan oleh Nasheed) dengan polisi.¹⁶² Hal ini menandakan bahwa pemerintah Maladewa kurang memiliki kapabilitas untuk menghasilkan kestabilan politik sehingga dapat dikategorikan sebagai *weak state* dengan *weak power*. Namun demikian, pemerintah Maladewa secara aktif berpartisipasi dalam banyak kerjasama internasional, contohnya dengan berbagai lembaga di PBB (terutama menyangkut HAM, demokrasi, transparansi, dan *good governance*), kerjasama ekonomi multilateral dengan WTO dan bilateral dengan India sejak tahun 1981 dan sedang membangun kerjasama investasi dengan Malaysia. Hal ini menandakan bahwa pemerintah Maladewa berusaha untuk meningkatkan daya saing bangsanya, terutama sektor pariwisata dan perdagangan, tidak hanya mengandalkan kemampuan perusahaan domestik, tetapi juga memanfaatkan posisinya sebagai anggota organisasi dunia dan regional melalui diplomasi ekonominya, serta meminta pinjaman dari IMF. Hasilnya, sektor pariwisata menjadi penyumbang pendapatan nasional terbesar bagi Maladewa.

Maladewa memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pariwisatanya tanpa mengembangkan sektor industri perikanan dan agrikultur sangat beresiko karena bencana alam, seperti tsunami 2004 sangat berdampak buruk terhadap pendapatan domestik Maladewa akibat rusaknya tempat penginapan (resort) di beberapa pulauanya dan beberapa infrastruktur pariwisata (seperti kapal penumpang). Pemerintah Maladewa juga tidak aktif untuk mempromosikan FDI dan hanya memberikan sedikit dorongan terhadap sektor perikananannya, dimana seharusnya lembaga pemerintah harus aktif meningkatkan level pelatihan teknis dan modernisasi metode manajemen kebijakan perikanan.¹⁶³ Defisit anggaran fiskalnya menjadi lingkaran setan bagi pengembangan kepariwisataan karena pendapatan sektor wisata harus disalurkan untuk pengeluaran pemerintah yang cukup besar. Selain itu, pemerintah Maladewa juga sangat rentan terhadap intervensi asing (seperti lembaga pinjaman

¹⁶² *Ibid*, Background Note: Maladewa

¹⁶³ *Climate Change Fisheries, Trade, Competitiveness: Understanding Impacts and Formulating Response for Commonwealth Small States*, Loc.Cit

IMF) terhadap peningkatan daya saing industri domestiknya karena pinjaman tersebut mengisyaratkan agar pemerintah Maladewa memprivatisasi lembaga pemerintahnya sementara tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui pendidikan, dan stabilitas politik untuk menarik investor asing dalam mengembangkan perekonomiannya.

4.9.2 Perbandingan Integrasi Ekonomi SAARC, ASEAN, NAFTA dan UE

Kondisi ideal dalam integrasi ekonomi regional adalah situasi perekonomian yang merata dan sistem ekonomi intra-kawasannya yang bersifat komplementer. Faktanya, alasan mengapa persentase perdagangan intra-kawasan ASEAN yang bisa berada pada kisaran 25% adalah karena terdapat beberapa negara, seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia yang cukup produktif dalam menghasilkan produk kompetitif dan komplementer, walaupun memang rencana pembentukan integrasi ekonomi ASEAN tidak diiringi oleh upaya yang sama untuk mengatasi ketimpangan ekonomi antar anggota. Untuk Uni Eropa (UE) sendiri, yang disebut sebagai salah satu bentuk integrasi ekonomi yang sukses karena persentase perdagangan intra-kawasannya mencapai 65%, terdapat kondisi tingkat diversifikasi sosial-ekonomi antar negara anggotanya, dimana lima belas negara anggotanya tergolong ke dalam negara maju. Kondisi ini menciptakan situasi yang mendorong kemajuan ekonomi negara anggotanya yang lain, yang digolongkan sebagai negara berkembang.¹⁶⁴

Perdagangan intra-kawasan Amerika Utara melalui NAFTA juga dikategorikan sukses karena meningkat secara drastis, yaitu sekitar 227% antara tahun 1993-2008 dengan jumlah perdagangan barang dan jasa sekitar 15,3 triliun dollar AS per tahun menurut Bank Dunia. Sebelumnya, pangsa pasar Meksiko didominasi oleh Kanada dan AS, tetapi kemudian *share* Meksiko juga meningkat secara dramatis dalam perdagangan trilateral ini. Impor Meksiko dari Kanada meningkat 704% dan eksportnya ke Kanada meningkat sebesar 482%. Sedangkan impor Meksiko dari AS meningkat sebesar 236% dan eksportnya ke AS meningkat sebesar 440%. Bahkan, sejak implementasi NAFTA, tiga negara juga mengalami

¹⁶⁴ Anissa F. Mariana, Implikasi Perkembangan Ekonomi China dan Rencana Penerapan Pasar Tunggal ASEAN 2015 dalam Zainuddin Djafar, Peran Strategis Indonesia dalam Pembentukan ASEAN & Dinamikanya, (Jakarta: UI Press, 2012), hal.175-176.

pertumbuhan ekonomi. Khusus untuk Meksiko, kebanyakan industri domestiknya masih terkategori dalam sektor yang rendah nilai tambahnya dan barang-barang berteknologi tinggi diproduksi di luar negeri dan kemudian dirakit di Meksiko, ditambah dengan penghilangan tarif membuat agrikultur AS yang disubsidi menjadi ancaman bagi kekompetitifan bagi ekspor AS.¹⁶⁵

Sebaliknya, strategi pemerintah di dalam meningkatkan daya saing produk ekspornya di pasar Asia Selatan sangatlah kurang, terutama dalam proses integrasi ekonomi kawasan tersebut melalui SAPTA dan SAFTA. Contoh yang paling nyata adalah pengalaman Maladewa. Memang benar, Maladewa menikmati akses preferensial terhadap kawasan pasar terhadap produk terpilih, tetapi proporsi ekspor dalam perdagangannya hanya terbatas yaitu sekitar 16% dari total ekspor selama tahun 2001-2005. Itupun hanya ekspor ikan yang dikeringkan dan digarami ke Sri Lanka sehingga Maladewa jelas-jelas tidak dapat mengambil keuntungan komparatif dari kesepakatan SAPTA. Sebelumnya, sektor garmen Maladewa mengimpor bahan tekstil dari kawasan lain, tetapi akhirnya industri garmen tersebut bangkrut dengan berakhirnya kuota MFA tahun 2004.¹⁶⁶

Ditambah lagi, dua negara penyumbang nilai ekspor dan impor terbesar di Asia Selatan, yakni India dan Pakistan, tidak menjadikan kawasan ini menjadi mitra dagang utama, melainkan Uni Eropa, AS, China, dan Emirat Arab. Bahkan, India mengembangkan kebijakan luar negeri “Look East Policy”, terutama ke kawasan Asia Timur, karena ingin memasarkan produk-produk manufakturnya yang berteknologi tinggi. Pakistan pun mulai mendekatkan negaranya ke ASEAN sebagai *sectoral partner* dan berusaha untuk menjadi *full dialogue partner*, walaupun ditolak oleh ASEAN pada tahun 2011 karena alasan tidak menguntungkan secara ekonomi.¹⁶⁷ Fakta inilah yang juga menyebabkan nilai perdagangan intra-kawasan Asia Selatan sangat rendah, walaupun Nepal, Bhutan,

¹⁶⁵ *Economy and Trade and Trade (NAFTA)*, diakses dari <http://worldsavvy.org/monitor/index.php> pada tanggal 4 Juli 2012 pukul 13.50 WIB.

¹⁶⁶ *Climate Change Fisheries, Trade, Competitiveness: Understanding Impacts and Formulating Response for Commonwealth Small States*, Loc.Cit

¹⁶⁷ *ASEAN refuses to upgrade Pakistan status*, diakses dari <http://www.thenews.com.pk/TodaysPrintDetail.aspx?ID=47338&Cat=3> pada tanggal 30 Juli 2012 pukul 17.30 WIB.

India, China, Korea Selatan, Jepang, dan Australia telah mendapat pengakuan sebagai *full dialogue partner* ASEAN.

dan Maladewa memiliki persentase *share* perdagangan yang tinggi, terutama dengan India.

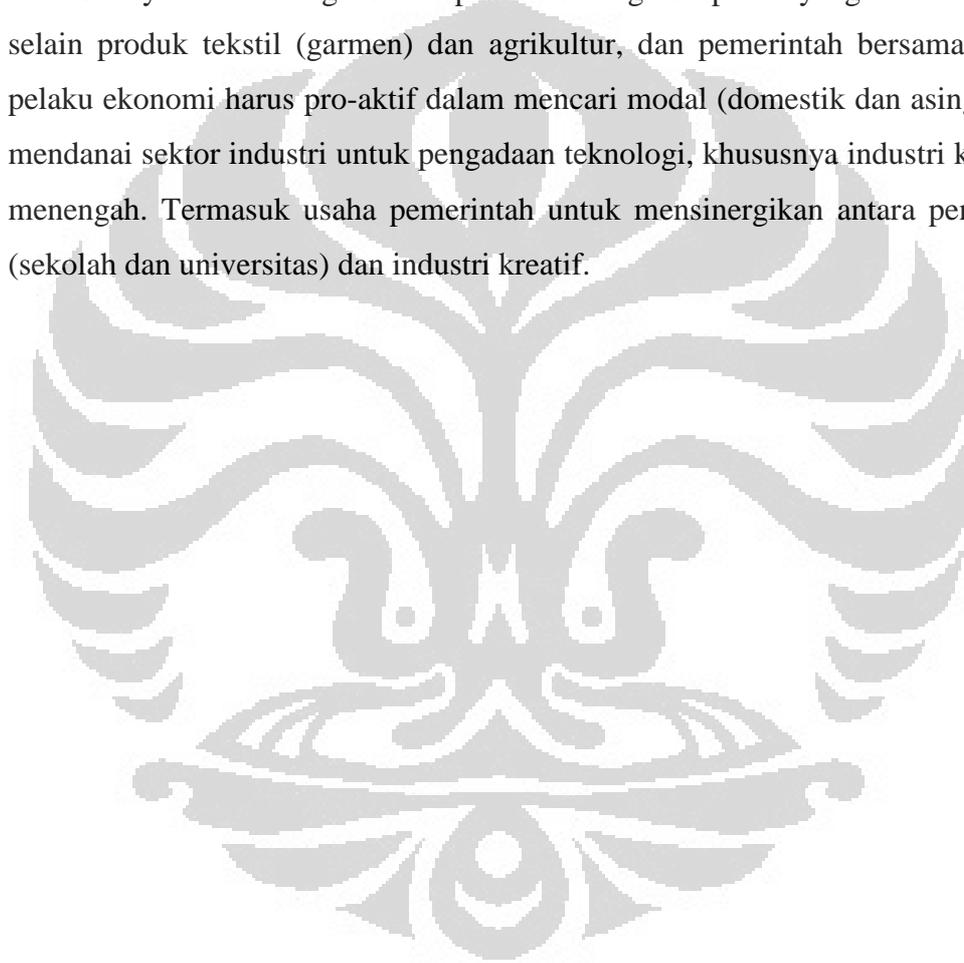
Memang benar bahwa tiap negara sudah berusaha untuk meningkatkan daya saing produk domestiknya melalui kebijakan industri dan perdagangan yang beragam, namun pemerintah tiap-tiap negara anggota SAARC belum mau “mengikatkan” dirinya dan berkomitmen (*political willing*) penuh untuk mensukseskan kerjasama perdagangan intra-kawasan Asia Selatan. Isu ekonomi di Asia Selatan sebagian besar dipolitisasi sehingga menjadi kurang berkembang, apalagi jika rejim yang berkuasa kurang memperhatikan peningkatan daya saing ekonomi yang terlihat dari fakta bahwa tidak semua negara bersedia menurunkan tarif masuk barang impor dari negara tetangga di kawasan Asia Selatan dengan segera. Hal ini menegaskan bahwa perjanjian integrasi regional sering dimotori oleh kebijakan luar negeri dan pertimbangan keamanan nasional, dimana biaya ekonomi dihargai sama dengan harga untuk mendapatkan kepentingan non-ekonomi.¹⁶⁸

Kerjasama integrasi ekonomi (perdagangan bebas) melalui SAPTA dan SAFTA ini lebih dimotivasi oleh faktor politik dan keamanan, dibandingkan keuntungan ekonomi (efisiensi yang menghasilkan skala ekonomi), dimana mereka memakai keanggotaan SAARC sebagai alat *bargaining position* terhadap dunia internasional. Fakta ini secara mengisyaratkan bahwa kerjasama perdagangan (regionalisme ekonomi atau *trading bloc*) Asia Selatan tidak didorong oleh pengalaman tiap negara anggota SAARC akan tindakan proteksionis dari negara-negara Eropa dan Amerika yang mempersulit dan mendikte akses pasarnya di tingkat global. Lebih jauh lagi, dapat dikatakan bahwa kebanyakan anggota SAARC tidak memiliki mimpi dan tujuan (*goal*) yang sama dalam kerjasama regional ini, serta seringkali agenda di tingkat regional tidak sejalan (*incompatible*) dengan kebijakan domestik pemerintah tiap negara anggota SAARC. Walaupun memang dari sudut pandang regionalisme, SAARC melalui mekanisme SAPTA dan SAFTA telah berhasil untuk mendorong anggotanya untuk bergandengan-tangan dalam kerjasama non-politis, terutama ekonomi,

¹⁶⁸ Bernard M. Hoekman dan Michael M. Kustecy, *The Political Economy of the World Trading System: The WTO and Beyond*, edisi kedua, (UK: Oxford University Press, 2001), hal.349.

dimana terdapat peningkatan secara fungsionalis dan bertahap dalam pengembangan bisnis intra-kawasan.

Singkatnya, SAARC cukup berhasil dalam menciptakan perdamaian yang memungkinkan tiap anggotanya untuk saling berdagang, walaupun persentasenya tidak sebesar kawasan lain, seperti ASEAN, NAFTA, bahkan Uni Eropa. Dan hal lain yang harus dicapai untuk menghasikan perdagangan intra-kawasan yang tinggi adalah tiap negara di Asia selatan harus mendorong perusahaan domestiknya untuk menghasilkan produk barang kompetitif yang terdiversifikasi, selain produk tekstil (garmen) dan agrikultur, dan pemerintah bersama dengan pelaku ekonomi harus pro-aktif dalam mencari modal (domestik dan asing) untuk mendanai sektor industri untuk pengadaan teknologi, khususnya industri kecil dan menengah. Termasuk usaha pemerintah untuk mensinergikan antara pendidikan (sekolah dan universitas) dan industri kreatif.



BAB V

KESIMPULAN

5.1 Pengaruh Daya Saing tiap Negara anggota SAARC terhadap Keberhasilan Liberalisasi Perdagangan Regional Asia Selatan 2000-2010

Berdasarkan pemaparan dan analisis di bab sebelumnya, maka ada empat hal penting yang dapat disimpulkan untuk menegaskan hipotesis tentang korelasi antara daya saing dan keterbukaan ekonomi di tingkat regional, yaitu: Pertama, harus diakui bahwa keterbukaan (liberalisasi) ekonomi mulai tahun 1970-an menjadi salah satu faktor penyebab utama meningkatnya perekonomian sebagian besar negara di Asia Selatan. Secara perlahan-lahan, investasi asing (FDI) dan masuknya beberapa perusahaan asing (MNCs) menjadi stimulan peningkatan daya saing industri tiap negara. Investasi asing dibutuhkan untuk mendanai pembukaan dan pengadaan industri serta peralatan untuk mengoperasikannya. Perusahaan asing dan beberapa privatisasi perusahaan negara menghasilkan persaingan yang ketat sehingga industri yang tidak mampu bersaing akan bangkrut, walaupun pemerintah masih memproteksi beberapa industri “bayi” (infant), contohnya dukungan kuat pemerintah Bangladesh terhadap produksi garmennya.

Daya saing negara (dari kombinasi peran kebijakan pemerintah dan kemampuan industri domestik) menjadi faktor dominan yang akan lebih berperan untuk mendorong dari tiap-tiap negara mau berdagang satu sama lain karena mereka sudah sanggup untuk menghasilkan produk/jasa kompetitif (harga dan diversifikasi produk) dibandingkan akibat kebijakan liberalisasi atau integrasi ekonomi regional. Kebijakan liberalisasi regional (integrasi ekonomi kawasan) ini hanya berfungsi sebagai mekanisme yang menciptakan lingkungan kawasan yang bebas hambatan sehingga memudahkan mereka berdagang satu sama lain. Itu artinya kemampuan dan kemauan tiap-tiap negara untuk bersaing di tingkat makro (internasional) hanya akan terjadi jika kemampuan di tingkat domestik (negara) sudah diperkuat terlebih dahulu. Karena berdagang sama dengan berkompetisi.

Kedua, hanya India, Bangladesh, Pakistan, dan Sri Lanka yang dapat dikategorikan sebagai negara yang produktif dalam memproduksi barang yang

memiliki keunggulan komparatif, kemudian mengembangkannya untuk menghasilkan keuntungan kompetitif bagi negaranya melalui perdagangan intra-kawasan. Hal ini terbukti dari tingginya nilai ekspor keempat negara ini dalam perdagangan intra-kawasan SAARC, terutama selama tahun 2007-2010. Nepal, Maladewa, dan Bhutan hanya sanggup menghasilkan keuntungan komparatif bagi negaranya karena hanya menguasai satu determinan (yaitu kondisi faktor alam) berdasarkan Teori Keunggulan Daya saing Porter. Artinya, mereka sangat bergantung pada faktor yang sifatnya *inherent*, bukan hasil kreasi (creation) penduduknya. Namun demikian, Bangladesh, Pakistan, dan Sri Lanka juga tidaklah sepenuhnya menguasai empat determinan Porter, dimana mereka juga sangat mengandalkan faktor alam, faktor permintaan domestik akan produk tekstil, serta keberadaan industri pendukung yang tidak terlalu banyak dibandingkan dengan India. Fakta ini menjadi bukti pendukung bahwa rendahnya tingkat perdagangan intra-kawasan Asia Selatan terjadi karena tidak semua negara diuntungkan melalui mekanisme SAPTA dan SAFTA tahun 2000-2010. Jika semua pemerintah dari masing-masing negara anggota SAARC secara aktif mendorong industri domestiknya produktif dalam menghasilkan barang kompetitif (harga dan diversifikasi jenis) berdasarkan empat determinan Porter, maka tiap-tiap negara akan memiliki keuntungan kompetitif yang mendorong perdagangan di kawasan tersebut.

India menjadi negara yang akan sangat diuntungkan dalam pasar perdagangan intra-kawasan Asia Selatan karena memiliki banyak produk yang berdaya saing tinggi dibanding negara tetangganya. Tingginya daya saing sebagian besar produk India dibanding dengan negara lain di kawasan itu tidaklah semata-mata didasarkan atas kemampuan industri domestiknya, namun karena ada dukungan pemerintah (P.M. Rajiv Gandhi dan Menteri Ekonomi Manmohan Singh) yang kuat sejak tahun 1991 dalam mereformasi/meliberalisasi perekonomiannya. Dukungan pemerintah ini berupa kebijakan perdagangan (perlindungan terhadap industri bayi/infant), suntikan dana, serta peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan penduduknya, khususnya dalam bidang teknologi. Demikian juga yang dialami oleh Bangladesh, Sri Lanka, dan Pakistan dimana pemerintahnya menjadi motor penggerak dalam mendorong industri

dalam negerinya untuk produktif menghasilkan barang yang bisa diperdagangkan (diekspor) sehingga menghasilkan devisa bagi negara. Kelemahan dari produksi tekstil Asia Selatan, kecuali India dan Pakistan, adalah rendahnya tingkat komplementaritas (saling-melengkapi) karena kurang inovasi dan diversifikasi produk sebagai bagian dari kompetisi daya saing menurut Porter. Hal ini diakibatkan industri domestik terlalu lama berkuat pada produksi barang berteknologi-rendah dan tidak meningkatkan kapabilitas dalam menghasilkan produk manufaktur lain, seperti alat elektronika, kendaraan bermotor, dan industri lain yang akan menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada industri tekstil dan agrikultur. Seharusnya terdapat diversifikasi jenis industri ke bidang berteknologi tinggi.

Ketiga, kombinasi stabilitas politik dalam dan luar negeri serta keterbukaan ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap kemajuan industri domestik tiap-tiap negara di Asia Selatan. Stabilitas politik domestik juga masih menjadi hambatan di Bangladesh dan stabilitas keamanan di Sri Lanka. Bhutan adalah negara yang selama puluhan tahun sangat isolasionis dan orientasi ekonominya hanya ditujukan untuk memproduksi kebutuhan terhadap permintaan domestik (self-sufficient) sehingga tidak membuat industrinya terpacu untuk berkompetisi dengan industri dari negara lain, termasuk kurangnya dana investasi asing dalam penyediaan teknologi untuk mengembangkan sektor pariwisata dan *hydropower*-nya di Bhutan. Begitu juga dengan Nepal yang kurang mampu meningkatkan keuntungan daya saing melalui maksimalisasi keuntungan sektor pariwisata dan *hydropower* walaupun politik luar negeri Nepal tidak se-isolasionis Bhutan.

Keempat, keberadaan kerjasama ekonomi regional, melalui SAPTA (1995-2005) dan SAFTA (2006-2016), tidak secara langsung memberikan implikasi positif terhadap peningkatan nilai perdagangan intra-kawasannya yang selalu lebih rendah jika dibandingkan kawasan lain, seperti Uni Eropa, ASEAN, dan NAFTA selama tahun 2000-2010. Sepertinya peningkatan nilai perdagangan intra-kawasan ini membutuhkan waktu dan proses yang lama. Walaupun memang, kerjasama ekonomi sudah berdampak dalam menurunkan tingkat ketegangan dan konflik di antara negara sesama anggota SAARC. Fase keamanan regional ini

harus dilewati terlebih dahulu untuk menghasilkan kepercayaan (trust) di antara sesama negara anggota, terutama antara India-Pakistan sebagai dua negara besar yang berkonflik mengenai daerah perbatasan Kashmir, sehingga memungkinkan mereka beranjak ke fase kerjasama industri vertikal dan horizontal intra-kawasan untuk saling meningkatkan produksi produk unggulan yang khas dari tiap-tiap negara. Kerjasama SAPTA dan SAFTA juga harus menerapkan peraturan yang ketat agar tiap-tiap negara yang terlibat kontrak perjanjian (*contracting states*) tidak memperlama dan menunda penurunan hambatan tarif dan non-tarif bagi negara anggota yang sebenarnya sudah siap untuk melaksanakannya, terutama negara yang disebut sebagai *Non-Least Developed Contracting States*.

Lebih jauh lagi, keberadaan integrasi ekonomi Asia Selatan melalui mekanisme SAPTA dan SAFTA tidak menyebabkan anggotanya untuk saling berdagang dalam satu kawasan, malah lebih suka mengekspor produknya ke luar kawasan itu. Ada kecenderungan bahwa beberapa negara Asia Selatan memakai status keanggotaan SAARC-nya untuk “memaksa” negara-negara di Eropa dan AS, sebagai negara maju, untuk membuka akses pasar bagi negara berkembang karena alasan bahwa negaranya masih dikategorikan sebagai LDCs (*Least Developed Countries*). Sepertinya, beberapa negara anggota SAARC belum melihat dan menjadikan kerjasama ekonomi regional melalui perdagangan bebas sebagai prioritas dan peluang dalam menghasilkan keuntungan secara langsung. Padahal seharusnya, tiap-tiap pemerintah anggota SAARC harus mengingat bahwa kerjasama ekonomi regional, terutama negara Selatan-Selatan, dibentuk karena terjadi ketergantungan negara dunia ketiga (*selatan/LDCs*) sebagai periperi dalam sistem perdagangan internasional. Tujuan keduanya adalah untuk mengimbangi *trading blocs* negara-negara Barat yang membuat produk-produk mereka tidak bisa memasuki pasar negara Barat yang sangat proteksionis. Terlebih ketika daya beli negara UE dan AS terhadap produk ekspor Asia Selatan menurun akibat krisis finansial. Kesadaran yang tinggi akan fakta ini sepertinya tidak “mendarah-daging” dalam diri dan menjadi visi bersama semua negara anggota SAARC sampai saat ini. Ditambah dengan kesepakatan kerjasama ekonomi regional yang harus diselaraskan (*compatible*) dengan kebijakan domestiknya sehingga integrasi ekonomi tidak menjadi batu sandungan bagi

pertumbuhan perekonomian tiap negara, sebaliknya menjadi batu loncatan untuk mendorong tiap negara menjadi lebih kompetitif.

5.2 Rekomendasi Kebijakan

5.2.1 Meningkatkan Produktivitas tiap negara selain India dalam menghasilkan Produk/ Jasa yang berdaya saing tinggi

Sebagian besar produksi industri domestik tiap negara di Asia Selatan difokuskan kepada produk garmen dan produk yang mengandalkan faktor alam dan rendah teknologi. Oleh karena itu, lembaga SAARC harus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk mendorong negara anggotanya semakin inovatif sehingga menghasilkan tingkat komplementaritas produk yang tinggi di Asia Selatan di satu sisi. Di sisi lain, keaktifan pihak asosiasi industri tiap negara anggota juga sangat dituntut dengan cara memanfaatkan keberadaan kerjasama regional dalam meningkatkan kerjasama industri antar negara, secara horizontal (industri yang memproduksi barang yang sama) ataupun secara vertikal (produksi barang yang berbeda), di samping melakukan kerjasama riset dengan berbagai insitusi pendidikan (penelitian) dalam dan luar negeri.

5.2.2 Meningkatkan Peran India di Kawasan Asia Selatan sebagai Sabahat bukan Hegemon

India adalah salah satu aktor negara (state actor) penting yang harus “turun-tangan” dalam mendorong keberhasilan kerjasama ekonomi di kawasan Asia Selatan. Diplomasi lunak (soft diplomacy) haruslah jenis diplomasi yang diutamakan dalam meredakan ketegangan politik antara India dan negara tetangganya, terutama dengan Pakistan. Contohnya adalah dengan memberikan asistansi (dana, pekerja, teknologi) tanpa menciptakan kesan intervensi terhadap urusan politik domestik negara yang dibantu atau pertukaran pelajar, pameran dagang, kerjasama kebudayaan, dan kegiatan lainnya. Tanpanya, kecurigaan negara tetangga terhadap prasangka dominasi dan hegemoni India akan terus meningkat. Selain itu, peran Pakistan juga sangat diperlukan untuk menerima itikad baik India melalui pemberian status MFN bagi Pakistan. Sebenarnya, jika Pakistan tidak terlalu memandang curiga terhadap kebijakan luar negeri India dan

lebih memikirkan keuntungan rasional jangka panjang melalui perdamaian dengan India, maka secara tidak langsung akan berdampak terhadap peningkatan nilai perdagangan intra-kawasan Asia Selatan karena dua negara tersebut adalah negara dengan populasi, kekuatan militer, dan ekonomi terbesar di kawasan tersebut.

5.2.3 Peran Lembaga Regional SAARC

Salah satu kelemahan dari isi perjanjian SAPTA dan SAFTA adalah hanya bertujuan untuk meningkatkan perdagangan intra-kawasan dan keuntungan bagi penduduknya, tetapi tidak berisi kesepakatan untuk mendorong dan memfasilitasi tiap-tiap negara anggotanya menghasilkan produk kompetitif yang terdiversifikasi secara jenis dan harga. Jika ini disepakati, maka akan menaikkan tingkat komplementaritas produk di kawasan Asia Selatan tersebut sehingga tiap-tiap negara mau untuk saling berdagang dengan sesama anggota SAARC.

Sebaliknya, jika mereka menjual produk yang sama dengan yang dihasilkan oleh negara anggota SAARC lainnya, apalagi dengan negara yang perusahaan domestiknya memakai teknologi dan tenaga yang berkualitas sehingga produk lebih murah karena efisiensi, seperti India, maka negara penjual akan kalah bersaing dan produk ekspornya tidak laku di pasar regional sehingga harus dijual ke pasar internasional (walaupun akan menjadi lebih mahal karena ditambah dengan biaya ongkos transportasi serta tingginya biaya hambatan tarif di luar kawasan Asia Selatan). Apalagi apabila tingkat konsumsi penduduknya akan produk tersebut juga rendah (termasuk karena alasan jumlah penduduk yang rendah sehingga permintaan pasar domestik menjadi kecil) akan menghasilkan kerugian dalam neraca perdagangan luar negerinya. Selain itu, SAARC perlu untuk menyadarkan tiap negara anggotanya agar tetap mengingat tujuan (goal) dan visi dari pembentukan kerjasama ini sehingga tidak mengaburkan fokus dan kerekatan persahabatan di antara mereka, walaupun tiap-tiap negara terikat dengan berbagai status keanggotaan pada kerjasama bilateral, regional, dan multilateral lainnya. Dengan demikian tujuan dari kerjasama perdagangan bebas (SAPTA & SAFTA), yaitu untuk memperkuat kerjasama ekonomi intra-SAARC guna keuntungan penduduknya, dengan semangat kerjasama, dan penghormatan

penuh terhadap kesetaraan kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas teritorial dapat terlaksana.

5.3 Saran

Penelitian ini masih membahas mengenai pengaruh tingkat keuntungan daya saing yang diperoleh oleh tujuh negara anggota SAARC terhadap keberhasilan perdagangan regional Asia Selatan secara umum. Oleh karena itu, penelitian berikutnya dapat meneliti mengenai *lesson learning* per negara, terutama negara-negara selain India dan Pakistan, yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi seperti Sri Lanka dan Bangladesh, mengenai korelasi daya saing negaranya dengan keterbukaan ekonominya di tingkat regional.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

ADB. 2009. *Study on Intraregional Trade and Investment in South Asia*. Philipines: Asian Development Bank.

Ahmed, Sadiq. 2007. *India's Longterm Growth Experience: Lesson and Prospects*, Washington: World Bank.

_____, Sadiq et.al, 2010. *Promoting Economic Cooperation in South Asia: Beyond SAFTA*. Washington: SAGE.

Balaam, David N. & Michael Veseth. 2008. *Introduction to International Political Economy*, edisi keempat. USA: Pearson Education, Inc.

Bryman, Alan. 2004. *Social Research Methods*, edisi kedua. UK: Oxford University Press.

Buzan, Barry dan Richard Little, 2000. *International System in World History: Remaking the Study of International Relations*. US: Oxford University Press.

Chang, Ha-Joon & Ilene Grabel. 2008. *Membongkar Mitos Neolib: Upaya Merebut Kembali Makna Pembangunan* (terjemahan). Yogyakarta: INSIST Press.

Dahal, Madan Kumar et.al. 2008. *A Generic Guideline for Development through Economic Diplomacy*. Nepal: Insititue of Foreign Affairs.

Djafar, Zainnuddin. 2012. *Peran Strategis Indonesia dalam Pembentukan ASEAN & Dinamikanya*. Jakarta: UI Press.

Gilpin, Robert. 1987. *The Political Economy of International Relations*. UK: Princeton University Press.

Hoekman, Bernard M. dan Michael M. Kustucky. 2001. *The Political Economy of the World Trading System: The WTO and Beyond* (edisi kedua). UK: Oxford University Press.

Kuncoro, M. 2010. *Ekonomika Pembangunan: Masalah, Kebijakan, dan Politik*. Jakarta: Erlangga.

Mansfield, Edward D. dan Helen V. Milner (editor). 1997. *The Political Economy of Regionalism*, New York: Columbia University Press.

Meredith, Robyn. 2008. *The Elephant and the Dragon: Fenomena Kebangkitan India dan Cina yang Luar Biasa serta Pengaruhnya terhadap Kita* (terjemahan). Bandung: Penerbit Quacana.

Porter, Michael. 1990. *The Competitive Advantage of Nations*. New York: Collier MacMillan Canada Inc.

Sengupta, Jati K. 2005. *India's Economic Growth: A Strategy for the New Economic*. New York: Palgrave Mac Millan.

Shaheen Rafi Khan (editor). 2009. *Regional trade integration and conflict resolution*, Oxon: Routledge.

Siddiqui, Anjum (editor). 2007. *India and South Asia: Economic Development in the Age of Globalization*. New York: M.E Sharpe, Inc.

Sobhan, Farooq dan Riffat Zaman. 2004. *Trade Investment in South Asia, di dalam South Asia in the World: Problem Solving Perspective on Security, Sustainable Development, and Good Governance*, Edited by Ramesh Thakur dan Oddny Wiggen. Tokyo: United Nations University Press.

Todaro, Michael. 1998. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (terjemahan), edisi keenam, Jakarta: Erlangga.

JURNAL

Dash, Kishore C. "The Political Economy of Regional Cooperation in South Asia", *Pacific Affairs*, Vol. 69, no. 2 (Summer 1996)

Haider, Mohammed Ziaul. "Competitiveness of the Bangladesh Ready-made Garment Industry in Major International Market", *Asia-Pacific Trade and Investment Review* (vol.3, No.1 June 2007).

Mansfield, Edward D. dan Rachel Bronson, "Alliances, Preferential Arrangement, and International Trade", *The American Political Science Review* vol.91/no.1/Maret 1997.

Taneja, Nisha. "Informal Trade in SAARC Region", *Jurnal Economic and Political Weekly* vol.36, no.11.

Taneja, Nisha dan Sanjeb Pohit, "India's Informal Trade with Nepal, *Economic and Political Weekly*", vol.36 no.25 tahun 2001.

Weeraloon, Dushni. "Does SAFTA Have any Future?" *Economic and Political Weekly*, vol. 36, no.34 (Agustus, 25-31).

ARTIKEL ILMIAH LAINNYA

Aftab. Zehra, et.al. "Industrial Policy and the Environment in Pakistan" (United Nations Industrial Development Organization, 11 Maret 2000).

Ara, Laila Arjuman dan M Masudur Rahman, "The Competitiveness and Future Challenges of Bangladesh in International Trade

Belabase, Anil dan Paras Kharel. "Competitiveness of Nepalese Ready-Made Garment after expiry of the Agreement on Textile and Clothing". (Asia-Pacific Research Training Network on Trade Working paper Series No.70, June 2009).

(-----). "Competitiveness: Understanding Impacts and Formulating Response for Commonwealth Small States" (November 2009).

Dorjee, Tahsi. "Clean Energy Development in Bhutan". (11-13 Juli 2011 di Male, Maladewa).

Hasan, Abu Hena Reza. "International Business Relations of Emerging India with South Asian Neighbors: Analysis of Manufacturing Export" (Working Paper).

Lall, Sanjaya dan John Weiss, "Industrial Competitiveness: The Challenge for Pakistan", Makalah Latar belakang untuk Asian Development Bank dalam *Seminars on International Competitiveness in Pakistan* (November 2003)

Meenu Tewari, "Deepening Intraregional Trade and Investment in South Asia The Case of Textiles and Clothing Industry", (Working Paper No.213, April 2008 Indian Council of Research International Economic Relations).

Metha, Pradeep S. dan Pranav Kumar, "South Asian and RTAs: Option in the Wake of Cancun Fiasco", presentasi makalah pada peringatan 10 tahun ASARC 27-28 April 2004 di University House, Australian National University, Canberra.

Pappas, Adam. "Trade Promotion in Afghanistan: Role for Infrastructure, Policy Option for State-Building in Afghanistan" (24 April 2009).

(-----). Pakistan Institute of Trade and Development (9 June 2011)

(-----).The Government of Maldives, (*3rd UN Conference on LDCs*, 14-20 Mei 2001).

Sudha Barahi, et.al, “Tourism Cluster in Nepal: Microeconomics of Competitiveness”. (6 Mei 2011).

WEBSITE

A competitiveness Strategy for Sri Lanka's Tea Industry, diakses dari *Afghanistan joins SAARC, World's Largest Economic Grouping*, diakses dari <http://www.payvand.com/news/07/apr/1019.html>.

Afia Malik, *Demand for Textile and Clothing Exports of Pakistan*, diakses dari www.pide.org.pk/Research/report180.

Akhtar, Sajid. *Post ATC Threats to Pakistan Textiles and Clothing Exports: Identification of Product at A Disaggregate Level*. Pakistan: Pakistan Institute of Trade and Development).

ASEAN refuses to upgrade Pakistan status, diakses dari <http://www.thenews.com.pk/TodaysPrintDetail.aspx?ID=47338&Cat=3>

Background Note: Maladewa, diakses dari www.m.state.gov/md5476.htm.

Hassan, Toufique G.K.M. *Bangladesh Textile Industry*, diakses dari www.unescap.org/tid/publication/tipub2500_pt2chap1.

Dorji, Tandi *Sustainability of Tourism in Bhutan*, diakses dari www.thlib.org-static/-reprints/jbs/JBS_03_01_03.

Karma Galay, *International Politics of Bhutan*, diakses dari www.bhutanstudies.org.bt/pubFiles/v10/8.

Background Note: Srilanka, diakses dari www.state.gov/r/pa/eibgn/5249.htm

Countries: Prospects and Challenges of Regional Integration in South Asia, diakses dari www.joaag.com/uploads/5/4/1/1_AliFinal.

Diamond model-Michael Porter, diakses dari www.valuebasedmanagement.net/methods_porter_diamond_model.html

Economy and Trade and Trade (NAFTA), diakses dari <http://worldsavvy.org/monitor/index.php>

Khan, Shaheen Rafi, et.al. *Regional Trade Agreements of South Asia: Trade and Conflict linkages*, diakses dari http://web.idrc.ca/ghri/ev-132669-201-1-DO_TOPIC.html

Laporan *Economy Development Policy of the Kingdom of Bhutan 2010 (Royal Government of Bhutan)* diakses dari www.rtm.gnhc.gov.bt/RTMdoc/EDP_2010.

Macfadyen, Graeme dan Edward Allison, *Climate Change Fisheries, Trade*, Kiran P Saakha, Nepal, diakses dari www.unescap.org/tid/publication/tip.org

Martin, Xavier Sala-i-, *The Global Competitiveness Report 2010-2011*, diakses dari http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010/11

Potential Supply Chains in Textiles and Clothing Sectors in South Asia: An Exploratory Study, (oleh UN, UNCTAD, dan Commonwealth Secretariat) diakses dari www.archive.unctad.org/en/docs/ditctncd2011d3_en.

SAARC Preferential Trading Agreements (SAPTA) diakses dari www.saarc/sec.org-areaofcooperation/detail.php/activity_id=4.htm.

South Asian Association for Regional Cooperation SAARC Charter, diakses dari <http://www.saarc-sec.org/SAARC-Charter/5/>.

South Asian Association for Regional Cooperation, diakses dari <http://tradeportalofindia.com/contentmgmt/Desktops2.html?compid=itpo&itemcode=1207>.

South Asian Free Trade Area (SAFTA), diakses dari www.saarc/sec.org-areaofcooperation/detail.php-activity_id=5.htm

Yunus, Muhammad dan Tatsufumi Yamagata, *The Garment Industry and Government Role in Bangladesh*, diakses dari www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Report/2011/pdf/410_ch6

Structure of Association of Bhutanese Tour Operators (2008-2010), diakses dari www.abto.org.bt/wp-content/uploads/2009/08/Structure-of-ABTO.

India Textile Competitiveness, diakses dari <http://www.fibre2fashion.com/services/article-writing-service/content-promotion-services.asp>.

PM India Desak Eropa Atasi Krisis Keuangan, diakses dari www.m.yahoo.com/w/legobengine/news/pm-india-desak-eropa-atasi-krisi-keuangan-005211958--finance.html.

European Commission. *Bhutan & the European Community Cooperation Strategy 2002-2006* (Country Strategy Paper, 21 Maret 2003) diakses dari http://europa.eu.int/comm/external_relations/bhutan/csp/index.htm.

Brunet, Sandra et.al, *Tourism Development in Bhutan Tension's between Tradition and Modernity*, diakses dari www.citeseerx.ist.psu.edu.

World Bank, *Nepal Economic Update April 2010*, diakses dari www.worldbank.org-NEPAEXTN

TESIS

Naem, Ibrahim *Economic and Commercial Diplomacy Microstates: A Case Study of the Maldives and Mauritius* (Tesis Master di Universitas Malta, 31 Juli 2008) diakses dari [www.diplomacy.edu-sites-default-files-23082010103242Naeem\(library\)](http://www.diplomacy.edu-sites-default-files-23082010103242Naeem(library))



AGREEMENT ON SAARC PREFERENTIAL TRADING ARRANGEMENT (SAPTA)

Preamble

The Government of the People's Republic of Bangladesh, the Kingdom of Bhutan, the Republic of India, the Republic of Maladewa, the Kingdom of Nepal, the Islamic Republic of Pakistan and the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka hereinafter referred to as "Contracting States",

Motivated by the commitment to promote regional co-operation for the benefit of their peoples, in a spirit of mutual accommodation, with full respect for the principles of sovereign equality, independence and territorial integrity of all States;

Aware that the expansion of trade could act as a powerful stimulus to the development of their national economies, by expanding investment and production, thus providing greater opportunities of employment and help securing higher living standards for their population;

Convinced of the need to establish and promote regional preferential trading arrangement for strengthening intra-regional economic cooperation and the development of national economies;

Bearing in mind the urgent need to promote the intra-regional trade which presently constitutes a negligible share in the total volume of the South Asian trade;

Recalling the direction given at the Fourth SAARC Summit meeting held in Islamabad in December 1988 that specific areas be identified where economic cooperation might be feasible immediately;

Guided by the declared commitment of the Heads of State or Government of the Member Countries at the Sixth SAARC Summit held in Colombo in December 1991 to the liberalisation of trade in the region through a step by step approach in such a manner that countries in the region share the benefits of trade expansion equitably;

Cognizant of the mandate given by the Sixth SAARC Summit in Colombo to formulate and seek agreement on an institutional framework under which specific measures for trade liberalization among SAARC Member States could be furthered and to examine the Sri Lankan proposal to establish the SAARC Preferential Trading Arrangement (SAPTA) by 1997;

Recognising that a preferential trading arrangement is the first step towards higher levels of trade and economic cooperation in the region,

Have agreed as follows:

Article - 1

Definitions

For the purpose of this Agreement:

- (1) "**Least Developed Country**" means a country designated as such by the United Nations.
- (2) "**Contracting State**" means any Member State of the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) which has entered into this Agreement.
- (3) "**Serious injury**" means significant damage to domestic producers, of like or similar products resulting from a substantial increase of preferential imports in

situations which cause substantial losses in terms of earnings, production or employment unsustainable in the short term. The examination of the impact on the domestic industry concerned shall also include an evaluation of other relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the domestic industry of that product.

(4) "**Threat of serious injury**" means a situation in which a substantial increase of preferential imports is of a nature to cause "serious injury" to domestic producers, and that such injury, although not yet existing, is clearly imminent. A determination of threat of serious injury shall be based on facts and not on mere allegation, conjecture, or remote or hypothetical possibility.

(5) "**Critical circumstances**" means the emergence of an exceptional situation where massive preferential imports are causing or threatening to cause "serious injury" difficult to repair and which calls for immediate action.

(6) "**Sectoral basis**" means agreements amongst Contracting States regarding the removal or reduction of tariff, non-tariff and para-tariff barriers as well as other trade promotion or cooperative measures for specified products or groups of product closely related in end-use or in production.

(7) "**Direct trade measures**" means measures conducive to promoting mutual trade of Contracting States such as long and medium-term contracts containing import and supply commitments in respect of specific products, buy-back arrangements, state trading operations, and government and public procurement.

(8) "**Tariffs**" means customs duties included in the national tariff schedules of the Contracting States.

(9) "**Para-tariffs**" means border charges and fees, other than "tariffs", on foreign trade transactions of a tariff-like effect which are levied solely on imports, but not those indirect taxes and charges, which are levied in the same manner on like domestic products. Import charges corresponding to specific services rendered are not considered as para-tariff measures.

(10) "**Non-tariffs**" means any measure, regulation, or practice, other than "tariffs" and "para-tariffs", the effect of which is to restrict imports, or to significantly distort trade.

(11) "**Products**" means all products including manufactures and commodities in their raw, semi-processed and processed forms.

Article - 2

Establishment and Aims

1. By the present Agreement, the Contracting States establish the SAARC Preferential Trading Arrangement (SAPTA) to promote and sustain mutual trade and the economic cooperation among the Contracting States, through exchanging concessions in accordance with this Agreement.

2. SAPTA will be governed by the provisions of this Agreement and also by the rules, regulations, decisions, understandings and protocols to be agreed upon within its framework by the Contracting States.

Article - 3

Principles

SAPTA shall be governed in accordance with the following principles:-

(a) SAPTA shall be based and applied on the principles of overall reciprocity and mutuality of advantages in such a way as to benefit equitably all Contracting States, taking into account their respective levels of economic and industrial

development, the pattern of their external trade, trade and tariff policies and systems;

(b) SAPTA shall be negotiated step by step, improved and extended in successive stages with periodic reviews;

(c) The special needs of the Least Developed Contracting States shall be clearly recognised and concrete preferential measures in their favour should be agreed upon;

(d) SAPTA shall include all products, manufactures and commodities in their raw, semi-processed and processed forms.

Article - 4

Components

SAPTA may, inter-alia, consist of arrangements relating to:-

- (a) tariffs;
- (b) para-tariffs;
- (c) non-tariff measures;
- (d) direct trade measures.

Article - 5

Negotiations

1. The Contracting States may conduct their negotiations for trade liberalisation in accordance with any or a combination of the following approaches and procedures:-

- (a) Product-by-product basis;
- (b) Across-the-board tariff reductions;
- (c) Sectoral basis;
- (d) Direct trade measures.

2. Contracting States agreed to negotiate tariff preferences initially on a product-by-product basis.

3. The Contracting States shall enter into negotiations from time to time with a view to further expanding SAPTA and the fuller attainment of its aims.

Article - 6

Additional Measures

1. Contracting States agree to consider, in addition to the measures set out in Article 4, the adoption of trade facilitation and other measures to support and complement SAPTA to mutual benefit.

2. Special consideration shall be given by Contracting States to requests from Least Developed Contracting States for technical assistance and cooperation arrangements designed to assist them in expanding their trade with other Contracting States and in taking advantage of the potential benefits of SAPTA. The possible areas for such technical assistance and cooperation are listed in **Annex - I**.

Article - 7

Schedules of Concessions

The tariff, para-tariff and non-tariff concessions negotiated and exchanged amongst Contracting States shall be incorporated in the National Schedules of Concessions. The initial concessions agreed to by the Contracting States are attached as **Annex - II**.

Article - 8

Extension of Negotiated Concessions

The concessions agreed to under SAPTA, except those made exclusively to the Least Developed Contracting States in pursuance of Article 10 of this Agreement, shall be extended unconditionally to all Contracting States.

Article - 9

Committee of Participants

A Committee of Participants, hereinafter referred to as the Committee, consisting of representatives of Contracting States, is hereby established. The Committee shall meet at least once a year to review the progress made in the implementation of this Agreement and to ensure that benefits of trade expansion emanating from this Agreement accrue to all Contracting States equitably. The Committee shall also accord adequate opportunities for consultation on representations made by any Contracting State with respect to any matter affecting the implementation of the Agreement. The Committee shall adopt appropriate measures for settling such representations. The Committee shall determine its own rules of procedures.

Article - 10

Special Treatment for the Least Developed Contracting States

1. In addition to other provisions of this Agreement, all Contracting States shall provide, wherever possible, special and more favourable treatment exclusively to the Least Developed Contracting States as set out in the following subparagraphs:

- (a) Duty-free access, exclusive tariff preferences or deeper tariff preferences for the export products,
- (b) The removal of non-tariff barriers,
- (c) The removal, where appropriate, of para-tariff barriers,
- (d) The negotiations of long-term contracts with a view to assisting Least Developed Contracting States to achieve reasonable levels of sustainable exports of their products,
- (e) Special consideration of exports from Least Developed Contracting States in the application of safeguard measures,
- (f) Greater flexibility in the introduction and continuance of quantitative or other restrictions provisionally and without discrimination in critical circumstances by the Least Developed Contracting States on imports from other Contracting States.

Article - 11

Non-application

Notwithstanding the measures as set out in Articles 4 and 6, the provisions of this Agreement shall not apply in relation to preferences already granted or to be granted by any Contracting State to other Contracting States outside the framework of this Agreement, and to third countries through bilateral, plurilateral and multilateral trade agreements, and similar arrangements. The Contracting States shall also not be obliged to grant preferences in SAPTA which impair the concession extended under those agreements.

Article - 12

Communication, Transport and Transit

Contracting States agree to undertake appropriate steps and measures for developing and improving communication system, transport infrastructure and transit facilities for accelerating the growth of trade within the region.

Article - 13

Balance-of-Payments Measures

1. Notwithstanding the provisions of this Agreement, any Contracting State facing serious economic problems including balance of payments difficulties may suspend provisionally the concessions as to the quantity and value of merchandise permitted to be imported under the Agreement. When such action has taken place, the Contracting State which initiates such action, shall simultaneously notify the other Contracting States and the Committee.

2. Any Contracting State which takes action according to paragraph 1 of this Article shall afford, upon request from any other Contracting State, adequate opportunities for consultations with a view to preserving the stability of the concessions negotiated under the SAPTA. If no satisfactory adjustment is effected between the Contracting States concerned within 90 days of such notification, the matter may be referred to the Committee for review.

Article - 14

Safeguard Measures

If any product, which is a subject of a concession with respect to a preference under this Agreement, is imported into the territory of a Contracting State in such a manner or in such quantities as to cause or threaten to cause, serious injury in the importing Contracting State, the importing Contracting State concerned may, with prior consultations, except in critical circumstances, suspend provisionally without discrimination, the concession accorded under the Agreement. When such action has taken place the Contracting State which initiates such action shall simultaneously notify the other Contracting State(s) concerned and the Committee shall enter into consultations with the concerned Contracting State and endeavour to reach mutually acceptable agreement to remedy the situation. In the event of the failure of the Contracting States to resolve the issue within 90 days of the receipt of original notification, the Committee of Participants shall meet within 30 days to review the situation and try to settle the issue amicably. Should the consultations in the Committee of Participants fail to resolve the issue within 60 days, the parties affected by such action shall have the right to withdraw equivalent concession(s) or other obligation(s) which the Committee does not disapprove of.

Article - 15

Maintenance of the Value of Concessions

Any of the concessions agreed upon under this Agreement shall not be diminished or nullified, by the application of any measures restricting trade by the Contracting States except under the provisions as spelt out in other Articles of this Agreement.

Article - 16

Rules of Origin

Products contained in the National Schedules of Concessions annexed to this Agreement shall be eligible for preferential treatment if they satisfy the rules of origin, including special rules of origin, in respect of the Least Developed Contracting States, which are set out in **Annex - III**.

Article - 17

Modification and Withdrawal of Concessions

1. Any Contracting State may, after a period of three years from the day the concession was extended, notify the Committee of its intention to modify or withdraw any concession included in its appropriate schedule.
2. The Contracting State intending to withdraw or modify a concession shall enter into consultation and/or negotiations, with a view to reaching agreement on any necessary and appropriate compensation, with Contracting States with which such concession was initially negotiated and with any other Contracting States that have a principal or substantial supplying interest as may be determined by the Committee.
3. Should no agreement be reached between the Contracting States concerned within six months of the receipt of notification and should the notifying Contracting State proceed with its modification or withdrawal of such concessions, the affected Contracting States as determined by the Committee may withdraw or modify equivalent concessions in their appropriate schedules. Any such modification or withdrawal shall be notified to the Committee.

Article - 18

Withholding or Withdrawal of Concessions

A Contracting State shall at any time be free to withhold or to withdraw in whole or in part any item in its schedule of concessions in respect of which it determines that it was initially negotiated with a State which has ceased to be a Contracting State in this Agreement. A Contracting State taking such action shall notify the Committee, and upon request, consult with Contracting States that have a substantial interest in the product concerned.

Article - 19

Consultations

1. Each Contracting State shall accord sympathetic consideration to and shall afford adequate opportunity for consultations regarding such representations as may be made by another Contracting State with respect to any matter affecting the operation of this Agreement.
2. The Committee may, at the request of a Contracting State, consult with any Contracting State in respect of any matter for which it has not been possible to find a satisfactory solution through such consultation under paragraph 1 above.

Article - 20

Settlement of Disputes

Any dispute that may arise among the Contracting States regarding the interpretation and application of the provisions of this Agreement or any instrument adopted within its framework shall be amicably settled by agreement between the parties concerned. In the event of failure to settle a dispute, it may be referred to the Committee by a party to the dispute. The Committee shall review the matter and make a recommendation thereon within 120 days from the date on which the dispute was submitted to it. The Committee shall adopt appropriate rules for this purpose.

Article - 21

Withdrawal from SAPTA

1. Any Contracting State may withdraw from this Agreement at any time after its entry into force. Such withdrawal shall be effective six months from the day on which written notice thereof is received by the SAARC Secretariat, the depositary

of this Agreement. That Contracting State shall simultaneously inform the Committee of the action it has taken.

2. The rights and obligations of a Contracting State which has withdrawn from this Agreement shall cease to apply as of that effective date.

3. Following the withdrawal by any Contracting State, the Committee shall meet within 30 days to consider action subsequent to withdrawal.

Article - 22

Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the notification issued by the SAARC Secretariat regarding completion of the formalities by all Contracting States.

Article - 23

Reservations

This Agreement may not be signed with reservations nor shall reservations be admitted at the time of notification to the SAARC Secretariat of the completion of formalities.

Article - 24

Amendments

This Agreement may be modified through amendments to this Agreement. All amendments shall become effective upon acceptance by all Contracting States.

Article - 25

Depositary

This Agreement shall be deposited with the Secretary- General of SAARC who shall promptly furnish a certified copy thereof to each Contracting State.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorized thereto by their respective Governments have signed this Agreement on the SAARC Preferential Trading Arrangement.

Done at **DHAKA** this **ELEVENTH** day of **APRIL** One Thousand Nine Hundred Ninety Three in eight originals in the English language.

A.S.M. MOSTAFIZUR RAHMAN DAWA TSERING

Minister of Foreign Affairs
Minister of Foreign Affairs
People's Republic of Bangladesh Kingdom of Bhutan

DINESH SINGH FATHULLA JAMEEL

Minister of External Affairs
Minister of Foreign Affairs
Republic of India Republic of Maladewa

MAHESH ACHARYA MOHAMMAD SIDDIQUE KHAN KANJU

State Minister of Finance
Minister of State for Foreign Affairs

His Majesty's Government of Nepal Islamic Republic of Pakistan

HAROLD HERAT

Minister of Foreign Affairs.

Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

Annex - I

ADDITIONAL MEASURES IN FAVOUR OF LEAST DEVELOPED CONTRACTING STATES

(a) The identification, preparation and establishment of industrial and agricultural projects in the territories of Least Developed Contracting States which could provide the production base for the expansion of exports of Least Developed

Contracting States to other Contracting States, possibly linked to co-operative financing and buy-back arrangements;

(b) the setting up of manufacturing and other facilities in Least Developed Contracting States to meet intra-regional demand under co-operative arrangements;

(c) the formulation of export promotion policies and the establishment of training facilities in the field of trade to assist Least Developed Contracting States in expanding their exports and in maximising their benefits from SAPTA;

(d) the provision of support to export marketing of products of Least Developed Contracting

States by enabling these countries to share existing facilities (for example, with respect to export credit insurance, access to market information) and by institutional and other positive

measures to facilitate imports from Least Developed Contracting States into their own markets;

(e) bringing together of enterprises in other Contracting States with project sponsors in the Least Developed Contracting States (both public and private) with a view to promoting joint ventures in projects designed to lead to the expansion of trade;

(f) the provision of special facilities and rates in respect to shipping.

Annex - II

National Schedules of Concessions

(published separately. Can also be accessed at Secretariat's website <http://www.saarc-sec.org>)

Annex - III

RULES OF ORIGIN

(as amended by Twenty-first Session of SAARC Council of Ministers, Nuwara Eliya, Sri Lanka, 18-19 March 1999)

RULE 1: Originating products - Products covered by preferential trading arrangements within the framework of the SAPTA imported into the territory of a Contracting State from another Contracting State which are consigned directly within the meaning of Rule 5 hereof, shall be eligible for preferential concessions if they conform to the origin requirement under any one of the following conditions:

(a) Products wholly produced or obtained in the exporting Contracting State as defined in Rule 2; or

(b) Products not wholly produced or obtained in the exporting Contracting State, provided that the said products are eligible under Rule 3 or Rule 4.

RULE 2: Wholly produced or obtained - Within the meaning of Rule 1 (a) the following shall be considered as wholly produced or obtained in the exporting Contracting State:

(a) raw or mineral products extracted from its soil, its water or its seabeds: 1

(b) agricultural products harvested there; 2

(c) animals born and raised there;

(d) products obtained from animals referred to in paragraph (c) above;

(e) products obtained by hunting or fishing conducted there;

- (f) products of sea fishing and other marine products taken from the high seas by its vessels; ^{3/4}
- (g) products processed and/or made on boards its factory ships ^{4/5} exclusively from products referred to in paragraph (f) above;
- (h) used articles collected there, fit only for the recovery of raw materials;
- (i) waste and scrap resulting from manufacturing operations conducted there;
- (j) goods produced there exclusively from the products referred to in paragraph (a) to (i) above.

RULE 3 : Not wholly produced or obtained

(a) Within the meaning of Rule 1(b), products worked on or processed as a result of which the total value of the materials, parts or produce originating from non-Contracting States or of undetermined origin used does not exceed 60 per cent of the f.o.b. value of the products produced or obtained and the final process of manufacture is performed within the territory of the exporting Contracting State shall be eligible for preferential concessions subject to the provisions of Rule 3(c) and Rule 4.

(b) Sectoral agreements ⁶

(c) The value of the non-originating materials, parts or produce shall be:

- (i) The c.i.f. value at the time of importation of materials parts or produce where this can be proven; or
- (ii) The earliest ascertainable price paid for the materials, prices or produce of undetermined origin in the territory of the Contracting State where the working or processing takes place.

RULE 4: Cumulative rules of origin - Products which comply with origin requirements provided for in Rule 1 and which are used by a Contracting State as input for a finished product eligible for preferential treatment by another Contracting State shall be considered as a product originating in the territory of the Contracting State where working or processing of the finished product has taken place provided that the aggregate content originating in the territory of the Contracting State is not less than 50 percent of its f.o.b. value ⁷.

RULE 5 : Direct consignment - The following shall be considered as directly consigned from the exporting Contracting State to the importing Contracting State:

- (a) if the products are transported without passing through the territory of any non-Contracting State;
- (b) the products whose transport involves transit through one or more intermediate non-Contracting States with or without transshipment or temporary storage in such countries, provided that:
 - (i) the transit entry is justified for geographical reason or by considerations related exclusively to transport requirements;
 - (ii) the products have not entered into trade or consumption there; and
 - (iii) the products have not undergone any operation there other than unloading and reloading or any operation required to keep them in good condition.

RULE 6: Treatment of packing - When determining the origin of products, packing should be considered as forming a whole with the product it contains. However, packing may be treated separately if the national legislation so required.

RULE 7: Certificate of Origin - Products eligible for preferential concessions shall be supported by a Certificate of Origins issued by an authority designated by

the government of the exporting Contracting State and notified to the other Contracting States in accordance with the Certification Procedures appearing on pages 15 and 16 of this Annex.

RULE 8:

(a) In conformity with Article 15 of the Agreement on SAPTA and national legislations, any Contracting State may prohibit importation of products containing any inputs originating from States with which it does not have economic and commercial relations.

(b) Contracting States will do their best to co-operate in order to specify origin of inputs in the Certificate of Origin.

RULE 9: Review - These Rules may be reviewed as and when necessary upon request of one-third of the Contracting States and may be open to such modifications as may be agreed upon.

RULE 10: Special criteria percentage - Products originating in Least Developed Contracting States can be allowed a favourable 10 percentage points applied to the percentage established in Rules 3 and 4. Thus, for Rule 3, the percentage would not exceed 70 per cent, and for Rule 4, the percentage would not be less than 40 per cent.

1 Include mineral fuels, lubricants and related materials as well as mineral of metal ores.

2 Include forestry products.

3 "Vessels" - shall refer to fishing vessels engaged in commercial fishing, registered in a Contracting State's country and operated by a citizen or citizens or governments of Contracting State or partnership, corporation or association, duly registered in such Contracting State's country, at cost 60 per cent of equity of which is owned by a citizen or citizens and/or government of such Contracting State or 75 percent by citizens and/or governments of the Contracting States. However, the products taken from vessels engaged in commercial fishing under bilateral agreements which provide for chartering/leasing of such vessels and/or sharing of catch between Contracting States will also be eligible for preferential concessions.

4 In respect of vessels or factory ships operated by government agencies the requirement of flying the flag of a Contracting State does not apply.

5 For the purpose of this Agreement, the term "factory ship" means any vessels, as defined, used for processing and/or making on board products exclusively from those products referred to in paragraph (f) above.

6 In respect of products traded within the framework of sectoral agreements negotiated under SAPTA, provision may need to be made for special criteria to apply. Consideration may be given to these criteria as and when the sectoral agreements are negotiated.

7 "Partial" cumulation as implied by Rule 4 above means that only products which have acquired originating status in the territory of one Contracting State may be taken into account when used as inputs for a finished product eligible for preferential treatment in the territory of another Contracting State.

8 A standard Certificate of Origin to be used by all Contracting States is annexed and approved by the Contracting States.

Format of Certificate of Origin

I. General Conditions

To qualify for preference, products must :

- a) fall within a description of products eligible for preference in the schedule of concessions of SAPTA country of destination;
- b) comply with SAPTA Rules of Origin. Each article in a consignment must qualify separately in its own right; and
- c) comply with the consignment conditions specified by the SAPTA Rules of Origin. In general, products must be consigned directly within the meaning of Rule 5 hereof from the country of exportation to the country of destination.

II. Entries to be made in Box 8

Preference products must be wholly produced or obtained in the exporting Contracting State in accordance with Rule 2 of the SAPTA Rules of Origin, or where not wholly produced or obtained in the exporting Contracting States must be eligible under Rule 3 or Rule 4.

- a) Products wholly produced or obtained; enter the letter "A" in Box 8.
- b) Products not wholly produced or obtained: the entry in Box 8 should be as follows :
 1. Enter letter "B" in Box 8, for products which meet the origin criteria according to Rule 3. Entry of letter would be followed by the sum of the value of materials, parts or produce originating from non-Contracting States, or undetermined origin used, expressed as a percentage of the f.o.b. value of the products; (example "B" 50 per cent);
 2. Enter letter "C" in Box 8 for products which meet the origin criteria according to Rule 4. Entry of letter "C" would be followed by the sum of the aggregate content originating in the territory of the exporting Contracting State expressed as a percentage of the f.o.b. value of the exported product; (example "C" 60 per cent);
 3. Enter letter "D" in Box 8 for products which meet the special origin criteria according to Rule 10.

ADDENDUM

Amendment to the SAPTA Rules of Origin

The SAARC Council of Ministers at its Twenty-first Session held in Nuwara Eliya, Sri Lanka on 18-19 March 1999 approved the amendments to the Rules 3(a), 4 and 10 relating to the Rules of Origin (Annex- II) of the SAARC Preferential Trading Arrangement (SAPTA) with immediate effect.

The new amended rules now read as follows: -

Rule 3: Not wholly produced or obtained –

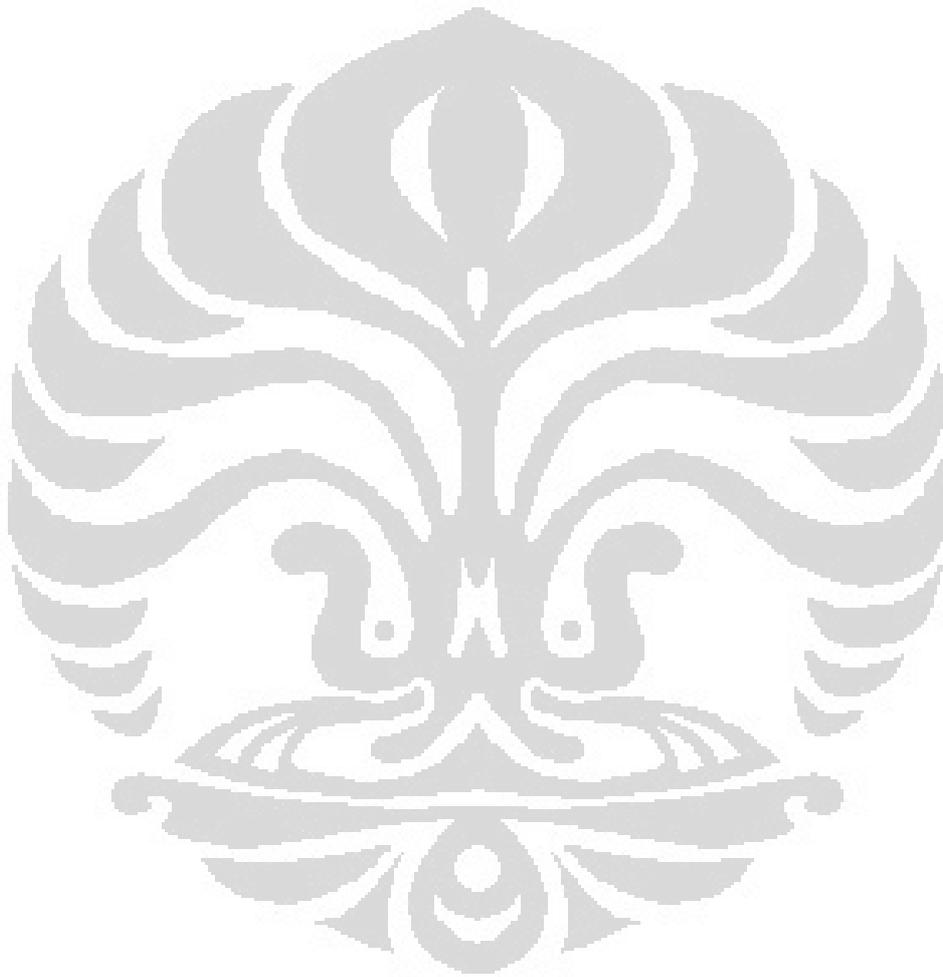
Within the meaning of Rule 1(b), products worked on or processed as a result of which the total value of the materials, parts or produce originating from non-Contracting States or of undetermined origin used **does not exceed 60 per cent of the f.o.b. value** of the products produced or obtained and the final process of manufacture is performed within the territory of the exporting Contracting State shall be eligible for preferential concessions subject to the provisions of Rule 3(c) and Rule 4.

Rule 4: Cumulative rules of origin –

Products which comply with origin requirements provided for in Rule 1 and which are used by a Contracting State as input for a finished product eligible for preferential treatment by another Contracting State shall be considered as a product originating in the territory of the Contracting State where working or processing of the finished product has

taken place provided that the aggregate content originating in the territory of the Contracting State **is not less than 50 percent of its f.o.b. value.**

Rule 10: Special criteria percentage – Products originating in Least Developed Contracting States can be allowed a favourable 10 percentage points applied to the percentage established in Rules 3 and 4. **Thus, for Rule 3, the percentage would not exceed 70 per cent, and for Rule 4, the percentage would not be less than 40 per cent.**



AGREEMENT ON SOUTH ASIAN FREE TRADE AREA (SAFTA)

The Governments of the SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) Member States comprising the People's Republic of Bangladesh, the Kingdom of Bhutan, the Republic of India, the Republic of Maladewa, the Kingdom of Nepal, the Islamic Republic of Pakistan and the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka hereinafter referred to as "Contracting States"

Motivated by the commitment to strengthen intra-SAARC economic cooperation to maximise the realization of the region's potential for trade and development for the benefit of their people, in a spirit of mutual accommodation, with full respect for the principles of sovereign equality, independence and territorial integrity of all States;

Noting that the Agreement on SAARC Preferential Trading Arrangement (SAPTA) signed in Dhaka on the 11th of April 1993 provides for the adoption of various instruments of trade liberalization on a preferential basis;

Convinced that preferential trading arrangements among SAARC Member States will act as a stimulus to the strengthening of national and SAARC economic resilience, and the development of the national economies of the Contracting States by expanding investment and production opportunities, trade, and foreign exchange earnings as well as the development of economic and technological cooperation;

Aware that a number of regions are entering into such arrangements to enhance trade through the free movement of goods;

Recognizing that Least Developed Countries in the region need to be accorded special and differential treatment commensurate with their development needs; and

Recognizing that it is necessary to progress beyond a Preferential Trading Arrangement to move towards higher levels of trade and economic cooperation in the region by removing barriers to cross-border flow of goods;

Have agreed as follows:

Article - 1

Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. **Concessions** mean tariff, para-tariff and non-tariff concessions agreed under the Trade Liberalisation Programme;
2. **Direct Trade Measures** mean measures conducive to promoting mutual trade of Contracting States such as long and medium -term contracts containing import and supply commitments in respect of specific products, buy-back arrangements, state trading operations, and government and public procurement;
3. **Least Developed Contracting State** refers to a Contracting State which is designated as a "Least Developed Country" by the United Nations;
4. **Margin of Preference** means percentage of tariff by which tariffs are reduced on products imported from one Contracting State to another as a result of preferential treatment.
5. **Non-Tariff Measures** include any measure, regulation, or practice, other than "tariffs" and "paratariffs".
6. **Para-Tariffs** mean border charges and fees, other than "tariffs", on foreign trade transactions of a tariff-like effect which are levied solely on imports, but not those indirect taxes and charges, which are levied in the same manner on like domestic products. Import charges corresponding to

Article - 2

Establishment

Article - 3

Objectives and Principles specific services rendered are not considered as para-tariff measures;

7. **Products** mean all products including manufactures and commodities in their raw, semiprocessed and processed forms;
8. **SAPTA** means Agreement on SAARC Preferential Trading Arrangement signed in Dhaka on the 11th of April 1993;
9. **Serious injury** means a significant impairment of the domestic industry of like or directly competitive products due to a surge in preferential imports causing substantial

losses in terms of earnings, production or employment unsustainable in the short term;

10. **Tariffs** mean customs duties included in the national tariff schedules of the Contracting States;

11. **Threat of serious injury** means a situation in which a substantial increase of preferential imports is of a nature to cause "serious injury" to domestic producers, and that such injury, although not yet existing, is clearly imminent. A determination of threat of serious injury shall be based on facts and not on mere allegation, conjecture, or remote or hypothetical possibility.

The Contracting States hereby establish the South Asian Free Trade Area (SAFTA) to promote and enhance mutual trade and economic cooperation among the Contracting States, through exchanging concessions in accordance with this Agreement.

1. The Objectives of this Agreement are to promote and enhance mutual trade and economic cooperation among Contracting States by, inter-alia:

a) eliminating barriers to trade in, and facilitating the cross-border movement of goods between the territories of the Contracting States;

b) promoting conditions of fair competition in the free trade area, and ensuring equitable benefits to all Contracting States, taking into account their respective levels and pattern of economic development;

c) creating effective mechanism for the implementation and application of this Agreement, for its joint administration and for the resolution of disputes; and

d) establishing a framework for further regional cooperation to expand and enhance the mutual benefits of this Agreement.

2. SAFTA shall be governed in accordance with the following principles:

a) SAFTA will be governed by the provisions of this Agreement and also by the rules, regulations, decisions, understandings and protocols to be agreed upon within its framework by the Contracting States;

b) The Contracting States affirm their existing rights and obligations with respect to each other under Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization and other Treaties/Agreements to which such Contracting States are signatories;

c) SAFTA shall be based and applied on the principles of overall reciprocity and mutuality of advantages in such a way as to benefit equitably all Contracting States, taking into account their respective levels of economic and industrial development, the pattern of

Article - 4

Instruments

Article - 5

National Treatment

Article - 6

Components

Article - 7

their external trade and tariff policies and systems;

d) SAFTA shall involve the free movement of goods, between countries through, inter alia, the elimination of tariffs, para tariffs and non-tariff restrictions on the movement of goods, and any other equivalent measures;

e) SAFTA shall entail adoption of trade facilitation and other measures, and the progressive harmonization of legislations by the Contracting States in the relevant areas; and

f) The special needs of the Least Developed Contracting States shall be clearly recognized by adopting concrete preferential measures in their favour on a non-reciprocal basis.

The SAFTA Agreement will be implemented through the following instruments:-

1. Trade Liberalisation Programme

2. Rules of Origin

3. Institutional Arrangements

4. Consultations and Dispute Settlement Procedures

5. Safeguard Measures

6. Any other instrument that may be agreed upon.

Each Contracting State shall accord national treatment to the products of other Contracting States

in accordance with the provisions of Article III of GATT 1994.

SAFTA may, inter-alia, consist of arrangements relating to:

- a) tariffs;
- b) para-tariffs;
- c) non-tariff measures;
- d) direct trade measures.

Trade Liberalisation Programme

Article - 8

Additional Measures

1. Contracting States agree to the following schedule of tariff reductions:

a) The tariff reduction by the Non-Least Developed Contracting States from existing tariff rates to 20% shall be done within a time frame of 2 years, from the date of coming into force of the Agreement. Contracting States are encouraged to adopt reductions in equal annual installments. If actual tariff rates after the coming into force of the Agreement are below 20%, there shall be an annual reduction on a Margin of Preference basis of 10% on actual tariff rates for each of the two years.

b) The tariff reduction by the Least Developed Contracting States from existing tariff rates will be to 30% within the time frame of 2 years from the date of coming into force of the Agreement. If actual tariff rates on the date of coming into force of the Agreement are below 30%, there will be an annual reduction on a Margin of Preference basis of 5 % on actual tariff rates for each of the two years.

c) The subsequent tariff reduction by Non-Least Developed Contracting States from 20% or below to 0-5% shall be done within a second time frame of 5 years, beginning from the third year from the date of coming into force of the Agreement. However, the period of subsequent tariff reduction by Sri Lanka shall be six years. Contracting States are encouraged to adopt reductions in equal annual installments, but not less than 15% annually.

d) The subsequent tariff reduction by the Least Developed Contracting States from 30% or below to 0-5% shall be done within a second time frame of 8 years beginning from the third year from the date of coming into force of the Agreement. The Least Developed Contracting States are encouraged to adopt reductions in equal annual installments, not less than 10% annually.

2. The above schedules of tariff reductions will not prevent Contracting States from immediately reducing their tariffs to 0-5% or from following an accelerated schedule of tariff reduction.

3. a) Contracting States may not apply the Trade Liberalisation Programme as in paragraph 1

above, to the tariff lines included in the Sensitive Lists which shall be negotiated by the Contracting States (for LDCs and Non -LDCs) and incorporated in this Agreement as an integral part. The number of products in the Sensitive Lists shall be subject to maximum ceiling to be mutually agreed among the Contracting States with flexibility to Least Developed Contracting States to seek derogation in respect of the products of their export interest; and

b) The Sensitive List shall be reviewed after every four years or earlier as may be decided by SAFTA Ministerial Council (SMC), established under Article 10, with a view to reducing the number of items in the Sensitive List.

4. The Contracting States shall notify the SAARC Secretariat all non-tariff and para-tariff measures to their trade on an annual basis. The notified measures shall be reviewed by the Committee of Experts, established under Article 10, in its regular meetings to examine their compatibility with relevant WTO provisions. The Committee of Experts shall recommend the elimination or implementation of the measure in the least trade restrictive manner in order to facilitate intraSAARC trade¹.

5. Contracting Parties shall eliminate all quantitative restrictions, except otherwise permitted under GATT 1994, in respect of products included in the Trade Liberalisation Programme.

6. Notwithstanding the provisions contained in paragraph 1 of this Article, the Non-Least Developed Contracting States shall reduce their tariff to 0-5% for the products of Least Developed Contracting States within a timeframe of three years beginning from the date of coming into force of the Agreement.

Article - 9

Extension of Negotiated Concessions

Article - 10

Institutional Arrangements

Contracting States agree to consider, in addition to the measures set out in Article 7, the adoption of trade facilitation and other measures to support and complement SAFTA for mutual benefit.

These may include, among others: -

- a) harmonization of standards, reciprocal recognition of tests and accreditation of testing laboratories of Contracting States and certification of products;
- b) simplification and harmonization of customs clearance procedure;
- c) harmonization of national customs classification based on HS coding system;
- d) Customs cooperation to resolve dispute at customs entry points;
- e) simplification and harmonization of import licensing and registration procedures;
- f) simplification of banking procedures for import financing;
- g) transit facilities for efficient intra-SAARC trade, especially for the land-locked Contracting States;
- h) removal of barriers to intra-SAARC investments;
- i) macroeconomic consultations;
- j) rules for fair competition and the promotion of venture capital;
- k) development of communication systems and transport infrastructure;
- l) making exceptions to their foreign exchange restrictions, if any, relating to payments for products under the SAFTA scheme, as well as repatriation of such payments without prejudice to their rights under Article XVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and the relevant provisions of Articles of Treaty of the International Monetary Fund (IMF); and
- m) Simplification of procedures for business visas.

Concessions agreed to, other than those made exclusively to the Least Developed Contracting States, shall be extended unconditionally to all Contracting States.

1. The Contracting States hereby establish the SAFTA Ministerial Council (hereinafter referred to as SMC).
2. The SMC shall be the highest decision -making body of SAFTA and shall be responsible for the administration and implementation of this Agreement and all decisions and arrangements made within its legal framework.
3. The SMC shall consist of the Ministers of Commerce/Trade of the Contracting States.
4. The SMC shall meet at least once every year or more often as and when considered necessary by the Contracting States. Each Contracting State shall chair the SMC for a period of one year on rotational basis in alphabetical order.
5. The SMC shall be supported by a Committee of Experts (hereinafter referred to as COE), with one nominee from each Contracting State at the level of a Senior Economic Official, with expertise in trade matters.
6. The COE shall monitor, review and facilitate implementation of the provisions of this Agreement and undertake any task assigned to it by the SMC. The COE shall submit its report to SMC every six months.
7. The COE will also act as Dispute Settlement Body under this Agreement.
8. The COE shall meet at least once every six months or more often as and when considered necessary by the Contracting States. Each Contracting State shall chair the COE for a period of

Article - 11

Special and Differential Treatment for the Least Developed Contracting States

Article - 12

Special Provision for Maladewa

one year on rotational basis in alphabetical order.

9. The SAARC Secretariat shall provide secretarial support to the SMC and COE in the discharge of their functions.

10. The SMC and COE will adopt their own rules of procedure.

In addition to other provisions of this Agreement, all Contracting States shall provide special and more favorable treatment exclusively to the Least Developed Contracting States as set out in the following sub-paragraphs:

- a) The Contracting States shall give special regard to the situation of the Least Developed Contracting States when considering the application of anti-dumping and/or countervailing measures. In this regard, the Contracting States shall provide an opportunity to Least Developed Contracting States for consultations. The Contracting States shall, to the extent practical, favourably consider accepting price undertakings

offered by exporters from Least Developed Contracting States. These constructive remedies shall be available until the trade liberalisation programme has been completed by all Contracting States.

b) Greater flexibility in continuation of quantitative or other restrictions provisionally and without discrimination in critical circumstances by the Least Developed Contracting States on imports from other Contracting States.

c) Contracting States shall also consider, where practical, taking direct trade measures with a view to enhancing sustainable exports from Least Developed Contracting States, such as long and medium-term contracts containing import and supply commitments in respect of specific products, buy-back arrangements, state trading operations, and government and public procurement.

d) Special consideration shall be given by Contracting States to requests from Least Developed Contracting States for technical assistance and cooperation arrangements designed to assist them in expanding their trade with other Contracting States and in taking advantage of the potential benefits of SAFTA. A list of possible areas for such technical assistance shall be negotiated by the Contracting States and incorporated in this Agreement as an integral part.

e) The Contracting States recognize that the Least Developed Contracting States may face loss of customs revenue due to the implementation of the Trade Liberalisation Programme under this Agreement. Until alternative domestic arrangements are formulated to address this situation, the Contracting States agree to establish an appropriate mechanism to compensate the Least Developed Contracting States for their loss of customs revenue. This mechanism and its rules and regulations shall be established prior to the commencement of the Trade Liberalisation Programme (TLP). Notwithstanding the potential or actual graduation of Maladewa from the status of a Least Developed Country, it shall be accorded in this Agreement and in any subsequent contractual undertakings thereof treatment no less favourable than that provided for the Least Developed Contracting States.

Article - 13

Non-application

Article - 14

General Exceptions

Article - 15

Balance of Payments Measures

Notwithstanding the measures as set out in this Agreement its provisions shall not apply in relation to preferences already granted or to be granted by any Contracting State to other Contracting States outside the framework of this Agreement, and to third countries through bilateral, plurilateral and multilateral trade agreements and similar arrangements.

a) Nothing in this Agreement shall be construed to prevent any Contracting State from taking action and adopting measures which it considers necessary for the protection of its national security.

b) Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the similar conditions prevail, or a disguised restriction on intra-regional trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent any Contracting State from taking action and adopting measures which it considers necessary for the protection of:

(i) public morals;

(ii) human, animal or plant life and health; and

(iii) articles of artistic, historic and archaeological value.

1. Notwithstanding the provisions of this Agreement, any Contracting State facing serious balance of payments difficulties may suspend provisionally the concessions extended under this Agreement.

2. Any such measure taken pursuant to paragraph 1 of this Article shall be immediately notified to the Committee of Experts.

3. The Committee of Experts shall periodically review the measures taken pursuant to paragraph 1 of this Article.

4. Any Contracting State which takes action pursuant to paragraph I of this Article shall afford, upon request from any other Contracting State, adequate opportunities for consultations with a view to preserving the stability of concessions under SAFTA.

5. If no satisfactory adjustment is effected between the Contracting States concerned within 30 days of the beginning of such consultations, to be extended by another 30 days through mutual consent, the matter may be referred to the Committee of Experts.

6. Any such measures taken pursuant to paragraph 1 of this Article shall be phased out soon after the Committee of Experts comes to the conclusion that the balance of payments situation of the Contracting State concerned has improved.

Article - 16

Safeguard Measures

Article - 17

Maintenance of the Value of Concessions

Article - 18

Rules of Origin

1. If any product, which is the subject of a concession under this Agreement, is imported into the territory of a Contracting State in such a manner or in such quantities as to cause, or threaten to cause, serious injury to producers of like or directly competitive products in the importing Contracting State, the importing Contracting State may, pursuant to an investigation by the competent authorities of that Contracting State conducted in accordance with the provisions set out in this Article, suspend temporarily the concessions granted under the provisions of this Agreement. The examination of the impact on the domestic industry concerned shall include an evaluation of all other relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the domestic industry of the product and a causal relationship must be clearly established between "serious injury" and imports from within the SAARC region, to the exclusion of all such other factors.

2. Such suspension shall only be for such time and to the extent as may be necessary to prevent or remedy such injury and in no case, will such suspension be for duration of more than 3 years.

3. No safeguard measure shall be applied again by a Contracting State to the import of a product which has been subject to such a measure during the period of implementation of Trade Liberalization Programme by the Contracting States, for a period of time equal to that during which such measure had been previously applied, provided that the period of non-application is at least two years.

4. All investigation procedures for resorting to safeguard measures under this Article shall be consistent with Article XIX of GATT 1994 and WTO Agreement on Safeguards

5. Safeguard action under this Article shall be non-discriminatory and applicable to the product imported from all other Contracting States subject to the provisions of paragraph 8 of this Article.

6. When safeguard provisions are used in accordance with this Article, the Contracting State invoking such measures shall immediately notify the exporting Contracting State(s) and the Committee of Experts.

7. In critical circumstances where delay would cause damage which it would be difficult to repair, contracting State may take a provisional safeguard measure pursuant to a preliminary determination that there is clear evidence that increased imports have caused or are threatening to cause serious injury. The duration of the provisional measure shall not exceed 200 days, during this period the pertinent requirements of this Article shall be met.

8. Notwithstanding any of the provisions of this Article, safeguard measures under this article shall not be applied against a product originating in a Least Developed Contracting State as long as its share of imports of the product concerned in the importing Contracting State does not exceed 5 per cent, provided Least Developed Contracting States with less than 5% import share collectively account for not more than 15% of total imports of the product concerned.

Any of the concessions agreed upon under this Agreement shall not be diminished or nullified, by the application of any measures restricting trade by the Contracting States, except under the provisions of other articles of this Agreement.

Article - 19

Consultations

Article - 20

Dispute Settlement Mechanism

Rules of Origin shall be negotiated by the Contracting States and incorporated in this Agreement as an integral part.

1. Each Contracting State shall accord sympathetic consideration to and will afford adequate opportunity for consultations regarding representations made by another Contracting State with respect to any matter affecting the operation of this Agreement.

2. The Committee of Experts may, at the request of a Contracting State, consult with any Contracting State in respect of any matter for which it has not been possible to find a satisfactory solution through consultations under paragraph 1.

1. Any dispute that may arise among the Contracting States regarding the interpretation and application of the provisions of this Agreement or any instrument adopted within its framework concerning the rights and obligations of the Contracting States will be amicably settled among the parties concerned through a process initiated by a request for bilateral consultations.

2. Any Contracting State may request consultations in accordance with paragraph 1 of this Article with other Contracting State in writing stating the reasons for the request including identification of the measures at issue. All such requests should be notified to the Committee of Experts, through the SAARC Secretariat with an indication of the legal basis for the complaint.

3. If a request for consultations is made pursuant to this Article, the Contracting State to which the request is made shall, unless otherwise mutually agreed, reply to the request within 15 days after the date of its receipt and shall enter into consultations in good faith within a period of no more than 30 days after the date of receipt of the request, with a view to reaching a mutually satisfactory solution.

4. If the Contracting State does not respond within 15 days after the date of receipt of the request, or does not enter into consultations within a period of no more than 30 days, or a period otherwise mutually agreed, after the date of receipt of the request, then the Contracting State that requested the holding of consultations may proceed to request the Committee of Experts to settle the dispute in accordance with working procedures to be drawn up by the Committee.

5. Consultations shall be confidential, and without prejudice to the rights of any Contracting State in any further proceedings.

6. If the consultations fail to settle a dispute within 30 days after the date of receipt of the request for consultations, to be extended by a further period of 30 days through mutual consent, the complaining Contracting State may request the Committee of Experts to settle the dispute. The complaining Contracting State may request the Committee of Experts to settle the dispute during the 60-day period if the consulting Contracting States jointly consider that consultations have failed to settle the dispute.

7. The Committee of Experts shall promptly investigate the matter referred to it and make recommendations on the matter within a period of 60 days from the date of referral.

8. The Committee of Experts may request a specialist from a Contracting State not party to the dispute selected from a panel of specialists to be established by the Committee within one year from the date of entry into force of the Agreement for peer review of the matter referred to it.

Such review shall be submitted to the Committee within a period of 30 days from the date of referral of the matter to the specialist.

Article - 21

Withdrawal

Article - 22

Entry into Force

Article - 23

Reservations

9. Any Contracting State, which is a party to the dispute, may appeal the recommendations of the Committee of Experts to the SMC. The SMC shall review the matter within the period of 60 days from date of submission of request for appeal. The SMC may uphold, modify or reverse the recommendations of the Committee of Experts.

10. Where the Committee of Experts or SMC concludes that the measure subject to dispute is inconsistent with any of the provisions of this Agreement, it shall recommend that the Contracting State concerned bring the measure into conformity with this Agreement. In addition to its recommendations, the Committee of Experts or

SMC may suggest ways in which the Contracting State concerned could implement the recommendations.

11. The Contracting State to which the Committee's or SMC's recommendations are addressed shall within 30 days from the date of adoption of the recommendations by the Committee or SMC, inform the Committee of Experts of its intentions regarding implementation of the recommendations. Should the said Contracting State fail to implement the recommendations within 90 days from the date of adoption of the recommendations by the Committee, the Committee of Experts may authorize other interested Contracting States to withdraw concessions having trade effects equivalent to those of the measure in dispute.

1. Any Contracting State may withdraw from this Agreement at any time after its entry into force.

Such withdrawal shall be effective on expiry of six months from the date on which a written notice thereof is received by the Secretary-General of SAARC, the depositary of this Agreement. That Contracting State shall simultaneously inform the Committee of Experts of the action it has taken.

2. The rights and obligations of a Contracting State which has withdrawn from this Agreement shall cease to apply as of that effective date.

3. Following the withdrawal by any Contracting State, the Committee shall meet within 30 days to consider action subsequent to withdrawal.

1. This Agreement shall enter into force on 1st January 2006 upon completion of formalities, including ratification by all Contracting States and issuance of a notification thereof by the SAARC Secretariat. This Agreement shall supercede the Agreement on SAARC Preferential Trading Arrangement (SAPTA).

2. Notwithstanding the supercession of SAPTA by this Agreement, the concessions granted under the SAPTA Framework shall remain available to the Contracting States until the completion of the Trade Liberalisation Programme.

This Agreement shall not be signed with reservations, nor will reservations be admitted at the time of notification to the SAARC Secretariat of the completion of formalities.

Article - 24

Amendments

This Agreement may be amended by consensus in the SAFTA Ministerial Council. Any such amendment will become effective upon the deposit of instruments of acceptance with the Secretary General of SAARC by all Contracting States.

Article - 25

Depositary

This Agreement will be deposited with the Secretary General of SAARC, who will promptly furnish a certified copy thereof to each Contracting State.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorized thereto by their respective Governments have signed this Agreement.

DONE in ISLAMABAD, PAKISTAN, On This The Sixth Day Of the Year Two Thousand Four, In Nine Originals

In The English Language All Texts Being Equally Authentic.

M. MORSHED KHAN

Minister for Foreign Affairs
People's Republic of Bangladesh

NADO RINCHHEN

Officiating Minister for
Foreign Affairs

Kingdom of Bhutan

YASHWANT SINHA

Minister of External Affairs
Republic of India

FATHULLA JAMEEL

Minister of Foreign Affairs

Republic of Maladewa

DR. BHEKH B. THAPA

Ambassador-at-large
for Foreign Affairs

His Majesty's Government of Nepal

KHURSHID M. KASURI
Minister of Foreign Affairs
Islamic Republic of Pakistan
TYRONNE FERNANDO
Minister of Foreign Affairs
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

¹The initial notification shall be made within three months from the date of coming into force of the Agreement and the COE shall review the notification in its first meeting and take appropriate decision.

